

JURNAL ANTROPOLOGI

Isu-isu Sosial dan Budaya

- Berentak dalam Ritual *Besale* pada Suku Batin Sembilan,
Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi: Kajian Analisis Teks dan Konteks**
SUCI INTAN MAULIA, I DEWA AYU SRI UTARI 119-128
- Pemetaan Jaringan Sosial dalam Organisasi: Studi pada Distributor
Tupperware Unit Simabur Indah di Batusangkar, Sumatera Barat**
SISKA ELASTA PUTRI, DAMSAR, BOB ALFIANDI 129-143
- Konstruksi Makna Tradisi *Peusijek* dalam Budaya Aceh**
CHAEROL RIEZAL, HERMANU JOEBAGIO, SUSANTO 145-155
- Budaya Merantau Masyarakat dan Permasalahan Pendaftaran Pemilih
pada Pilkada di Sumatera Barat**
MEGA ARDILA, ASRINALDI 157-163
- Peran Faktor Pemungkin dan Penguat pada Akses Jamban Sehat Perkotaan**
MILA MARDOTILLAH, BUDHI GUNAWAN, RINI S. SOEMARWOTO
ARDINI S. RAKSANAGARA 165-178
- Komunikasi Budaya dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Kota Pariaman**
WIDYA HASAN' ASMAWI, NAJMUDDIN RASUL 179-189
- Antara Ulayat Adat dan Hutan Nagari:
Sebuah Kebijakan Perhutanan Sosial di Minangkabau**
TRESNO, RIZKA FITRI ANA, MUKI WICAKSONO, AUVIAR R. WICAKSANTI
RICHE DESWITA 191-211
- Budaya Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilukada
di Kota Padang Panjang**
WERIZA, ASRINALDI, ERNITA ARIF 213-222
- Lembaga Masyarakat Peduli Api: Studi Tentang Hambatan Pelaksanaan Peran**
T. ROMI MARNELLY 223-230



JURNAL ANTROPOLOGI: Isu-Isu Sosial Budaya

P-ISSN 1410-8356

E-ISSN 2355-5963

Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya (JANTRO) telah terdaftar dengan nomor ISSN 1410-8356 (cetak), ISSN 2355-5963 (online). Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya (JANTRO) adalah jurnal peer review yang diterbitkan oleh Laboratorium Antropologi, Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia.

Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya (JANTRO) diterbitkan dengan tujuan ikut membangun kajian Ilmu Antropologi Sosial dan Budaya di Indonesia, dengan terbuka dan menerima kontribusi dari berbagai disiplin ilmu dan pendekatan yang bertemu di persimpangan hasil penelitian dan analisis-kritis mengenai isu pembangunan kontemporer. Jurnal ini dikelola dan di bawah naungan Laboratorium Antropologi Jurusan Antropologi FISIP Universitas Andalas. Sumbangan artikel meliputi artikel hasil penelitian, kajian kepustakaan dan ulasan ilmiah lainnya.

Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya (JANTRO) terbit secara berkala sebanyak dua kali dalam rentang waktu bulan Juni hingga bulan Desember. Artikel Jurnal ini dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Artikel yang diterbitkan telah melalui proses seleksi oleh dewan redaksi dan mitra bestari. Artikel yang lolos seleksi akan dipungut biaya guna keberlanjutan jurnal, sedangkan pengiriman naskah tidak dipungut biaya. Informasi lengkap untuk pemuatan artikel dan petunjuk penulisan artikel tersedia di dalam setiap terbitan

DEWAN EDITORIAL

Pemimpin Redaksi	: Lucky Zamzami
Dewan Editor	: Semiarto Aji Purwanto (Universitas Indonesia) Takamasa Osawa (Kyoto University, Jepang) Johan Weintre (Flinders University, Australia) Yevita Nurti (Universitas Andalas) Eka Vidya Putra (Universitas Negeri Padang) Mailinar Indrawati (UIN S. Thaha Syaifudin, Jambi) Asrinaldi (Universitas Andalas) Zainal Arifin (Universitas Andalas)
Mitra Bestari	: Nursyirwan Effendi (Universitas Andalas) Silfia Hanani (IAIN Bukittinggi) Syahrizal (Universitas Andalas) Asliah Zainal (IAIN Kendari) Jendrius (Universitas Andalas) Sri Meiyenti (Universitas Andalas) Mira Hasti Hasmira (Universitas Negeri Padang) Bambang Rudito (ITB Bandung) Yunarti (Universitas Andalas) Akifumi Iwabuchi (TUMSAT, Jepang) Dedi Adhuri Supriadi (LIPI) Maskota Delfi (Universitas Andalas) Afrizal (Universitas Andalas)
Staf Pendukung	: Ase Kasuma Dewi (Universitas Andalas) Putri Cendana Sari (Universitas Andalas)

ALAMAT REDAKSI

JURNAL ANTROPOLOGI
Isu-isu Sosial dan Budaya
Gedung Jurusan Lantai II FISIP
Universitas Andalas Padang
Kampus Limau Manis 25162

Online at <http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro>

PENERBIT

LABORATORIUM ANTROPOLOGI
JURUSAN ANTROPOLOGI
FISIP UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
Telp. 0751-71266/081374535378

Email: editor_jantro@soc.unand.ac.id

Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya telah mendapatkan akreditasi nasional peringkat 2 Ristek Dikti, dengan nomor SK: 34/E/KPT/2018 Tanggal 10 Desember 2018

DAFTAR ISI

	Halaman
<i>Berentak</i> dalam Ritual <i>Besale</i> pada Suku Batin Sembilan, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi: Kajian Analisis Teks dan Konteks SUCI INTAN MAULIA, I DEWA AYU SRI UTARI	119
Pemetaan Jaringan Sosial dalam Organisasi: Studi pada Distributor Tupperware Unit Simabur Indah di Batusangkar, Sumatera Barat SISKA ELASTA PUTRI, DAMSAR, BOB ALFIANDI	129
Konstruksi Makna Tradisi <i>Peusijek</i> dalam Budaya Aceh CHAEROL RIEZAL, HERMANU JOEBAGIO, SUSANTO	145
Budaya Merantau Masyarakat dan Permasalahan Pendaftaran Pemilih Pada Pilkada di Sumatera Barat MEGA ARDILA, ASRINALDI	157
Peran Faktor Pemungkin dan Penguat pada Akses Jamban Sehat Perkotaan MILA MARDOTILLAH, BUDHI GUNAWAN, RINI S. SOEMARWOTO ARDINI S. RAKSANAGARA	165
Komunikasi Budaya dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Kota Pariaman WIDYA HASAN' ASMAWI, NAJMUDDIN RASUL	179
Antara Ulayat Adat dan Hutan Nagari: Sebuah Kebijakan Perhutanan Sosial di Minangkabau TRESNO, RIZKA FITRI ANA, MUKI WICAKSONO, AUVIAR R. WICAKSANTI RICHE DESWITA	191
Budaya Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilukada di Kota Padang Panjang WERIZA, ASRINALDI, ERNITA ARIF	213
Lembaga Masyarakat Peduli Api: Studi Tentang Hambatan Pelaksanaan Peran T. ROMI MARNELLY	223

**BERENTAK DALAM RITUAL BESALE PADA
SUKU BATIN SEMBILAN, KABUPATEN BATANGHARI, PROVINSI JAMBI:
KAJIAN ANALISIS TEKS DAN KONTEKS**

Suci Intan Maulia^{1*}, I Dewa Ayu Sri Utari²

Submitted Article: 20 June 2018

Reviewed Article: 20 September 2018

Accepted Article: 17 December 2018

Abstract

This research aimed to analyze the existence of a besale ritual typical movement, movement in the besale ritual process is berentak. Berentak motion is a movement running straight forward, backward, around and jumping. The action continues to be done by Malin Pengasu as shaman during the process of besale ritual. Besale is form of a magical traditional ceremony, which lives in remote indigenous communities of Batin Sembilan clan, precisely in forest area in the Province of Jambi. Besale (berasale) means the origin of man, besale ritual involves Malin Pengasu (shaman) and Sidi (good spirits who treat the sick through shaman), to cleanse and cast out the evil spirits that consider as the source of the disease. Malin Pengasu (shaman) is a person who set all forms of preparation of berterkas up to the besale ritual. The research using the method of qualitative approach, with text and the context analysis according of Sumandiyo Hadi, which analyze and review the form, techniques, and style the choreography, and explain the meaning of based social culture community. The results of research show that how the process of choreography and the emergence of distinctive motion in the besale ritual, which in principle socio-cultural society that has been behind the presence of form, technique, and style of movement.

Keywords: Berentak, Besale, Choreography, Shaman, Treatment.

A. PENDAHULUAN

Ritual Besale merupakan ritual prosesi pengobatan yang dilakukan oleh komunitas masyarakat adat terpencil yang hidup di kawasan hutan Provinsi Jambi, tepatnya di desa Bungku Simpang Macam Kabupaten Batanghari. Masyarakat Suku Batin Sembilan dalam tradisionalnya merupakan suku terpencil yang masih sedikit mengalami perubahan sosial, mereka

masih mempertahankan tradisi leluhur mereka dan masih mempercayai roh-roh yang memiliki kekuatan gaib. Menurut mereka mempercayai sakit dan mati adalah bagian dari gangguan roh jahat, oleh karenanya ritual besale harus dilakukan oleh masyarakat Suku Batin Sembilan.

Menurut sejarahnya, ritual besale merupakan bagian dari upacara tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dari leluhur di Suku Batin Sembilan. Sebuah warisan tradisional yang sejak lama turun-temurun hidup dan berkembang pada suatu daerah, tentunya mempunyai peranan tertentu dalam masyarakat pendukungnya,

¹ Graduate Student of the Minat Pengkajian Seni Tari, Institut Seni Indonesia, Padangpanjang.

² Graduate Student of the Minat Pengkajian Seni Tari, Institut Seni Indonesia, Padangpanjang.

* Corresponding Author: suciintanmaulia19@gmail.com

sehubungan dengan itu menurut Kusmayati mengatakan bahwa kehadiran suatu upacara di dalam suatu masyarakat merupakan ungkapan tertentu yang berhubungan dengan bermacam-macam peristiwa yang dipandang penting bagi masyarakat itu. Penempatan kepentingan di dalam suatu kelompok masyarakat tidak selalu sama bagi masyarakat lain. Peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dilaksanakan sebagai suatu upacara dengan rangkaian dan tatanannya. Bentuk ungkapan yang diketengahkan untuk menyambut atau dihubungkan dengan peristiwa penting ini juga bermacam-macam sesuai dengan kepercayaan dan tradisi yang sudah dijalani secara turun-temurun (Hermien Kusmayati, 2000:1).

Berkaitan dengan pendapat di atas, kehadiran upacara pengobatan atau ritual *besale* dipandang penting bagi Suku Batin Sembilan di Kabupaten Batanghari, karena bagi mereka menyakini bahwa jika ada keluarga atau saudara mereka yang sakit maka harus dilakukan ritual *besale*. Oleh karenanya, ritual *besale* sebagai warisan budaya yang sangat penting bagi masyarakat Suku Batin Sembilan dan warisan tersebut perlu dilestarikan dan dipertahankan melalui proses ritual *besale*. Dalam proses ritual *besale*, *Malin Pengasu* (Dukun) mengelilingi si sakit dan mulai menari memegang *Selundang Gading* dengan gerakan tertentu. Unsur tari didalam ritual *besale* terlihat sangat jelas pada gerakan kaki yang disebut *berentak*, *Malin Pengasu* akan *berentak* dan memulai proses pengobatan. Gerakan *berentak* adalah gerakan berjalan lurus maju, mundur, berkeliling dan melompat, salah satu ciri khas pada gerakan *berentak* di dalam ritual *besale* adalah gerakan-gerakan pendek, berat dan berisi dengan langkah kaki dasar 4 langkah. Selanjutnya, saat *Malin Pengasu* (Dukun) melakukan gerakan *berentak* yaitu berkeliling dan melompat, kesemuanya itu merupakan salah satu bagian puncak dari pengobatan, karena *Malin Pengasu* (Dukun) mulai tidak sadarkan diri, diakibatkan telah dirasukin oleh roh-roh baik. Masalah gaya dalam gerakan *berentak* yang menimbulkan

bentuk dan isi dari sebuah koreografi yang muncul dalam ritual *besale*. Gaya khas yang muncul dalam ritual *besale* telah menghantarkan kepada para *Sidi* yang kemudian ditransformasikan kepada *Malin Pengasu* (Dukun) untuk mengobati sisakit. Gerakan *berentak* dalam ritual *besale* memiliki bentuk, teknik dan gaya, yang dalam analisisnya ada beberapa tampilan gerak khas yang diwujudkan dalam ritual *besale*.

Berkaitan uraian di atas, membuktikan bahwa gerakan *berentak* dalam ritual *besale* memiliki bentuk, teknik maupun gaya menurut analisis koreografi secara tekstual. Dalam tampilan gerak khas yang diwujudkan dalam ritual *besale* yaitu munculnya gerakan *berentak*, kualitas gerak yang ditarikan oleh *Malin Pengasu* (Dukun) telah mampu menghantarkan dan memberikan nuasa benang merah kepada para *Sidi* (roh baik yang mengobati sisakit melalui dukun). Gaya, bentuk dan teknik mampu memberikan informasi kepada pembacaan atas sebuah pertunjukan. Tubuh yang merupakan alat komunikasi untuk melihat, serta menganalisis teknik yang muncul dalam gerakan *berentak*.

Berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa yang menjadi ketertarikan peneliti untuk mengkaji gerak *berentak* dalam ritual *besale* Suku Batin Sembilan menurut analisis kajian teks dan konteks, bagaimana bentuk gerakan *berentak* jika dianalisis dari kajian tekstual, dan fenomena apa sesungguhnya yang melatarbelakangi hadirnya gerakan *berentak* dalam ritual *besale* jika dikaji berdasarkan kontekstual, sehingga gerakan *berentak* menjadi ciri khas dalam pertunjukan ritual *besale* Suku Batin Sembilan di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang akan melihat serta menelaah salah satu gerakan *berentak* yang terdapat pada ritual *besale* Suku Batin Sembilan. Penggunaan metode tersebut akan mengarahkan peneliti dalam proses pengumpulan data, yang akan

menjawab permasalahan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dalam sebuah penelitian agar data yang diperoleh akurat. Satori dan Komariah menyebutkan bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif diantara yaitu observasi, partisipasi, studi pustaka, dan wawancara (Satori dan Komariah, 2013:90). Selanjutnya, setelah semua data berhasil dikumpulkan atau pengumpulan data selesai, maka tahap selanjutnya adalah analisis data yang akan dilakukan peneliti, tahap analisis data adalah proses berpikir dalam menentukan hubungan antara data yang didapatkan di lapangan dengan teori yang dipergunakan untuk kemudian dikaji melalui kajian teks dan konteks.

C. PEMBAHASAN

Setiap daerah memiliki corak kesenian, budaya, dengan ciri khasnya masing-masing salah satunya adalah budaya *besale*, *besale* yang merupakan salah satu budaya yang bersifat turun-temurun yang hidup dan berkembang ditengah kehidupan Suku Batin Sembilan, tepatnya di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Tradisi budaya yang dimiliki oleh masyarakat Suku Batin Sembilan telah menjadi warisan budaya yang sangat penting bagi masyarakat Suku Batin Sembilan. Sebuah warisan tradisional yang sejak lama turun-temurun hidup dan berkembang pada suatu daerah, tentunya mempunyai peranan tertentu dalam masyarakat pendukungnya, yang diekspresikan dalam aturan adat, kesenian, upacara (ritual).

Ritual *besale* sebagai bagian dari upacara pengobatan yang dilakukan oleh Suku Batin Sembilan, ritual *besale* dilaksanakan sebagai upacara untuk permohonan kesembuhan, apabila ada anggota keluarga yang sakit maka ritual *besale* perlu dilakukan. Hasan sebagai Malin Pengasu mengatakan:

"Besale tradisi kito turun-temurun daripado nenek moyang kito, kalo ado sakit, kalo ado negur penunggu hutan ni kayak setan, iblis pokoknyo kayak mahluk halus, kalo ke

bawak rumah sakit dak baik dak mempan, pasti baleknyo ke besale, kito nak ngusir setan iblis, makonyo kito mohon sembuh pake besale" (Besale tradisi kita turun-temurun dari nenek moyang kita, kalau ada yang sakit, kalau ada yang mengganggu seperti penghuni hutan seperti setan, iblis, pokoknya seperti makhluk halus, kalau di antar ke rumah sakit tidak bagus, tidak tahan, pasti kembali ke *besale*, kita mau mengusir setan iblis, makanya kita memohon kesembuhan dengan besale) (Wawancara, 25 September 2017 di Desa Bungku Simpang Macan).

Berkaitan dengan pendapat tersebut, bahwa pada hakikatnya penyelenggaraan ritual *besale* dilakukan sebagai wujud aktifitas dan tindakan manusia dalam melaksanakan kebaktiannya terhadap Tuhan, dewa, roh nenek moyang atau makhluk halus lainnya, dalam usahanya untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan penghuni alam gaib. Dalam ritual *besale* ungkapan-ungkapan tersebut digunakan untuk menunjuk sesuatu, menurut Adeng mengatakan bahwa upacara berfungsi sebagai alat komunikasi kepada Tuhan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pada saat upacara dilaksanakan (Adeng Muchtar, 2011:63). Ritual *besale* sebagai suatu tindakan yang bersifat sakral, segala penggunaan benda-benda sakralpun dalam ritual tidak tergantung pada ciri-ciri yang hakiki, tetapi tergantung kepada kelompok masyarakatnya. Oleh karena itu, untuk memahami hal tersebut perlu dipahami melalui pengamatan langsung terhadap ritual *besale* yang dilakukan oleh masyarakat Suku Batin Sembilan. Semua nya adalah konsep dasar pengobatan pada Suku Batin Sembilan yang harus dilakukan melalui proses ritual *besale*.

Pada proses pelaksanaan ritual *besale* hal yang harus dilakukan adalah *beterkas*, *beterkas* adalah salah satu prosesi yang dilakukan dengan mempersiapkan segala kebutuhan yang telah ditentukan oleh Malin Pengasu (Dukun). Dalam hal ini *Beterkas* dilakukan dengan mempersiapkan segala

kebutuhan yang telah di tentukan, Hasan Sebagai *Malin Pengasu* mengatakan:

"karno nak cukup besale, banyak nian nak disiapkan, kayak rumah kecil dibilang ukurannyo 1 meter yang dibilang balai, balai tu tempat dimano tempat sementara bagi tamu roh-roh halus selamo upacara besale belangsong, dalam balai itu ado macem-macem jenis kue disebut cace. Teros digantong diatap tempat bagi orang sakit yang diobati, ado enam balai dinamoin menurut bentuk samo fungsi tu balai pengasuh, balai betajuk kembang, balai bebangun, balai angkat sembah, balai betanggo malai, dan balai kurung". (Banyak yang disiapkan seperti rumah kecil miniatur ukuran 1 meter yang disebut dengan istilah *balai*. Secara filosofi *balai* memiliki fungsi sebagai tempat tinggal sementara untuk para tamu roh-roh halus selama upacara *besale* berlangsung, dan di dalam *balai* terdapat berbagai jenis kue yang disebut *cace*. Selanjutnya *balai* di gantung di atap sebagai tempat bagi orang sakit yang akan diobati, ada enam balai dinamai menurut bentuk dan fungsinya yaitu *balai pengasuh, balai betajuk kembang, balai bebangun, balai angkat sembah, balai betanggo malai, dan balai kurung*) (Wawancara, 25 September 2017 di Desa Bungku Simpang Macan).

Dalam pelaksanaan ritual *besale* ternyata memiliki aturan dan ketentuan yang harus dilakukan, disetiap pelaksanaannya memiliki makna, baik saat prosesi sebelum ritual hingga semua *balai* yang digunakan memiliki makna dan arti. Ritual *besale* sebagai bagian dari upacara tradisional yang bersifat magis, serta mengandung banyak aspek di dalamnya khususnya seni tari. Dalam proses ritual *besale* beberapa hal yang menarik, yaitu munculnya gerakan *berentak* yang memiliki ciri khas, di dalam ritual *besale* terdapat gerakan-gerakan pendek, berat dan berisi dengan langkah kaki dasar 4 langkah. Gerakan *berentak* yang dilakukan *Malin Pengasu* (Dukun) saat berkeliling dan melompat merupakan salah

satu bagian puncak dari pengobatan, karena *Malin Pengasu* (Dukun) mulai tidak sadarkan diri, diakibatkan telah dirasukin oleh para *Sidi* Selanjutnya yang menarik dalam gerak *berentak* jika dilihat dari konsep koreografi, maka muncul bentuk gerak, teknik gerak dan gaya gerak yang dapat dibaca secara men-teks sesuai dengan konsep pemahaman menurut kajian tektual dan kontekstual.

1. BERENTAK DALAM RITUAL BESALE SECARA TEKS

Gerakan *berentak* dalam ritual *besale* secara teks berhubungan dengan bentuk tari yang meliputi elemen-elemen yang terkait dengan pertunjukan tari. Sumandiyo Hadi berpendapat mengenai pengertian bentuk di dalam kajian teks tari, menjelaskan bahwa tari dipandang sebagai bentuk secara fisik (teks) yang relatif berdiri sendiri, yang dapat dibaca, ditelaah dan dianalisa secara tektual "men-teks" sesuai dengan konsep pemahamannya. Paradigma kajian tektual dilakukan dengan mengana lisis menggunakan konsep koreografi. Konsep koreografi dilakukan untuk menganalisis sebuah tarian dengan telaah bentuk gerakannya, teknik gerakannya dan gaya gerakannya (Hadi, 2007:23-24).

Sesuai konsep analisis koreografi yang dikemukakan Sumandiyo Hadi, yaitu bentuk, teknik dan gaya merupakan satu kesatuan bentuk tari, karena bentuk gerak yang ditarikan tidak akan hadir tanpa adanya teknik, begitupun munculnya gaya akan hadir dengan adanya bentuk gerak dan tekniknya. Menurut pengertiannya, bentuk adalah wujud yang diartikan sebagai hasil dari berbagai elemen yaitu gerak, ruang dan waktu. Kemudian teknik sebagai proses yang diwujudkan dari sebuah keterampilan dalam melakukan gerak, dan gaya menunjukkan pada ciri khas yang terdapat pada bentuk serta tekniknya.

Bentuk dapat dikatakan sebagai organisasi dari kekuatan-kekuatan sebagai hasil dari struktur internal dari tari. Menurut Harold Rugg mengatakan bahwa bentuk adalah organisasi yang paling cocok dari kekuatan-kekuatan, dari hubungan-

hubungan yang dirasakan sehingga dapat meletakkannya dengan sesuatu materi objektif (Sri Rochana dan Dwi Wahyudiarto, 2014:70). Bentuk memberi satu keteraturan dan keutuhan dari tari, struktur internal hubungan dari kekuatan-kekuatan di dalam tari yang menciptakan suatu nilai. Selain itu, unsur-unsur gerak yang akan membentuk sebuah tari yang utuh, maka perlu adanya kemampuan teknik. Karena tari yang muncul dalam ritual *besale* menjadi media untuk berkomunikasi kepada roh-roh baik dalam hal penyembuhan, tari yang muncul tidak hanya sekedar rangkaian gerak, tetapi memiliki bentuk, teknik dan gayanya (ciri khas). Berikut analisis gerakan *berentak* dalam ritual *besale* melalui pendekatan konsep koreografi, yaitu sebagai berikut:

a. Analisis Bentuk Gerak dalam “Gerakan Berentak”

Pemahaman analisis bentuk gerakan *berentak* dalam ritual *besale* dilakukan dengan mengamati bagaimana proses mewujudkan suatu bentuk yang akan menjadi sebuah wujud gerak tari. Berdasarkan pengertian dalam tari, gerak adalah dasar ekspresi, oleh karena gerak ditemui sebagai ekspresi dari semua pengalaman yang diekspresikan lewat medium yaitu gerakan tubuh. Tubuh bukan hanya sebagai sumber gerak, tetapi sebagai alat atau media untuk menyampaikan maksud, seperti pendapat Robby Hidayat yang mengatakan tubuh merupakan sesuatu yang utama dalam tujuan koreografi, maka tubuh bersifat substantial (Hidayat, 2013:11). Dengan begitu tubuh sebagai sumber gerak dan gerak tubuh diyakini sebagai alat komunikasi untuk mengungkapkan maksud. Selanjutnya, menurut Sumandiyo Hadi mengatakan gerak di dalam tari adalah bahasa yang dibentuk menjadi pola-pola gerak dari seorang penari. Prinsip-prinsip bentuk yang perlu dianalisis yaitu kesatuan variasi, repetisi (ulangan), transisi, rangkaian dan klimaks (Hadi, 2003:72-84).

Dalam bentuk gerak tari yang muncul dalam ritual *besale* pada prinsipnya selalu menghendaki adanya prinsip repetisi

(pengulangan), adanya pengulangan gerak yang menjadi ciri khas sajian sebuah koreografi dalam ritual *besale*. Dalam bentuk gerak *berentak*, pengulangan gerak terjadi berulang-ulang beberapa kali, dengan maksud menampakkan kekhasan bentuk koreografi yang muncul dalam ritual *besale*. Gerakan *berentak* yang berulang-ulang dilakukan yaitu berjalan lurus maju, mundur, berkeliling dan meloncat dengan langkah kaki dasar 4 langkah, gerakan itu terus dilakukan oleh *Malin Pengasu* selama proses ritual *besale*. Dalam analisisnya, bentuk gerak yang muncul sebagai wujud dari pertimbangan prinsip-prinsip bentuk yang menjadi sebuah wujud gerak tari. Selain repetisi (pengulangan) dalam ritual *besale*, penyusunan bentuk gerak yang muncul pada ritual *besale* yaitu prinsip transisi (perpindahan). Proses transisi (perpindahan) mempunyai peranan penting dalam ritual *besale*, menurut analisisnya gerak *berentak* yang dilakukan terlihat sangat monoton, namun setelah mengamati adanya transisi (perpindahan) dari gerak yang satu ke gerak yang lain, dapat menciptakan kesatuan serta keutuhan dalam sebuah koreografi. Misalnya, dari gerakan *berentak* maju dan mundur *Malin Pengasu* melakukan transisi gerakan *berentak* dengan berkeliling dan klimaksnya melakukan gerakan melompat.

Selanjutnya, pada ritual *besale* prinsip yang digunakan yaitu prinsip Klimaks, Sumandiyo Hadi mengatakan bahwa susunan atau urutan rangkaian keja dian harus membentuk satu klimaks, agar maksud dari bentuk gerak tercapai, dalam sebuah tarian atau koreografi selalu ada permulaan, “berjalan” atau “berkembang” dan ada “penyelesaian” (Hadi, 2007:28-29). Analisis ritual *besale* jika diperhatikan, terjadi satu klimaks yang dapat dinikmati sebagai titik puncak dari proses ritual. Klimaks terjadi pada gerak *berentak* yaitu meloncat dapat memberi arti dari kehadiran permulaan gerakan, pertengahan dan akhir atau penyelesaian. Berikut adalah Gambar 1.1 yaitu bentuk gerak yang ditarikan oleh *Malin Pengasu* saat proses ritual *besale* berlangsung:



Gambar 1
Bentuk Gerak *Berentak* yang dilakukan *Malin Pengasu*
(Dok. September 2017)

b. Analisis Teknik Gerak dalam “Gerakan *Berentak*”

Pemahaman analisis teknik gerak pada gerakan *berentak* adalah bagaimana cara mengamati seluruh proses fisik yang dilakukan oleh *Malin Pengasu* sekaligus sebagai penari, teknik-teknik apa yang muncul saat menarikan gerak-gerak tersebut. Keterampilan yang dimiliki maka teknik-teknik muncul dalam gerakan *berentak*. Sumandiyo Hadi mengatakan Keterampilan teknik harus mengenal sungguh-sungguh teknik bentuk, teknik medium dan teknik instrument (Hadi, 2007:29). Pemahaman konsep teknik bentuk, teknik medium dan teknik instrument menurut Sumandiyo Hadi, bagaimana menganalisis ritual *besale* secara tektual terhadap teknik yang dilakukan *Malin Pengasu*. Dalam hal ini, peneliti mengamati bagaimana keterampilan teknik yang diwujudkan oleh *Malin Pengasu* dalam mewujudkan bentuk gerak tari. Selanjutnya, permasalahan yang perlu dianalisis adalah bagaimana sikap badan *Malin Pengasu* saat melakukan gerakan *berentak*. Bagaimana teknik dalam menjaga posisi badan saat menarikan gerakan meloncat, berkeliling, keseimbangan yang muncul dan semuanya memiliki teknik.

Analisis teknik gerak dalam gerakan *berentak*, perlu memahami konsep teknik kontrol keseimbangan tubuh, Margery dalam Sumandiyo Hadi mengatakan permasalahan teknik kontrol keseimbangan tubuh yaitu penari menggunakan tubuhnya sendiri untuk mengatasi ketidakberdayaan menahan tarian gravitasi, saat-saat pengontrolan penggunaan daya *sentripetal* dan *sentripugal* supaya dapat menguasai dan membuat keseimbangan agar stabil dan tidak jatuh ketika melakukan gerakan baik ditempat seperti tekukan, uluran, putaran, liyukan, ayunan, goyangan, getaran dan sebagainya, selanjutnya gerak pindah tempat atau *locomotor movement* seperti gerak jalan, lompat, loncat, belok, berputar, dan sebagainya (Margery dalam Sumandiyo Hadi, 2007:31). Sehubungan dengan itu, dalam pemahaman konsep teknik bentuk yaitu bagaimana melakukan berbagai gerakan yang dilandasi dari teknik-teknik yang mampu menegaskan bahwa tari yang dibawa bukan hanya serangkaian sikap-sikap atau postur yang dihubung-hubungkan tetapi bagaimana gerak itu mampu berkaitan antara rasa dan maksud yang ingin disampaikan. Dalam hal ini, *Malin Pengasu* melakukan beberapa teknik saat melakukan gerakan, teknik keseimbangan tubuh yang dilakukannya agar tetap bisa menari saat dirasukin roh-roh halus. Terutama pada

gerakan meloncat, butuh konsentrasi yang cukup mendalam untuk menjaga keseimbangan karena apabila terjatuh maka proses ritual *besale* akan gagal. Berikut adalah

Gambar 2, yaitu teknik yang dilakukan *Malin Pengasu* dalam menjaga keseimbangan tubuhnya.



Gambar 2.
Teknik gerak *Berentak* yang dilakukan *Malin Pengasu*
(Dok. September 2017)

c. Analisis Gaya Gerak dalam “Gerakan *Berentak*”

Pemahaman analisis gaya gerak dalam gerakan *berentak* dilihat dari ciri khas yang muncul dalam konteks bentuk dan teknik. Sumandiyo Hadi mengatakan bahwa pengertian gaya dalam pemahaman lebih menunjuk pada ciri khas atau corak yang terdapat pada bentuk serta teknik (Hadi, 2007:24-25). Gaya atau ciri khas yang muncul dari gerak *berentak* sangat berkaitan dengan geografis masyarakat Suku Batin Sembilan, munculnya gaya gerak difaktorin dari kondisi lingkungannya. Masyarakat Suku Batin Sembilan yang hidup di daerah pedalaman (wilayah hutan), jenis-jenis gaya geraknya selalu bertumpu pada kaki dan tidak terlalu banyak menggunakan

gerakan tangan. Ciri khas gaya dalam gerak *berentak* juga berkaitan dengan latar belakang budaya masyarakat Suku Batin Sembilan, menurut sejarahnya ritual *besale* sebagai wujud dari budaya yang dimiliki oleh masyarakat Suku Batin Sembilan, gaya *berentak* yang menurut mereka adalah menghentak atau menari, budaya menari sebagai salah satu alat atau media ungkap yang mampu mentransformasikan segala yang dimaksud atau permohonan yang ingin dicapai. Jika diamati gaya yang muncul pada gerakan *berentak* adalah gerakan seperti gaya jenis tarian pedalaman, dimana gaya geraknya seolah-olah melayang, meloncat dan sikap kaki selalu bertumpu pada tumit, nampak rasa berat dan kokoh. Berikut adalah Gambar 3, yaitu gaya gerak yang muncul dalam ritual *besale*.



Gambar 3.
Gaya gerak *Berentak* yang dilakukan *Malin Pengasu*
(Dok. September 2017)

2. **BERENTAK DALAM RITUAL BESALE SECARA KONTEKS**

Menurut Sumandiyo Hadi, kajian atau pendekatan kontekstual terhadap seni tari artinya fenomena seni itu dipandang atau konteksnya dengan disiplin ilmu lain (Hadi, 2007:97). Sehubungan dengan itu, munculnya gerak *berentak* dalam ritual *besale* jika dilihat secara konteks, artinya perlu didekati dengan disiplin ilmu yang terkait dengan fenomena sosial-budaya masyarakatnya, ataupun dengan menggunakan pendekatan yang bersifat multidisiplin, seperti antropologi dan sosiologi. Dalam hal ini, cara pandang analisis yang digunakan adalah bagaimana hadirnya gerak *berentak* dalam pertunjukan ritual *besale*, apakah memiliki hubungan latar belakang dengan fenomena sosial-budaya masyarakat Suku Batin Sembilan terhadap gerak *berentak*, baik dilihat dari aktivitas manusianya hingga proses kreatifnya.

Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan analisis fungsional, analisis fungsional merupakan salah satu metode kajian sosiologi dan antropologi, yang dipandang masih relevan dalam melihat

suatu realitas sosial dan budaya dalam konteks luas. Analisis fungsional akan digunakan untuk mengkaji munculnya gerak *berentak* dalam ritual *besale*, selanjutnya dalam membicarakan analisis fungsional Merton memperkenalkan konsep fungsi nyata (*manifest*) dan fungsi tersembunyi (*latent*). Kedua istilah ini memberikan tambahan penting bagi analisis fungsional. Menurut pengertian sederhana, *fungsi nyata* adalah fungsi yang diharapkan, sedangkan *fungsi yang tersembunyi* adalah fungsi yang tidak diharapkan (Ritzer, 2014: 136). Sehubungan dengan itu, maka analisis fungsional akan digunakan untuk membatasi diri dengan menganalisis gerak yang muncul dalam ritual *besale*, dan berdasarkan pandangan tersebut maka konsep fungsional juga akan digunakan untuk memandang masyarakat Suku Batin Sembilan.

Ritual *besale* yang dilakukan masyarakat Suku Batin Sembilan biasanya berlangsung berulang-ulang apalagi jika penyakit selalu datang, dan dalam pelaksanaannya terdiri dari suatu kombinasi yang merangkai beberapa tindakan seperti : *beterkas*, *bersaji*, dan melakukan

persiapan sebelum ritual dilaksanakan. Teori Merton yang membahas konsep fungsi nyata (*manifest*) adalah fungsi yang diharapkan (Ritzer, 2014: 136), dalam hal ini mengungkapkan ritual *besale* secara universal berfungsi sebagai penyembuhan orang sakit untuk tolak-balak dengan menghindari wabah penyakit. Masyarakat Suku Batin Sembilan mempercayai dan terus mempertahankan ritual *besale*, dengan begitu ritual *besale* telah menjadi perwujudan dan sistem nilai budaya yang berharga dan penting bagi masyarakatnya, yang dapat berfungsi sebagai suatu pedoman orientasi pada kehidupan masyarakatnya. Masyarakat Suku Batin Sembilan dapat dikategorikan sebuah komunitas yang memiliki kehidupan yang khas, dengan suatu identitas dan solidaritas yang telah terbentuk dari dalam dan berkembang dalam waktu yang cukup lama. Ritual *besale* yang telah mengakar dalam jiwa masyarakat Suku Batin Sembilan dan telah menjadi budaya mereka, semua itu tercermin dari hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan dan manusia dengan alam.

Berkaitan dengan persoalan di atas, penciptaan sebuah gerakan *berentak* tercermin dari aktivitas masyarakat Suku Batin Sembilan yang hidup di kawasan hutan, ternyata menjadi faktor yang dapat mempengaruhi munculnya gerak tersebut. Kondisi lingkungan geografis dan cara hidup masyarakat Suku Batin Sembilan telah melatarbelakangi gerak *berentak* muncul pada ritual *besale*, jenis-jenis gerakannya selalu bertumpu pada kaki, dan dalam ritual *besale* sejak dahulu gerak yang diciptakan tidak memiliki sifat estetis, gerakan yang diciptakan hanya untuk kepentingan upacara ritual saja. Hasan mengatakan:

"gerak dibikin daripado caro kami ni, gerak dibikin supaya manggil roh-roh halus ni biak masok ke badan Malin Pengasu, kagek kalo dak sadar makonya geraknyo makin cepat, (gerak dibuat dari cara kami, gerak dibuat supaya memanggil roh-roh halus bisa masuk ke badan Malin Pengasu, nanti kalau tidak

sadar makanya geraknya semakin cepat) (Wawancara, 25 September 2017 di Desa Bungku Simpang Macan).

Dengan demikian gerak *berentak* yang diciptakan dalam ritual *besale*, hanya sebagai medium untuk mengundang roh-roh baik yang dianggap mampu mengobati sisakit. Kemudian, gerak *berentak* yang ditarikan oleh *Malin Pengasu* merupakan salah satu alat atau media ungkap yang mampu mentransformasikan segala yang dimaksud *Malin Pengasu*, terhadap permohonannya agar tercapai. Permohonan serta penyembahan seperti *besale*, dilakukan dengan beberapa aturan sesuai hukum adat-istiadat yang telah disepakati oleh masyarakat Suku Batin Sembilan.

D. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menjelaskan dua pendekatan yang saling terkait, yaitu pertama memandang gerak *berentak* dalam ritual *besale* secara tekstual berdasarkan konsep koreografi, yang lebih melihat pada persoalan bentuk gerakannya, teknik gerakannya dan gaya gerakannya. Secara fisik (teks) dapat dianalisis bahwa bentuk gerak *berentak* tidak akan hadir tanpa adanya teknik, begitupun gaya atau ciri khas tidak akan muncul tanpa adanya teknik dan bentuk. Selanjutnya kedua yaitu memandang secara konteks, bagaimana munculnya gerak *berentak* dan fungsi ritual *besale* melalui penjelajahan secara konteks, dalam hal ini dipandang atau konteksnya dengan disiplin ilmu sosial-budaya dan analisis fungsional. Bahwa proses penciptaan gerak *berentak* dipengaruhi oleh kondisi geografis dan kehidupan sosial-budaya masyarakat pendukungnya. Kemudian pendekatan analisis fungsional yang dilakukan, sesungguhnya bukan untuk mengukur fungsi ritual *besale* dimasyarakat, tetapi lebih digunakan untuk mempertajam analisis terhadap objek, yang ternyata ritual *besale* telah menjadi satu kebutuhan bagi masyarakat Suku Batin Sembilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeng, Muchtar Ghazali (2011). *Antropologi Agama*. Bandung : Alfabeta,
- Hermien Kusmayati, A.M (2000). *Arak-arakan Seni Pertunjukan dalam Upacara Tradisional di Madura*. Yogyakarta: Tarawang Press.,
- Hidayat, Robby. (2013). *Kreativitas Koreografer*. Malang, Jawa Timur : Surya Pena Gemilang Anggota IKAPI.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung.PT. Remaja Rosdakarya.
- Sumandiyo Hadi. (2003). *Aspek-aspek Dasar Koreografi Kelompok*, Yogyakarta : EL KAPHI
- Sumandiyo Hadi. (2007). *Kajian Tari Teks dan Konteks*. Yogyakarta : Pustaka Book Publisher.
- Ritzer, G. (2014). *Teori Sosiologi Modern*. (terjemahan: Triwibowo B.S.). Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Widyastutieningrum, Sri Rochana dan Dwi Wahyudiarto. (2014). *Pengantar Koreografi*. Surakarta : ISI Press Surakarta.

**PEMETAAN JARINGAN SOSIAL DALAM ORGANISASI:
Studi Pada Distributor Tupperware Unit Simabur Indah
di Batusangkar, Sumatera Barat**

Siska Elasta Putri¹*, Damsar², Bob Alfiandi³

Submitted Article: 30 August 2018

Reviewed Article: 05 September 2018

Accepted Article: 18 December 2018

Abstract

The Tupperware company is a multinational company that aims at a profit, which means to pursue high sales with the aim of maximizing profit for the benefit of that company. With high profit, the company will become prosperity. However, the Tupperware distributor unit of Simabur Indah has a problem namely sales fluctuations or sales rate instability in 2016-2017. This problem is determined by two factors, they are an external and internal factor. This study focuses on the internal factor. It's about the current information on marketing social network of Simabur Indah unit. The question that arises is how the mapping of marketing social network on Tupperware distributor in Simabur Indah unit and who has a high centrality role in the network. The purpose of this study is to produce the mapping of marketing social network on Tupperware distributor unit of Simabur Indah. Also, to know the existence of the actor who has a high centrality grades on that network. The analysis used is social network analysis which includes three things all at once, they are a theory, as a method, and as a data analysis technique. The approach used is the quantitative approach with the descriptive type of research. The finding of this study are first, about the mapping of social network structural marketing on Tupperware distributor in Simabur Indah unit that is seen on page 5. Second, it gained five actors with the high centrality on degree centrality, they are MM, AZ, SEP, HNA, and ALZ and five actors with high values in betweenness centrality, they are MM, AZ, ALZ, SEP, and HDR.

Keywords: Information Flow, Network Mapping, Social Networking, Marketing Structure, Betweenness Centrality

A. PENDAHULUAN

Manusia tidak mungkin untuk bisa bertahan hidup tanpa berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia lain. Manusia juga tidak mungkin untuk tidak menjalin relasi dengan orang lain. Hal tersebut menjadikan manusia atau individu tidak terlepas dari suatu kelompok. Dimulai

dari kelompok kecil seperti keluarga yang merupakan tempat terjadinya sosialisasi pertama, kelompok pertemanan, bagian dari sebuah organisasi, institusi maupun sebuah negara.

Individu sebagai anggota dari organisasi, secara sadar maupun tanpa disadari memiliki kemampuan untuk mempengaruhi individu lainnya (Pasaribu, 2015). Seorang individu dapat mempengaruhi teman yang ada di dalam organisasi, dan teman tersebut akan mempengaruhi temannya yang lain baik

¹ Graduate Student of Sociology, FISIP, Universitas Andalas, Padang

² Department of Sociology, FISIP, Universitas Andalas

³ Department of Sociology, FISIP, Universitas Andalas

* Corresponding Author: siskaelastaputri@gmail.com

dalam organisasi yang sama maupun dalam organisasi yang berbeda. Tidak hanya itu, orang lain yang ada di dalam organisasi juga dapat dipengaruhi oleh orang yang berada di luar organisasi.

Individu memiliki keterbatasan dalam berhubungan dengan individu lain. Keterbatasan tersebut membuat individu belajar dari pengalamannya untuk memilih dan mengembangkan hubungan-hubungan sosial yang tersedia di dalam masyarakat. Hubungan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada pada individu yang bersangkutan (Setiawati, 2017). Hubungan-hubungan inilah yang menggambarkan bagaimana seorang individu terlibat di dalam sebuah jaringan sosial. Posisi seseorang di dalam jaringan tidak hanya ditentukan berdasarkan seberapa banyak dia terhubung, namun juga sebagai jembatan penghubung bagi orang-orang yang lain. Setiap individu hidup di dalam suatu jaringan, baik jaringan kecil yang anggotanya saling kenal, dekat dan berinteraksi satu sama lain, maupun dalam jaringan yang lebih luas yang anggotanya tidak banyak yang saling mengenali.

Organisasi merupakan wadah atau tempat terjadinya berbagai hubungan-hubungan sosial. Organisasi dibangun oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan tertentu. Menurut Aprilianti (2016) secara sederhana, organisasi diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran organisasi, memiliki banyak komponen yang melandasi, di antaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing. Agar tujuan dari organisasi dapat tercapai, hendaknya jaringan sosial yang terjalin di antara sesama anggota mampu untuk berinteraksi dengan baik dan langgeng. Interaksi berfungsi dalam memberikan suplai informasi yang beragam kepada seluruh anggota organisasi. Melalui interaksi tersebut semua anggota organisasi dapat mengakses informasi dan bekerja sama

dalam mewujudkan visi dan misi yang dimiliki oleh organisasi. Tidak hanya visi dan misi dari organisasi yang akan terwujud, interaksi juga akan memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah yang sedang dihadapi oleh organisasi. Jika interaksi berjalan dengan baik, maka jaringan sosial akan terus terbangun dan bisa dipertahankan. Hal ini memberikan keuntungan kepada semua anggota yang ada di dalam jaringan. Itulah pentingnya mempelajari jaringan sosial di dalam sebuah organisasi.

Tulisan ini membicarakan jaringan sosial di dalam sebuah organisasi yang dilihat dengan menggunakan perspektif budaya. Berbicara mengenai budaya berarti membahas mengenai karakteristik, nilai-nilai, perilaku dan kesepakatan yang ada di dalam organisasi (Dalimunthe, 2015). Setiap organisasi memiliki budayanya masing-masing, termasuk budaya yang tercipta pada Distributor Tupperware Unit Simabur Indah yang menjadi lokasi pada penelitian ini. Budaya adalah sebuah simbol. Simbol ini direpresentasikan dengan tindakan-tindakan, kebiasaan-kebiasaan, cerita-cerita dan artefak-artefak yang menunjukkan karakteristik dari sebuah budaya. Ini berarti bahwa mempelajari budaya dalam sebuah organisasi, artinya mempelajari lingkungan simbolik dengan menggunakan simbol-simbol tersebut. Melalui simbol-simbol yang ditampilkan tersebut, dapat dipahami pola keunikan dari interaksi yang dibangun pada sebuah organisasi yang mana pola tersebut memperesentasikan budaya yang dimiliki. Dengan demikian, mempelajari budaya organisasi, berkaitan dengan proses interpretasi makna dari sebuah konstruksi simbolik.

Jaringan sosial telah dimanfaatkan dalam berbagai hal. Pada awalnya jaringan sosial dimanfaatkan dalam proses difusi inovasi. Pada saat ini, penggunaan analisis jaringan sudah beragam, mulai dari komunikasi organisasi, politik, teknologi, agama, pemasaran dan sebagainya. Berikut disajikan beberapa hasil penelitian yang menggunakan analisis jaringan sosial.

Penelitian analisis jaringan sosial dalam penyebaran agama, telah dilakukan oleh Rida Helfrida Pasaribu tahun 2015 pada Gereja Methodis Indonesia di Jambi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kedekatan antar aktor di dalam jaringan tidak berlangsung dengan baik. Ada banyak aktor yang tidak terhubung atau bahkan tidak mengenal di dalam jaringan tersebut. Hasil penelitian juga memperlihatkan pola jaringan yang menyebar dimana terdapat aktor yang melakukan interaksi ataupun kedekatan dengan anggota jemaat di tempat lain.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Muslim Tadjuddah dkk tahun 2012, mengenai jaringan sosial dalam perdagangan. Dengan Judul Pemetaan Jaringan Perdagangan Ikan Kerapu di Perairan Taman Nasional Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam jaringan perdagangan ikan kerapu di Taman Nasional Wakatobi adalah nelayan, koordinatior (pongawa laut), pengumpul besar (pongawa darat) dan eksportir. Selain itu juga ditemukan bahwa keuntungan terbesar perdagangan ikan kerapu dinikmati oleh eksportir, kemudian oleh pedagang besar (pongawa darat), koordinator (pongawa laut) dan selanjutnya nelayan.

Kajian-kajian pemasaran juga memanfaatkan jaringan sosial sebagai strategi dalam memasarkan produk atau jasa. Jaringan sosial yang terbentuk akan memberikan kemudahan dalam penyebaran berbagai informasi kepada semua anggota yang ada di dalam jaringan sosial. Kelancaran arus komunikasi di dalam jaringan akan memberikan kemudahan dalam proses pendistribusian produk sehingga dapat meningkatkan angka penjualan pada perusahaan. Salah satu perusahaan yang memanfaatkan jaringan sosial sebagai strategi dalam mendistribusikan produknya adalah Perusahaan Tupperware. Tupperware merupakan salah satu perusahaan multinasional yang memproduksi dan memasarkan produk-produk plastik berkualitas untuk keperluan

rumah tangga (<http://mx.tupperware.co.id>). Dengan sistem penjualan langsung (*direct selling*) Tupperware berkembang dan berada lebih dari 100 negara. Tupperware selalu melahirkan produk baru berkualitas yang inovatif, berdesain unik dengan warna-warni yang khas, trendi dan menarik. Bahan yang digunakan berkualitas baik, aman bagi kesehatan serta ramah lingkungan (Mangore, 2015).

Perusahaan Tupperware terus berkembang ke berbagai provinsi, salah satunya adalah Sumatera Barat. Salah satu *sales force* Tupperware yang ada di wilayah Batusangkar adalah Group Manager (GM) Unit Simabur Indah, yang merupakan unit dari Distributor PT Bumi Padang Gempita. Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Simabur Indah, didapatkan informasi mengenai total penjualan grup unit tersebut dalam dua tahun terakhir. Dari data tersebut terlihat bahwa penjualan Unit Simabur Indah mengalami fluktuasi atau penjualan yang tidak konsisten dalam setiap triwulannya, dimulai dari Januari 2016 sampai bulan September 2017. Pada periode Januari-Maret 2016 penjualan mencapai Rp. 1.058.252.500,- kemudian periode April-Juni 2016 mengalami penurunan menjadi Rp. 878.188.000,- Periode Juli-September 2016 penjualan naik menjadi Rp. 990.093.000,- Periode Oktober-Desember 2016 sales kembali turun menjadi Rp. 873.498.000,- dan turun lagi di awal tahun yaitu periode Januari-Maret 2017 menjadi Rp. 577.943.500,- kemudian turun lagi menjadi Rp. 535.626.764,- di periode April-Juni 2017. Periode Juli-September 2017 penjualan mengalami peningkatan menjadi Rp. 752.960.250,-

Terjadinya fluktuasi penjualan pada Unit Simabur Indah tidak terlepas dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang timbul karena pengaruh rangsangan dari dalam sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang timbul karena pengaruh rangsangan dari luar (Nitisemito, 1994: 196). Kajian ini difokuskan kepada faktor internal yang menyebabkan terjadinya fluktuasi penjualan pada Unit

Simabur Indah. Faktor internal yang dimaksud adalah mengenai aliran informasi dalam jaringan sosial struktur pemasaran pada Unit Simabur Indah.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan jaringan sosial struktur pemasaran pada Distributor Tupperware Unit Simabur Indah dan siapa saja aktor-aktor yang memiliki nilai sentralitas tertinggi di dalam jaringan, yang mencakup *degree centrality* dan *betweenness centrality*. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan secara teoritis (akademis) yaitu dapat menambah wawasan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam diskusi tema analisis jaringan sosial. Sedangkan secara praktis hasil kajian ini diharapkan menjadi masukan dan solusi bagi perusahaan khususnya Distributor Tupperware Unit Simabur Indah dalam rangka meningkatkan penjualan dari tahun ke tahun.

B. METODE PENELITIAN

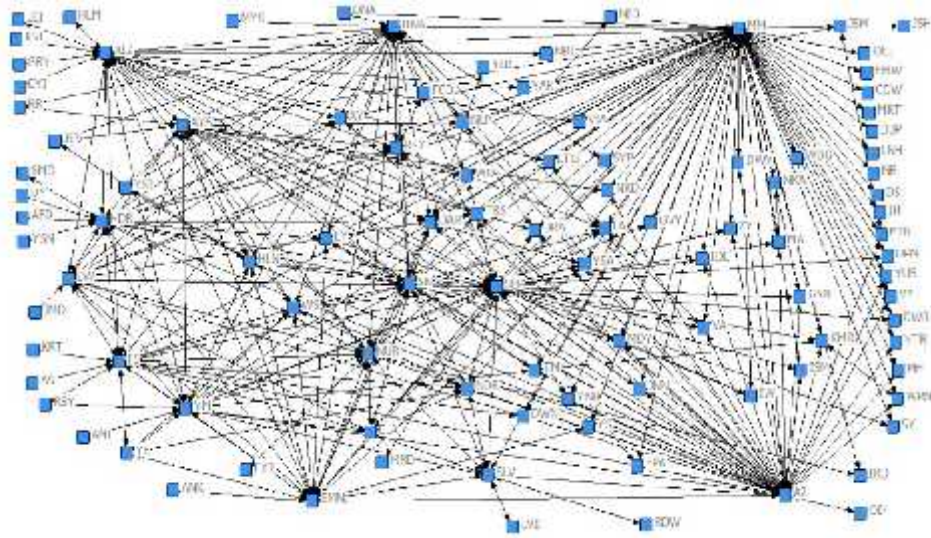
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh *sales force* Unit Simabur Indah yang terdiri dari 103 orang. Sampel yang digunakan adalah sampel kelompok kecil. Penelitian ini mengikuti argumentasi Eriyanto (2014), bahwa untuk membedah permasalahan aliran informasi dalam organisasi dapat berbasis teori, metode dan analisis jaringan sosial. Teori, metode dan analisis ini akan menguraikan jaringan sosial dari aliran informasi, mencakup aktor atau

pelaku dan relasi antar aktor yaitu melihat bagaimana aktor-aktor berinteraksi satu sama lain. Dengan menggunakan pendekatan ini, tidak hanya diperoleh peta jaringan sosial antar *sales force* saja, namun juga akan didapatkan siapa saja aktor yang memiliki peran penting di dalam jaringan tersebut. Sosiogram yang dihasilkan dari analisis ini menampilkan aktor-aktor mana yang memiliki nilai sentralitas tinggi di dalam jaringan. Alasan pemilihan analisis ini adalah karena analisis jaringan sosial akan menyajikan data relasional yang tidak bisa didapatkan jika menggunakan jenis penelitian kuantitatif survey lainnya (Cindoswari, 2016). Dengan adanya peta jaringan (sosiogram) serta keberadaan aktor yang memiliki nilai sentralitas tinggi telah diketahui, diharapkan analisis yang dilakukan dapat menjadi solusi bagi perusahaan untuk meningkatkan atau menaikkan angka penjualan. Sehingga dengan naiknya penjualan dari unit, tentu akan meningkatkan pendapatan dan penghasilan dari *sales force* Unit Simabur Indah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemetaan Jaringan Sosial Struktur Pemasaran Distributor Tupperware Unit Simabur Indah

Dari data dan analisis yang telah dilakukan, diperoleh sosiogram mengenai jaringan sosial *sales force* Distributor Tupperware Unit Simabur Indah.



Sumber: Data Primer 2017 (diolah)

Gambar 1
Sosiogram Jaringan Sosial Struktur Pemasaran Distributor Tupperware Unit Simabur Indah

Sosiogram di atas menggambarkan hubungan atau *link* antara satu *sales force* dengan *sales force* lain di dalam jaringan sosial struktur pemasaran pada Distributor Tupperware Unit Simabur Indah. Hubungan antar aktor dalam jaringan sosial tersebut mencakup keseluruhan *sales force*, baik yang memiliki jenjang karir pada tingkatan group manager, manager, team captain serta consultant. Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Simabur Indah, terdapat 103 *sales force* aktif yang terdaftar pada periode keanggotaan Oktober-Desember 2017. *Sales force* tersebut terdiri dari 1 orang group manager, 7 orang manager serta 95 orang consultant. *Link* atau ties dari 103 *sales force* inilah yang kemudian divisualisasikan ke dalam sosiogram di atas. Visualisasi sosiogram tersebut menunjukkan pola interaksi, yaitu hubungan antara satu *sales force* dengan *sales force* yang lain. Lambang kotak berwarna biru menunjukkan aktor yang ada di dalam jaringan tersebut, aktornya adalah *sales force* Unit Simabur Indah. Sedangkan garis atau tanda panah menggambarkan *link* atau hubungan yang terjadi antar aktor. Jika antara dua kotak berwarna biru dihubungkan oleh sebuah garis atau tanda panah, ini berarti bahwa

kedua aktor tersebut saling mengenal dan berinteraksi di dalam jaringan. Akan tetapi jika tidak ada garis yang menghubungkan aktor tersebut, maka tidak terjadi interaksi antar keduanya.

Informasi yang dapat diperoleh dari sosiogram di atas adalah banyaknya aktor yang hanya memiliki satu *link* atau relasi. Di dalam studi jaringan, aktor ini disebut dengan pemencil (*isolate*). Aktor yang hanya memiliki satu *link* di dalam jaringan dapat menyebabkan terputusnya informasi. Hal ini disebabkan karena informasi yang diperoleh semata-mata hanya berasal dari satu aktor. Ketika aktor tersebut memiliki kendala dalam hal penyampaian informasi, maka informasi akan terputus dan tidak sampai kepada aktor lain. Seandainya hal ini terjadi pada keseluruhan aktor, maka akan banyak aktor di dalam jaringan yang tidak memperoleh informasi. Di dalam Unit Simabur Indah, arus informasi yang lancar sangat dibutuhkan dalam rangka pendistribusian produk. Ketika satu *sales force* mendapatkan informasi, maka ia akan menyampaikan kembali informasi yang ia peroleh kepada *sales force* yang lain. Oleh karena itu, salah satu solusi dalam menyelesaikan permasalahan dalam Unit

Simabur Indah adalah dengan melakukan meeting kepada semua *sales force*, agar mereka dapat saling mengenal, saling bertukar pengalaman dan ide, saling berbagi kontak sehingga masalah terputusnya aliran informasi dapat diantisipasi.

Berdasarkan sosiogram tersebut, juga didapatkan bahwa peta jaringan interaksi Unit Simabur Indah, berbeda dengan peta struktur normatif yang telah ditetapkan oleh perusahaan Tupperware. Adapun berdasarkan peta struktur normatif perusahaan, informasi mengalir terstruktur dari jenjang karir atas ke jenjang karir bawah yaitu dari GM ke manager, manager ke team captain, team captain ke consultant. Sedangkan dari analisis jaringan sosial yang telah dilakukan, didapati aliran informasi yang berbeda yaitu terdapat aktor yang melangkahi satu struktur tertentu dalam berinteraksi. Ada consultant yang langsung berinteraksi dengan GM. Ada juga consultant yang berinteraksi dengan manager yang bukan berada pada unit yang sama. Ini artinya bahwa alur informasi yang terjadi pada Unit Simabur Indah berbeda dengan alur informasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya fluktuasi penjualan atau ketidakstabilan angka penjualan yang disebabkan karena informasi tidak tersebar kepada seluruh anggota jaringan sehingga

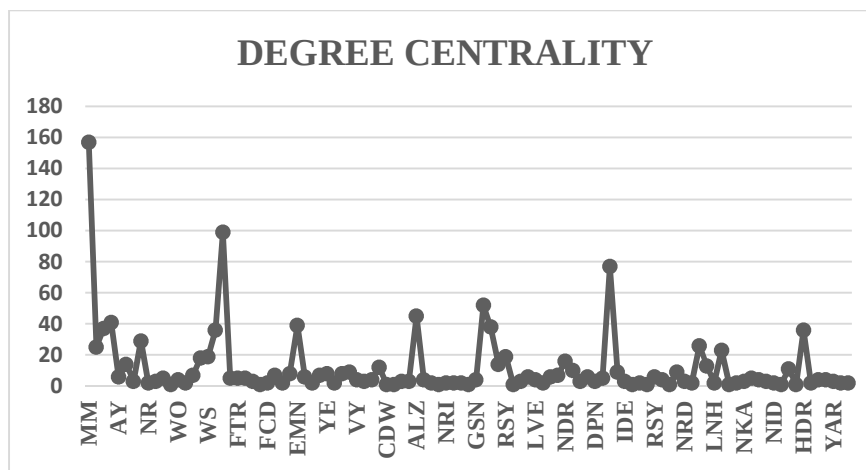
mengakibatkan produk-produk tidak dapat didistribusikan kepada seluruh *sales force*.

2. Keberadaan Aktor yang Memiliki Nilai Sentralitas Tinggi

Dalam kajian jaringan, ada ukuran yang dipakai dalam menganalisis suatu jaringan, ukuran tersebut adalah *centrality*. Sentralitas menunjuk kepada bagaimana posisi aktor dalam keseluruhan jaringan (Eriyanto, 2014: 168). Sentralitas dibagi ke dalam dua ukuran yaitu *degree centrality* dan *betweenness centrality*. Pada bagian ini penulis akan memaparkan analisis posisi aktor di dalam jaringan sosial struktur pemasaran pada Distributor Tupperware Unit Simabur Indah dengan menggunakan dua ukuran tersebut.

a. Degree Centrality

Degree centrality memperlihatkan posisi seorang aktor di dalam jaringan sosial. *Degree centrality* memperlihatkan jumlah *link* dari dan ke aktor atau node. Jadi *degree centrality* menampilkan seberapa banyak *link* yang dimiliki oleh masing-masing aktor di dalam jaringan. Berikut ini adalah analisis *degree centrality* dalam bentuk diagram yaitu,



Sumber: data primer 2017 (diolah)

Gambar 2
Diagram *Degree Centrality* dalam Jaringan Sosial
Struktur Pemasaran Distributor Tupperware Unit Simabur Indah

Dari diagram di atas dapat diperoleh informasi bahwa aktor yang memiliki derajat *degree centrality* tertinggi dimiliki oleh MM. Aktor ini memiliki interaksi paling banyak dengan *sales force* di dalam Unit Simabur Indah. Pernyataan ini dibuktikan dengan perolehan nilai *degree* 157. Ini artinya bahwa aktor tersebut menghubungi dan dihubungi oleh *sales force* dalam jaringan Unit Simabur Indah sebanyak 157 kali dalam seminggu. MM merupakan seorang group manager (GM) di Unit Simabur Indah. Sebagai seorang GM, MM dikenali oleh *sales force* di dalam jaringan Unit Simabur Indah. Hal ini disebabkan karena MM merupakan aktor yang menyebarkan berbagai informasi yang diperoleh dari distributor ataupun dari staf yang mewakilinya. Informasi yang disampaikan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Tupperware, baik itu informasi seputar produk maupun informasi sehubungan dengan bonus atau penghasilan yang akan diperoleh oleh *sales force* jika bisa mencapai penjualan dengan jumlah tertentu. Oleh karena itu, MM dapat memanfaatkan *link* yang ia miliki untuk menggapai semua anggota jaringan agar informasi dapat disebarkan secara cepat. Tujuan adalah agar jangan sampai ada *sales force* yang luput dari penyampaian informasi. Jika hal itu terjadi maka *sales force* akan mengalami kerugian.

Degree centrality kedua dimiliki oleh AZ. AZ merupakan aktor yang memiliki *link* kedua terbanyak setelah MM yaitu dengan perolehan nilai *degree* 99. Ini berarti bahwa AZ menghubungi dan dihubungi oleh *sales force* di Unit Simabur Indah sebanyak 99 kali dalam seminggu. AZ merupakan salah seorang manager di Unit Simabur Indah memiliki team captain dan consultant yang harus dihubungi untuk menyampaikan informasi terkait dengan produk-produk Tupperware. Tidak hanya menghubungi, team captain dan consultant juga menghubungi AZ untuk bertanya terkait dengan produk Tupperware dan bonus yang diperoleh. AZ sering membantu consultant untuk melakukan party atau recruit cooking demo (RCD) di sekolah-sekolah ataupun di

rumah warga. Bantuan yang diberikan oleh AZ adalah dalam rangka menunjang penghasilan consultant yang bersangkutan.

Degree centrality ketiga dimiliki oleh SEP. SEP memiliki nilai *degree* 77, yang berarti bahwa SEP menghubungi atau dihubungi oleh *sales force* Unit Simabur Indah sebanyak 77 kali dalam satu minggu. Intensitas kehadiran SEP di kantor Tupperware membuat ia banyak dikenali oleh *sales force* lain. Seringkali *sales force* bertanya kepada SEP perihal produk-produk baru, produk-produk diskon, maupun bonus yang diperoleh *sales force* jika mencapai target. Posisi SEP sebagai seorang manager tentu juga mengharuskannya untuk berbagi berbagai informasi terkait dengan bonus dan produk Tupperware kepada *sales force*.

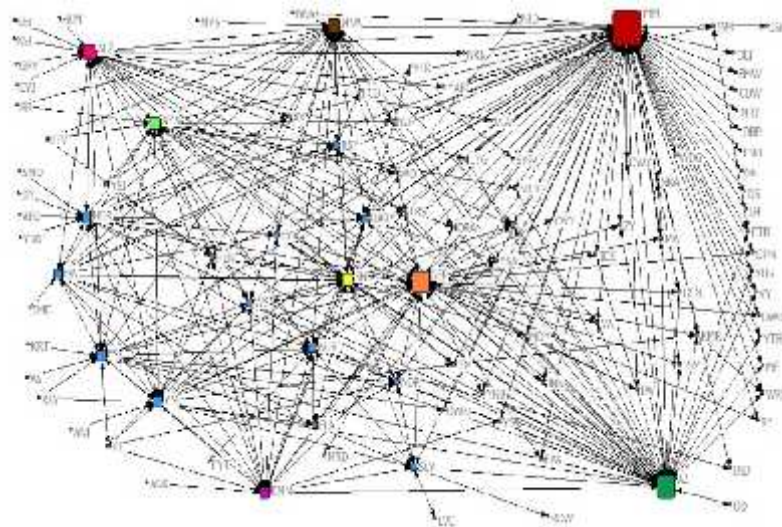
Selanjutnya aktor yang memiliki nilai *degree centrality* tinggi keempat yaitu HNA dengan nilai *degree* 52. Nilai *degree* 52 artinya bahwa aktor ini menghubungi dan dihubungi oleh *sales force* Unit Simabur Indah sebanyak 52 kali dalam satu minggu. HNA merupakan seorang manager yang memiliki team captain dan consultant di bawahnya. Berbagai informasi yang ia peroleh dari GM harus disampaikan kepada team captain dan consultant tersebut agar mereka tidak luput dari informasi-informasi terbaru. HNA merupakan seorang manager yang memasarkan produk Tupperware di wilayah Lintau Buo. Di wilayah ini, HNA harus dengan giat mencari consultant baru agar produk-produk Tupperware bisa dinikmati oleh masyarakat. Bagi consultant dan team captain yang ada di wilayah ini bisa melakukan pemesanan produk kepada HNA.

Selanjutnya aktor dengan nilai *degree centrality* 45, yaitu ALZ. ALZ juga merupakan seorang manager di Unit Simabur Indah. ALZ dihubungi dan menghubungi oleh *sales force* di dalam jaringannya sebanyak 45 kali dalam satu minggu. ALZ merupakan seorang manager, memiliki consultant dan team captain yang harus diberikan informasi-informasi yang diperoleh dari GM. Jika semua consultant yang ia miliki memperoleh informasi dan

bisa memasarkan produk untuk mencapai bonus, maka angka penjualan dan penghasilan yang didapatkan oleh aktor ini akan naik. Ini semua bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan bonus serta penghasilan tambahan.

Berdasarkan tabel tersebut juga terlihat aktor yang memiliki nilai *degree centrality* paling rendah. Ada 13 aktor dengan nilai sentralitas paling rendah, yaitu dengan nilai

centrality 1. Aktor tersebut adalah IH, DBP, CDW, KRT, HLM, KSI, ANI, MRD, JSH, EMW, OEI, WDG serta YLR. Hal ini berarti bahwa ke tiga belas aktor tersebut hanya berinteraksi satu kali dengan *sales force* lain di Unit Simabur Indah. Ketiga belas aktor ini merupakan *sales force* dengan jenjang karir consultant. Jika divisualisasikan ke dalam sosiogram, maka dihasilkan *degree centrality* sebagai berikut,



Sumber: data primer 2017 (diolah)

Gambar 3
Sosiogram *Degree Centrality* Jaringan Sosial Struktur Pemasaran Distributor Tupperware Unit Simabur Indah

Keterangan gambar:

	Lambang aktor atau <i>sales force</i> , warna pada kotak berfungsi sebagai pembeda aktor. Semakin tinggi nilai <i>degree centrality</i> , maka kotak juga akan semakin membesar.
	Menggambarkan <i>link</i> /hubungan antar aktor

Visualisasi sosiogram di atas memperlihatkan derajat sentralitas aktor dengan ukuran *degree centrality*. Dari visualisasi *degree centrality* di atas dapat dilihat bahwa MM memiliki nilai *degree centrality* paling tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya *link* atau anak panah yang mengarah kepada aktor

tersebut. Terlihat di dalam sosiogram MM dilambangkan dengan kotak paling besar berwarna merah. Aktor kedua yang memiliki nilai *degree centrality* tinggi yaitu AZ. Terlihat dalam sosiogram bahwa lambang aktor atau kotak AZ lebih kecil dibandingkan dengan MM. Lambang AZ adalah kotak

berwarna hijau. *Link* yang dimiliki oleh AZ tidak sebanyak *link* yang dimiliki oleh MM.

Selanjutnya SEP dilambangkan dengan kotak berwarna oranye. Aktor SEP adalah aktor ketiga dengan nilai *degree centrality* tinggi. Di dalam sosiogram, aktor SEP memiliki lambang yaitu kotak yang lebih kecil dari lambang aktor yang dimiliki oleh AZ. *Link* yang dimiliki oleh SEP juga lebih sedikit jika dibandingkan dengan *link* yang dimiliki AZ.

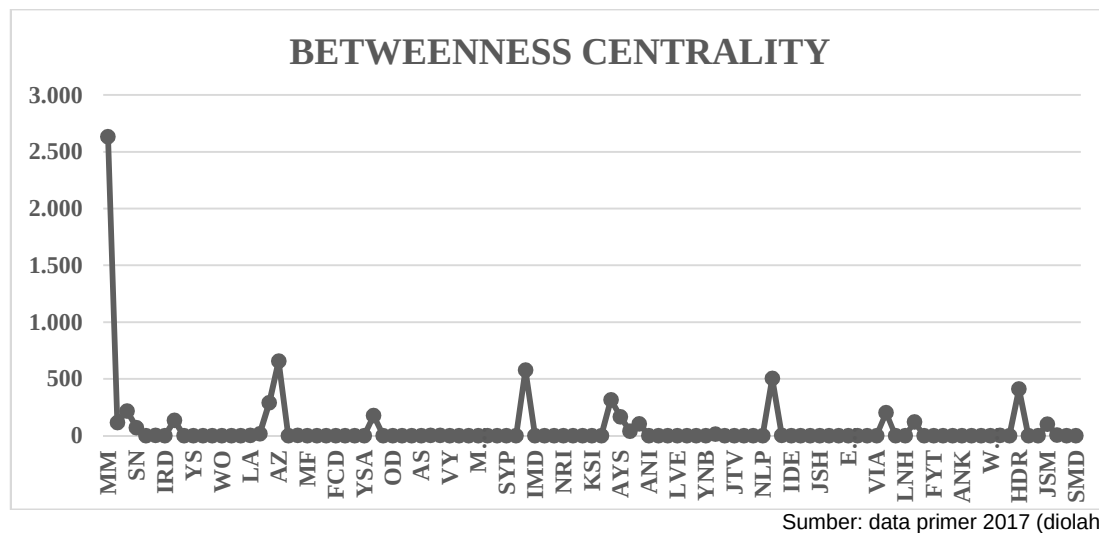
Kemudian kotak berwarna cokelat merupakan lambang dari aktor HNA dan merupakan aktor dengan *degree centrality* tertinggi ke empat. Terlihat bahwa kotak berwarna cokelat yang melambangkan aktor tersebut juga lebih kecil dari aktor sebelumnya. Sosiogram juga menggambarkan bahwa *link* yang dimiliki aktor ini tidak sebanyak yang dimiliki SEP.

Kemudian ALZ merupakan aktor yang memiliki nilai *degree centrality* tertinggi kelima yang dilambangkan dengan kotak berwarna pink atau merah muda. Terlihat bahwa kotak berwarna pink atau merah muda yang melambangkan aktor terlihat lebih kecil jika dibandingkan dengan

lambang aktor sebelumnya. Dari keempat aktor sebelumnya, ALZ memiliki *link* paling sedikit di dalam jaringan. Kotak-kotak lain yang ada di dalam sosiogram merupakan *sales force* Unit Simabur Indah.

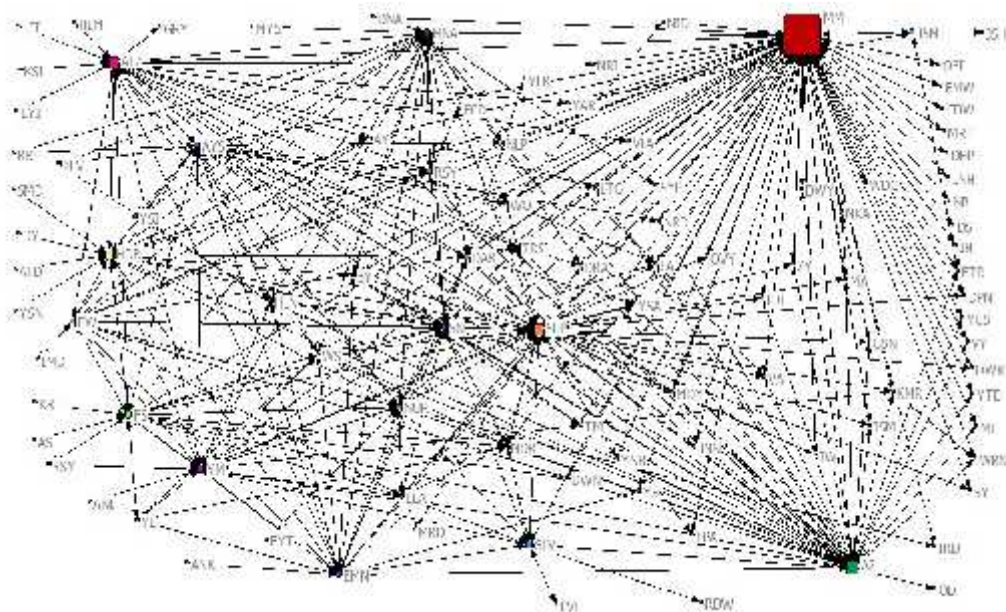
b. Betweenness Centrality

Betweenness centrality memperlihatkan posisi seorang aktor sebagai perantara dari hubungan antar aktor di dalam jaringan (Eriyanto, 2014:180). *Betweenness centrality* melihat bagaimana cara satu aktor untuk berhubungan dengan aktor yang lain. Untuk menghubungi seorang aktor apakah bisa langsung, atau harus melewati aktor tertentu. Data *betweenness* memperlihatkan derajat seorang aktor berperan sebagai perantara dari relasi dan hubungan antar aktor. Semakin tinggi nilai seorang aktor, maka semakin penting posisi seorang aktor, karena menunjukkan aktor tertentu harus melewati aktor tersebut agar bisa berhubungan dengan aktor lain. Untuk pengukuran *betweenness centrality* pada Distributor Tupperware Unit Simabur Indah, dapat dilihat dalam diagram berikut:



Gambar 3
Diagram *Betweenness Centrality* Jaringan Sosial Struktur Pemasaran Distributor Tupperware Unit Simabur Indah

Jika divisualisasikan ke dalam sosiogram, maka dihasilkan *betweenness centrality* sebagai berikut,



Sumber: data primer 2017 (diolah)

Gambar 4
Sosiogram *Betweenness Centrality* Jaringan Sosial Struktur Pemasaran Distributor Tupperware Unit Simabur Indah

Keterangan gambar:

	Lambang aktor atau <i>sales force</i> . Warna pada kotak berfungsi sebagai pembeda aktor. Semakin tinggi nilai <i>betweenness centrality</i> , maka kotak akan semakin besar
	Menggambarkan <i>link</i> /hubungan antar aktor

Visualisasi sosiogram dan diagram di atas memperlihatkan aktor dengan ukuran *betweenness centrality* dalam jaringan Unit Simabur Indah. Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh informasi bahwa nilai *betweenness* tertinggi dimiliki oleh aktor MM dengan nilai sebesar 2631.894. Ini berarti bahwa dalam jaringan sosial struktur pemasaran Distributor Tupperware Unit Simabur Indah, MM merupakan aktor utama yang berperan sebagai perantara dari hubungan antar aktor di dalam jaringan. MM mempunyai kemudahan dalam memfasilitasi interaksi antara satu aktor ke aktor, karena

MM berperan sebagai *bridges* atau jembatan yang menghubungkan antara satu aktor dengan aktor yang lain. Bila tidak ada MM, maka banyak *link* akan terputus atau tidak terhubung di dalam jaringan.

Dalam sosiogram, terlihat bahwa MM dilambangkan dengan kotak paling besar berwarna merah. Memiliki nilai sentralitas keperantaraan tinggi berarti bahwa MM menjadi perantara dari hubungan antar aktor di dalam jaringan. Sebagai misal, HNA harus menghubungi MM untuk dapat berinteraksi dengan OEI. Hal ini disebabkan karena tidak ada jalur (*path*) yang

menghubungkan langsung antara HNA dengan OEI selain melewati MM. Tanpa adanya MM, interaksi antara aktor tersebut tidak akan terjadi. Selain itu sebagai perantara hubungan antar aktor, MM juga bisa menentukan keanggotaan aktor di dalam jaringan. Perhatikan netdaw di atas pada bagian relasi dari MM yang berada di sebelah kanan. Terdapat beberapa aktor yang hanya memiliki *link* dengan MM. Contohnya yaitu OEI, EMW, CDW, MRT dan DBP dan sebagainya. Kesemua aktor ini hanya memiliki satu *link*, yaitu dengan MM. Jika MM tidak ada, maka kelima aktor tersebut tidak akan masuk menjadi anggota jaringan. MM juga dapat mengontrol berbagai informasi kepada semua anggota jaringan. Informasi yang disampaikan harus melalui aktor yang berperan sebagai perantara. Oleh karena itu, jika suatu informasi ingin bisa tersampaikan kepada seluruh aktor yang ada di dalam jaringan, maka sampaikanlah informasi tersebut kepada aktor-aktor yang memiliki posisi sebagai perantara di dalam suatu jaringan.

Aktor kedua yang memiliki nilai *betweenness* tinggi adalah AZ, dengan nilai 655.270. Selain MM, AZ juga memiliki peran penting sebagai perantara hubungan antar aktor di dalam jaringan Unit Simabur Indah. Tanpa kehadiran dari AZ, hubungan tertentu tidak akan terjadi atau terputus di dalam jaringan. Posisi AZ sebagai perantara hubungan di dalam jaringan memberi kemudahan dalam memfasilitasi interaksi antara satu aktor ke aktor lain. Dari sosiogram di atas, dapat dilihat bahwa AZ dilambangkan dengan kotak berwarna hijau. Lambang kotak tersebut merupakan lambang kotak yang lebih kecil dari lambang kotak yang dimiliki oleh MM dan merupakan lambang aktor yang paling besar jika dibandingkan dengan lambang aktor yang lain.

Memiliki nilai sentralitas keperantaraan tertinggi setelah GM berarti AZ memegang peranan penting dalam menjadi perantara hubungan antar aktor di dalam jaringan. Sebagai contoh EMN ingin berkomunikasi dengan OD. OD adalah aktor yang hanya memiliki satu *link* atau relasi saja yaitu

dengan AZ. Agar EMN bisa berinteraksi dengan OD, maka EMN harus menghubungi AZ terlebih dahulu, karena tidak ada jalur (*path*) yang bisa menghubungkan langsung antara EMN dengan OD, kecuali melalui AZ. Jadi AZ berfungsi sebagai perantara atau jembatan (*bridges*) dari hubungan antar aktor. Begitu juga dengan status aktor OD sebagai anggota dari jaringan, kehadiran OD dikontrol oleh keberadaan aktor AZ. Tanpa kehadiran AZ, maka OD tidak akan masuk ke dalam jaringan Unit Simabur Indah.

Aktor selanjutnya yang memiliki nilai *betweenness* tinggi adalah ALZ dengan nilai sentralitas keperantaraan 578.236. Ini artinya bahwa ALZ merupakan aktor ketiga yang memiliki nilai tertinggi dalam memperantarai hubungan antar aktor di dalam jaringan Unit Simabur Indah. Posisi keperantaraan tinggi di dalam jaringan berguna untuk menggapai semua anggota di dalam jaringan. Dengan menghubungi aktor tersebut, maka informasi-informasi yang ia peroleh bisa tersampaikan kepada aktor-aktor yang lain.

Dari sosiogram *betweenness centrality*, dapat dilihat bahwa ALZ dilambangkan dengan kotak berwarna pink atau merah muda. Lambang aktor yang dimiliki oleh ALZ lebih kecil jika dibandingkan dengan lambang aktor yang dimiliki oleh AZ. Dari sosiogram di atas dapat dilihat bahwa ALZ memperantarai hubungan berbagai aktor dengan aktor yang lain. Misalnya HLM ingin menghubungi HNA. Untuk dapat menghubungi HNA, maka HLM harus menghubungi ALZ terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena satu-satunya *link* yang bisa menghubungi HNA adalah melalui ALZ. Contoh lainnya adalah MM ingin menyampaikan informasi baru seputar produk berhadiah kepada consultant. Consultant tersebut adalah HLM, LEI, KSI dan EYI. Agar informasi tersebut bisa tersampaikan kepada keempat consultant, maka MM akan menghubungi ALZ. Dengan menghubungi ALZ dan memintanya untuk menyampaikan informasi produk berhadiah, maka keempat consultant tadi akan memperoleh informasi yang ingin

disampaikan oleh MM. Menghubungi ALZ merupakan satu-satunya jalan yang dapat ditempuh karena ini menjadi jembatan penghubung antara GM dengan empat orang consultant.

Aktor keempat yang memiliki nilai sentralitas keperantaraan tinggi adalah aktor SEP. Aktor ini memiliki nilai sentralitas 504.099. Dari hal ini diperoleh informasi bahwa SEP merupakan salah satu aktor di dalam jaringan Unit Simabur Indah yang menjadi perantara hubungan antar aktor. Ini juga berarti bahwa SEP menjadi fasilitator antara satu aktor dengan aktor yang lain di dalam jaringan. Dari sosiogram yang telah ditampilkan sebelumnya, SEP dilambangkan dengan kotak berwarna oranye. Jika diperhatikan di dalam sosiogram, kotak lambang aktor SEP berada pada bagian tengah jaringan. Lambang aktor SEP sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan lambang yang dimiliki oleh aktor ALZ, yang membuktikan bahwa aktor SEP memiliki nilai sentralitas keperantaraan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan aktor ALZ.

Memiliki nilai sentralitas keperantaraan yang tinggi berarti bahwa SEP menjadi perantara hubungan antar aktor. Sebagai contoh, MRD merupakan aktor yang hanya memiliki satu *link* saja di dalam jaringan Unit Simabur Indah. *Link* tersebut adalah dengan SEP. Jika AZ ingin berinteraksi dengan MRD, maka cara yang dapat ditempuh adalah dengan menghubungi SEP terlebih dahulu. Dengan menghubungi SEP, maka AZ dapat berinteraksi dengan MRD. Begitu pula dengan aliran informasi, agar berbagai informasi terkait produk Tupperware dapat diterima oleh MRD, maka informasi tersebut disampaikan terlebih dahulu kepada SEP. SEP juga berperan dalam menentukan keanggotaan MRD. Seandainya SEP tidak ada, maka MRD tidak akan masuk ke dalam jaringan Unit Simabur Indah.

Aktor kelima yang memiliki nilai sentralitas keperantaraan tinggi adalah aktor HDR. Nilai sentralitas keperantaraan aktor ini adalah 410.559. HDR merupakan aktor lain yang menjadi perantara hubungan antar aktor di dalam jaringan Unit Simabur Indah. Memiliki posisi sebagai perantara di dalam

jaringan, maka HDR bisa mengontrol dan memanipulasi informasi yang ia peroleh. Dari sosiogram sentralitas keperantaraan yang telah ditampilkan sebelumnya, HDR dilambangkan dengan kotak berwarna pink atau merah muda. Untuk melihat bahwa aktor ini berfungsi sebagai perantara hubungan antar aktor, dijelaskan dalam contoh berikut ini, MM ingin menyampaikan informasi terbaru terkait produk-produk Tupperware yang sedang promosi dalam bulan ini. Agar informasi tersebut bisa diterima oleh seluruh *sales force*, maka MM bisa menghubungi *sales force* yang menjadi perantara dalam hubungan antar aktor di dalam jaringan. Salah satu *sales force* tersebut adalah HDR. Dengan disampaikannya informasi kepada HDR, informasi tersebut juga akan disampaikan kembali kepada aktor-aktor yang memiliki hubungan dengan HDR, seperti DY, AFD, YSN dan SMD. Begitu pula jika YSN ingin berinteraksi dengan ALZ. YSN harus menghubungi HDR agar bisa dikenalkan dengan ALZ. Tanpa adanya interaksi terlebih dahulu dengan HDR, maka YSN tidak dapat berkomunikasi dengan ALZ, karena tidak ada *link* yang menghubungkan YSN langsung dengan ALZ kecuali melalui perantara HDR.

Dari 103 *sales force* di Unit Simabur Indah, ditemukan 73 aktor yang memiliki nilai *betweenness* 0. Maksudnya adalah aktor-aktor ini tidak berperan sebagai perantara, mereka tidak menjadi perantara hubungan aktor di dalam jaringan. Untuk berkomunikasi dengan aktor-aktor di dalam jaringan, tidak perlu melewati ke 73 aktor ini. Hal ini tentu menjadi bahan masukan kepada GM dan manager, bahwa untuk dapat meningkatkan dan menaikkan angka penjualan, ke 73 *sales force* tersebut bisa diberi akses dan difasilitasi agar dapat saling berhubungan dengan semua anggota jaringan. Aliran informasi akan lancar ketika semua anggota jaringan saling terhubung. Hal demikian akan memberi kemudahan kepada GM dan manager untuk menyampaikan berbagai informasi terbaru yang dapat diakses oleh seluruh *sales force*

sehingga angka penjualan *sales force* dapat meningkat.

3. Implikasi Temuan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh implikasi secara teoritis dan implikasi secara praktis, sebagai berikut:

a. Implikasi Teoritis

Budaya merupakan sebuah simbol. Simbol ini direpresentasikan dengan tindakan-tindakan, kebiasaan-kebiasaan, cerita-cerita dan artefak-artefak yang menunjukkan karakteristik dari sebuah budaya. Artinya, mempelajari budaya dalam sebuah organisasi berarti mempelajari lingkungan simbolik dengan menggunakan simbol-simbol tersebut. Terrence Deal dan Allen Kennedy (1982) dalam bukunya yang berjudul *Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life* memberikan pandangan Strong Cultures sebagai berikut:

1. Nilai (Value)

Nilai merupakan keyakinan dan pandangan yang dianut oleh anggota sebuah organisasi. Setiap organisasi atau perusahaan memiliki nilai-nilai inti sebagai pedoman berpikir dan bertindak bagi semua anggotanya demi mencapai tujuan dari organisasi. Begitu pula dengan Unit Simabur Indah, terdapat nilai-nilai yang dimiliki berupa visi dan misi dari Tupperware. Visinya adalah menjadi perusahaan *direct selling* yang memberikan peluang perubahan hidup terbaik bagi wanita Indonesia dan keluarganya. Sedangkan misi dari Tupperware adalah menghadirkan Tupperware di setiap rumah dan melakukan pemberdayaan perempuan dengan pelatihan serta pengalaman yang mengubah hidup. Dengan visi dan misi tersebut, diharapkan setiap *sales force* dapat berupaya secara maksimal untuk memasarkan produk tupperware kepada anggota masyarakat, sehingga keuntungan dan bonus yang ditawarkan akan tercapai

serta visi dan misi dari perusahaan juga terwujud.

2. Pahlawan (*Heroes*)

Pahlawan (*heroes*) merupakan individual yang hadir untuk memberikan contoh nilai-nilai organisasi. Sebagai contoh, manager dan GM merupakan jenjang karir yang telah sukses dan memiliki banyak consultant di bawahnya. Mereka harus memberikan motivasi dan testimoni kepada consultant-consultant agar semangatnya muncul serta memiliki keinginan untuk memasarkan produk lebih giat lagi. Dengan adanya motivasi tersebut, consultant akan mampu untuk mencapai jenjang karir yang lebih tinggi serta memperoleh penghasilan lebih.

3. Tatacara dan Ritual (*Rites and Rituals*)

Tatacara dan ritual merupakan upacara melalui peringatan-peringatan organisasi atas nilai-nilai yang dimiliki. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan penghargaan kepada anggota yang berprestasi. Di dalam Unit Simabur Indah, setiap bulan diadakan assembly. Assembly merupakan sebuah pertemuan yang diadakan oleh GM serta dihadiri oleh seluruh *sales force*. Di dalam acara tersebut akan diberikan *reward* kepada siapa saja *sales force* yang berprestasi. Terdiri dari, omset atau penjualan tertinggi, yang merekrut terbanyak, pembawa tamu terbanyak, serta bagi yang hadir tepat waktu. Dengan adanya *reward* tersebut, *sales force* akan berlomba-lomba untuk menjadi pemuncak agar *reward* tersebut dapat diterima.

4. Jaringan Budaya (*Cultural Network*)

Jaringan budaya yaitu sistem komunikasi melalui nilai-nilai budaya dimulai dan diperkuat. Jaringan budaya merupakan suatu jaringan komunikasi informal yang merupakan saluran komunikasi primer. Fungsi utamanya yaitu untuk menyalurkan informasi dan memberi interpretasi terhadap informasi. Melalui jaringan komunikasi, kehebatan perusahaan diceritakan dari waktu ke waktu. Dalam setiap pertemuan

yang diadakan, maka GM dan manager akan memberikan testimoni apa saja hal-hal yang telah dicapai oleh perusahaan dari waktu-waktu serta apa saja keuntungan yang telah didapat ketika berada pada jejang karir sebagai manager dan GM. Hal ini akan memberikan motivasi kepada *sales force* supaya dapat meningkatkan angka penjualan.

b. Implikasi Praktis

Hasil kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai solusi dalam meningkatkan angka penjualan atau menstabilkan angka penjualan pada Unit Simabur Indah. Agar perubahan dapat dilakukan, maka organisasi harus melakukan inovasi terus menerus. Inovasi dapat diwujudkan dengan cara menjaga nilai-nilai yang telah ada di dalam perusahaan sehingga jaringan yang telah terbentuk akan menjadi lebih kuat menjadi lebih kuat. Cara memperkuat jaringan ini harus diteruskan kepada seluruh consultant, baik yang lama atau yang baru. Sehingga hal ini akan menjadi kebiasaan dan membudaya pada Unit Simabur Indah.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa didapatkan sosiogram jaringan sosial struktur pemasaran pada Distributor Tupperware Unit Simabur Indah sebagaimana yang tergambar pada halaman 5. Dari sosiogram tersebut diperoleh informasi bahwa peta jaringan interaksi pada Unit Simabur Indah, berbeda dengan peta struktur normatif yang telah ditetapkan oleh perusahaan Tupperware. Adapun berdasarkan peta struktur normatif perusahaan, informasi mengalir dari jenjang karir atas ke jenjang karir bawah yaitu dari GM ke manager, manager ke team captain,

team captain ke consultant. Sedangkan dari analisis jaringan sosial yang telah dilakukan, didapati aliran informasi yang berbeda yaitu terdapat aktor yang melangkahi satu struktur tertentu dalam berinteraksi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya fluktuasi penjualan atau ketidakstabilan angka penjualan yang disebabkan karena informasi tidak tersebar kepada seluruh anggota jaringan sehingga mengakibatkan produk-produk tidak dapat didistribusikan kepada seluruh *sales force*.

Selain itu, sosiogram tersebut juga menampilkan aktor-aktor yang hanya memiliki satu *link* saja di dalam jaringan. Hal ini menjadi sebuah permasalahan karena aktor tersebut hanya berinteraksi dengan satu orang aktor dari 103 aktor. Masalah ini akan mengakibatkan minimnya informasi yang diterima atau bahkan terputus pada aktor tersebut. Seandainya aktor yang menjadi perantara hubungan memiliki kendala dalam menyampaikan informasi, maka informasi tidak akan tersampaikan kepada aktor yang bersangkutan. Terputusnya aliran informasi berdampak terhadap aktor yaitu aktor tidak bisa memperoleh produk yang diinginkan sehingga mengakibatkan angka penjualannya menurun. Jika hal ini terjadi kepada keseluruhan aktor yang hanya memiliki satu *link* di dalam jaringan, maka akan menyebabkan turunnya angka penjualan dari Unit Simabur Indah.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Damsar, MA dan Dr. Bob Alfiandi, M.Si sebagai dosen pembimbing dari Universitas Andalas yang telah memberikan dukungan, masukan, saran dan kritikan yang membangun dalam tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilianti, Wiwin. (2016). *Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Di Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang*. Skripsi Universitas Pasundan Bandung.

- Cindoswari, Ageng Rara. (2016). Analisis Struktur Jaringan Komunikasi Dalam Adaptasi Ekonomi, Sosial Dan Budaya Pada Paguyuban Babul Akhirat Di Kota Batam. *Jurnal Komunikasi* Vol.10, No. 2, Hlm. 129-144
- Dalimunthe, Syairal Fahmy. (2015). "Komunikasi Organisasi Dalam Perpsektif Budaya." *Jurnal Bahas Unimed*. Vol. 26, No. 3.
- Eriyanto. (2014). *Analisis Jaringan Komunikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lawang, Robert M.Z. (2005). *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik*. Universitas Indonesia: FISIP UI PRESS
- Mangore, Indah Indria, Bode Lumanauw, and Maria Tielung. (2015). Analysis of Product Quality, Service Quality and Brand Image To Customer Loyalty At Tupperware Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* Vol.3. No. 2. Hlm. 616-627
- Nitisemito, Alex. (1994). *Mengatasi Turunnya Omzet Penjualan*. Jakarta: Ghlia Indonesia
- Pasaribu, Rida Helfrida. (2015). *Analisis Jejaring Sosial Gereja Methodis Indonesia Studi Kasus di GMI Resort Sei Bahar Kabupaten Muaro Jambi, Jambi*. Skripsi USU.
- Setiawati, Seri. (2017). Jaringan Sosial Organisasi Lesbian, Bisexual dan Transgender: Studi Kasus Organisasi Ardhanary Institute Di Jakarta. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial dan Budaya*. Desember 2016 Vol. 18 (2), hlm 153-171
- Tadjuddah, Muslim dkk. (2012). Analisis Pemetaan Jaringan Perdagangan Ikan Kerapu Hidup Di Taman Nasional Wakatobi, Sulawesi Tenggara. *Buletin PSP*. Vol. 20, No. 2. Hlm 119-130

KONSTRUKSI MAKNA TRADISI PEUSIJUEK DALAM BUDAYA ACEH

Chaerol Riezal^{1*}, Hermanu Joebagio², Susanto³

Submitted Article: 21 June 2018

Reviewed Article: 08 September 2018

Accepted Article: 17 December 2018

Abstract

This paper answers the question of how the construction of the meaning of the Peusijuek tradition is available in Aceh culture. Two important things that will support this thesis is how the mind and culture of Islam and Aceh combined into one formulated in a way. Therefore, how the processes, forms and philosophical meanings of the Peusijuek tradition available in Aceh culture will be discussed in this paper. The results of this study indicate that the Peusijuek tradition is one of the relics of Hindu Culture in Aceh. According to historical records, the implementation of the Peusijuek tradition before the sending of Islam still uses certain mantras and prayers. However, since the arrival and development of Islam in Aceh, the Peusijuek tradition has been changed by incorporating Islamic teachings in it, such as prayer, prayer, and other Islamic teachings. That is why the Peusijuek tradition in Aceh can still be up to now. In practice, the Peusijuek tradition is carried out by religious leaders and elders of Aceh, such as ulama, tengku, ustadz and ustadzah. This is done because the Peusijuek tradition is considered a sacred Acehnese procession. The practice of Peusijuek tradition in Aceh is carried out in religious and cultural activities, such as performing pilgrimage, marriage, circumcision, prayer, arena, buying new vehicles, and so forth. The purpose of this Peusijuek tradition is to appeal for the satisfaction, peace, happiness, and glory of the guests.

Keywords: Construction Meaning, Peusijuek Tradition, Aceh Culture.

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah bangsa yang besar, yang kaya akan budaya. Hilden Gert (dalam Marnelly T.M, 2017: 150) menyebutkan bahwa wilayah Indonesia ini terdiri dari beribu-ribu pulau yang didiami oleh beranekaragam suku bangsa yang merupakan golongan etnik dan menggunakan lebih kurang 250 bahasa daerah serta memiliki berbagai kepercayaan dan kebudayaan yang beranekaragam. Menurut

Garna (dalam Mardotillah dan Mochammad, 2016: 122) mengatakan bahwa kebudayaan dapat dikatakan merupakan suatu sistem keteraturan dari makna-makna dan simbol-simbol. Kebudayaan juga merupakan suatu peralatan simbolik bagi pengontrol perilaku sehingga proses kebudayaan harus dipahami, diterjemahkan dan diinterpretasi.

Budaya pada hakikatnya memiliki nilai-nilai yang senantiasa diwariskan, ditafsirkan dan dilaksanakan seiring dengan proses perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pelaksanaan nilai-nilai budaya merupakan legitimasi dan manifestasi masyarakat terhadap budayanya. Eksistensi dari budaya dan keragaman nilai-nilai luhur kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan sarana dalam

¹ Graduate Student of History Education, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

² History Education, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

³ History Education, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

* Corresponding Author: chaerolriezal@gmail.com

membangun karakter warga negara, baik yang berhubungan dengan karakter privat maupun karakter publik. Geertz (1992: 5) berpendapat bahwa kebudayaan adalah pola dari pengertian-pengertian atau makna yang terjalin secara menyeluruh dalam simbol-simbol yang ditransmisikan secara historis, suatu sistem mengenai konsepsi-konsepsi yang diwariskan dalam bentuk-bentuk simbolik yang dengan cara tersebut manusia berkomunikasi, melestarikan dan mengembangkan pengetahuan dan sikap mereka terhadap kehidupan.

Budaya adalah sebuah sistem yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya. Bentuk simbolis yang berupa bahasa, benda, musik, kepercayaan dan aktivitas masyarakat yang mengandung makna kebersamaan merupakan cakupan budaya. Kluchohn dan Kelly (dalam Niode, 2007: 49) berpendapat bahwa kebudayaan adalah pola untuk hidup yang tercipta dalam sejarah yang eksplisit, implisit, rasional, irasional dan non rasional yang terdapat pada setiap waktu sebagai pedoman yang potensial bagi tingkah laku manusia. Mengacu pada pendapat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa segala aktivitas budaya bermaksud untuk memenuhi sejumlah kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan yang berhubungan dengan kebutuhan hidup. Dengan kata lain, budaya tidak bisa dipisahkan dari seluruh pola aktivitas masyarakat dan budaya pula memiliki peran yang sangat vital dalam proses pembangunan karakter bangsa.

Konsepsi dari budaya di atas menunjukkan bahwa betapa pentingnya nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya bangsa Indonesia sebagai pondasi dalam pembangunan karakter bangsa. Namun seiring perkembangan zaman, eksistensi budaya dan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sampai saat ini belum mampu dikonstruksi secara menyeluruh, dan bahkan ikut terancam keberadaannya dengan perkembangan zaman yang begitu pesat. Meski demikian, sebagian besar masyarakat Indonesia masih ada yang mempertahankan kebudayaannya sebagai identitas dan jati diri bangsa. Salah

satunya adalah budaya yang dimiliki oleh masyarakat Aceh.

Aceh merupakan salah satu dari 34 provinsi di Indonesia yang memiliki beragam budaya. Salah satu budaya yang dimiliki oleh masyarakat Aceh adalah tradisi *Peusijek*. *Peusijek* merupakan tradisi menepung tawari. Tradisi ini sangat dikenal di masyarakat Aceh sebagai adat dan budaya yang harus dilestarikan. Secara bahasa, kata "*Peusijek*" sendiri berasal dari kata "*sijek*" yang artinya dingin, kemudian ditambah oleh awalan "*peu*" (membuat sesuatu menjadi). Sehingga apabila digabungkan dapat diartikan menjadikan sesuatu agar dingin, atau mendinginkan (Dhuhri, 2008: 642).

Masyarakat Aceh yang dikenal mayoritasnya beragama Islam, memiliki adat dan istiadat serta kaya dengan berbagai macam budayanya. Hampir sebagian besar masyarakat Aceh dari sejak dulu sampai sekarang masih tetap melaksanakan prosesi tradisi *Peusijek* dalam berbagai kegiatan yang diyakini perlu mengadakan tradisi *Peusijek* itu. Sebab, tradisi *Peusijek* dianggap oleh masyarakat Aceh sebagai adat yang harus dilaksanakan.

Tradisi *Peusijek* adalah prosesi adat istiadat yang dilakukan diberbagai kegiatan tertentu dalam kehidupan masyarakat Aceh, seperti upacara/acara perkawinan, membangun dan menghuni rumah baru, menunaikan ibadah haji, kurban hewan, peremuan diceraikan suami, orang terkejut dari sesuatu yang luar biasa (harimau, terjatuh dari pohon, terkena musibah/ tabrakan kendaraan yang mengucurkan darah), perkelahian/ permusuhan yang harus didamaikan (Ismail, 2003: 161-162). Di samping itu, *Peusijek* juga dilakukan oleh anggota masyarakat terhadap seseorang yang memperoleh keberuntungan, misalnya berhasil lulus sarjana, memperoleh kedudukan tinggi dalam pemerintahan dan masyarakat, penghargaan atau anugerah bintang tertinggi, kendaraan baru, dan lainnya (Dhuhri, 2008: 162).

Dhuhri (2008: 161) mengatakan bahwa tata cara dari pelaksanaan tradisi *Peusijek*

dilakukan dengan beberapa urutan, pertama menaburkan beras padi (*breuh padee*), kedua, menaburkan air tepung tawar, ketiga menyunting nasi ketan (*bu leukat*) pada telinga sebelah kanan dan terakhir adalah pemberian uang (*teumutuek*). Cara tersebut umumnya hampir sama dilakukan dalam setiap prosesi tradisi *Peusijek* Aceh. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal perbedaan menurut kegiatan yang diadakan di dalam *Peusijek* tersebut. Biasanya perlengkapan *Peusijek* terdiri dari satu buah talam, satu mangkok *breuh padee* (beras), satu piring besar *bu leukat warna puteh/kuneng* (ketan warna putih/kuning), *tumpoe* (penganan berupa kue yang dibuat dari tepung dan pisang, kelapa merah, *teupong taweu* (tepung tawar), air putih, *oun sineujuek* (daun yang khusus digunakan untuk prosesi tradisi *Peusijek*), *on manek-mano* (jenis daun-daunan), *on naleung samboo* (sejenis rerumputan yang memiliki akar yang kuat), *glok ie* (tempat cuci tangan), dan *sangee* (tudung saji).

Tradisi *Peusijek* di Aceh sudah menjadi kebudayaan yang eksistensinya terus dipertahankan, mengingat dalam tradisi *Peusijek* mengandung nilai-nilai agama Islam yang mempunyai makna filosofisnya, sehingga hal itu dianggap sebagai prosesi adat yang sangat sakral dan harus dilakukan dalam kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini perlu diadakannya tradisi *Peusijek*. Bahkan sampai kepada hal yang sangat ekstrim pun, tradisi *Peusijek* dianggap amalan agama yang tidak boleh ditinggalkan. Konon, apabila ditinggalkan maka akan ditimpa oleh musibah dan tidak akan mendapat kerahmatan dan keberkatan dalam menjalankan kegiatannya.

Meski demikian, tradisi *Peusijek* nyaris tidak bisa eksis lantaran situasi di Aceh dalam keadaan perang dan konflik serta dihantam pula oleh mega musibah besar bernama gempa dan tsunami. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, keberadaan tradisi *Peusijek* di Aceh juga sempat diprotes dan ditentang oleh sebagian masyarakat (Sutiyono, 2010: 65-66). Beberapa kelompok masyarakat tersebut,

menganggap tradisi *Peusijek* di Aceh merupakan perbuatan bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh nabi Muhammad SAW. Walaupun diprotes, sebagian besar masyarakat Aceh masih melaksanakan tradisi *Peusijek* dalam acara seperti, perkawinan, sunat rasul, dan menunaikan ibadah haji. Bahkan tradisi *Peusijek* juga dilakukan oleh kalangan mahasiswa di Aceh ketika tahun ajaran baru, terutama pada saat penerimaan mahasiswa baru untuk di *Peusijek* oleh dosen dan mahasiswa.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tentang konstruksi makna tradisi *Peusijek* yang terdapat dalam budaya Aceh, dimana nilai-nilai agama Islam yang terintegrasi dalam tradisi *Peusijek* tersebut, dapat diterima oleh mayoritas masyarakat di Aceh sehingga hal itu menjadi sebuah budaya Islam dalam masyarakat Aceh. Karena itulah, agama Islam memegang peranan penting terhadap bertahannya kebudayaan di Aceh, termasuk tradisi *Peusijek*, sebagai konsep utama dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif sendiri adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (Moleong, 2005: 06), dalam hal ini adalah tradisi *Peusijek* yang terdapat dalam budaya masyarakat Aceh.

Lokasi penelitian ini terletak di Provinsi Aceh dengan beberapa daerah seperti di kabupaten/kota Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Besar dan Banda Aceh. yang memiliki beraneka ragam budaya Aceh. Lokasi penelitian dibuat secara purposif mengingat masyarakat Aceh yang memiliki banyak potensi budaya lokal, termasuk dalam hal tradisi *Peusijek*.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan metode observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data yang

dikumpulkan berasal dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang di dapatkan dari hasil observasi dan wawancara di lapangan bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang budaya atau tradisi *Peusijek* masyarakat Aceh. Sementara dari data sekunder di dapatkan dari hasil kajian pustaka dan hasil penelitian terdahulu. Instrumen lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah *tape recorder* dan kamera, yang bertujuan untuk menghindari data yang hilang dan untuk mendokumentasikan hasil penelitian dan situasi masyarakat Aceh yang sedang melakukan prosesi dari tradisi *Peusijek*. Di samping itu, penulis juga telah mengembangkan hubungan baik, sehingga hal ini dapat menurunkan jarak dan kecurigaan yang bisa mengganggu proses wawancara (Bungin: 2007). Adapun proses pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat, sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih baik.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif atau analisis kualitatif, yang merupakan proses siklus yang bergerak diantara tiga komponen pokok, yaitu reduksi data, sajian data, serta penarikan simpulan dan verifikasi (Miles & Huberman, 1984, dalam Sutopo, 2006: 113).

C. KERANGKA BERPIKIR

Berbagai praktik tradisi *Peusijek* di Aceh yang masih dijalankan hingga sekarang merupakan bagian dari bukti atas kuatnya kesepahaman masyarakat Aceh terhadap makna prosesi adat yang dilaksanakannya. Konstruksi makna terhadap praktik tradisi *Peusijek* Aceh ini menjadi bagian yang sangat penting dalam bertahannya dan eksistensi sinya warisan budaya Aceh tersebut.

Berger menyebutkan kenyataan sosial adalah hasil dari eksternalisasi, internalisasi, dan objektifikasi manusia terhadap pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Atau, secara sederhana eksternalisasi dapat

dipengaruhi oleh cadangan pengetahuan atau *stock of knowledge* yang dimilikinya. Cadangan pengetahuan merupakan akumulasi dari pengetahuan akal yang dimiliki manusia dan masyarakat atau *common sense knowledge*.

Eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi yang diketengahkan oleh Beger ini, senada dengan apa yang dimaksudkan oleh Blumer dengan teori interaksi simbolisnya. Menurut Blumer (May dan Powell, 2008: 77) yang mengatakan bahwa "*The responses of human beings to their environments are mediated by meaningful interpretations.*" Manusia merancang perbuatannya. Perbuatannya tidak bersifat semata-mata reaksi biologi atas kebutuhannya, peraturan kelompok, seluruh situasinya, melainkan merupakan konstruksinya (Veerger, 1983: 225). Sementara itu, Basrowi dan Soenyono (2004: 114) bahwa interaksionis-simbolis bertumpu pada tiga premis yaitu: (1) manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu bagi mereka, (2) makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain, dan (3) makna-makna tersebut disempurnakan disaat proses interaksi sosial berlangsung

Dalam interaksi terjadi proses penyesuaian timbal balik yang bisa menghasilkan suatu aksi khusus berupa "*joint action*". Dalam teorinya Blumer (Veerger, 1983: 226), hal itu disebut proses "*a positive shaping process in its own right*" Memahami makna yang hadir dalam realitas praktik budaya, juga berarti dapat memahami makna yang dikonstruksi, diyakini, dan diwariskan. Upaya pengkajian terhadap konstruksi makna ini menjadi bagian yang penting dalam upaya pelestarian praktik budaya yang terkait dengan penguatan identitas kelompok.

Teori dari interaksi simbolik ini digunakan untuk mengkonstruksi dan menganalisis proses pemaknaan tradisi *Peusijek* oleh masyarakat Aceh. Hal ini sesuai pendapat Dalmenda M.A dan Elian. E (2016: 141) mengatakan bahwa kelebihan dari pendekatan atau teori interaksionisme simbolik ini adalah karena adanya

pengakuan bahwa manusia adalah makhluk yang berpikir. Artinya, perspektif ini mengakui bahwa tidaklah mudah bagi siapapun merubah sikap dan perilakunya, hanya karena adanya satu atau dua stimulus, apalagi jika sikap dan perilaku yang dimaksud telah menjadi kebiasaan atau budaya baginya. Keberadaan *significant others* maupun situasi yang mendukung tidak serta merta dapat merubah perilaku seseorang, tetapi kedua hal tersebut akan diterjemahkan lebih dulu melalui proses berpikir. Sebelum mengambil keputusan, aktor berdialog (berinteraksi) dengan diri pribadi (*self interaction*).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penulis akan membahas hasil penelitian ke dalam beberapa sub bagian tentang Konstruksi Makna Tradisi *Peusijek* dalam Budaya Aceh, yang meliputi sejarah singkat tradisi *Peusijek* di Aceh, fungsi dan makna tradisi *Peusijek*, pelaksanaan dan bentuk-bentuk tradisi *Peusijek*, serta perlengkapan alat dan bahan tradisi *Peusijek* Aceh.

A. Sejarah Tradisi *Peusijek* Aceh

Peusijek adalah salah satu ritual atau prosesi adat dalam budaya Aceh. Tradisi *Peusijek* biasanya dilakukan bertujuan untuk memohon keselamatan, ketentraman, dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi *Peusijek* di Aceh yang sudah ada sejak dahulu, dan masih dipraktikkan oleh masyarakat hingga saat ini. Tradisi *Peusijek* ini sering dilakukan di semua kegiatan adat dan budaya Aceh, seperti pernikahan adat, perayaan adat, syukuran dan upacara adat lainnya. Kata "*Peusijek*" sendiri diambil dari kata "*sijek*", yang berarti "dingin". Sehingga dapat juga diartikan sebagai mendinginkan atau menyejukan.

Tradisi *Peusijek* ini merupakan salah satu tradisi lama masyarakat Aceh. Menurut catatan sejarah, Tradisi *Peusijek* merupakan salah satu bentuk peninggalan kebudayaan Hindu di Aceh. Sebelum masuknya agama Islam di Aceh, agama

Hindu sudah terlebih dahulu singgah di Aceh. Hal itu terlihat dari beberapa peninggalan sejarah dan kebudayaan Hindu di Aceh. Meski agama Hindu tidak berkembang pesat, namun keberadaan agama Hindu di Aceh turut mempengaruhi kebudayaan dan adat istiadat Aceh. Sehingga ada beberapa kebudayaan masyarakat Aceh yang berakulturasi dengan kebudayaan Hindu, seperti tradisi *Peusijek* (tepung tawari), upacara *boh gaca* (memberi inai), *kanduri blang* (syukuran ke sawah) dan acara *peutron aneuk* (turun anak).

Beberapa dari kebudayaan Aceh tersebut dianggap telah dipengaruhi oleh unsur budaya Hindu, termasuk tradisi *Peusijek*. Pada saat itu tradisi *Peusijek* yang dilaksanakan di Aceh masih menggunakan mantra atau doa-doa tertentu. Namun sejak masuknya agama Islam di Aceh, tradisi *Peusijek* kemudian diubah dengan memasukkan unsur-unsur ajaran Islam di dalamnya, seperti doa-doa keselamatan, shalawat, dan ajaran Islam yang lainnya. Hampir sebagian besar budaya Aceh dalam proses pelaksanaannya selalu dimulai dengan ucapan bismillah, doa bersama, dan shalawat kepada Nabi Muhammad. Itulah sebabnya, semenjak masuk dan berkembangnya agama Islam ke Aceh, budaya Aceh yang sebelumnya terdapat unsur-unsur budaya Hindu tersebut telah disesuaikan dengan ajaran Islam, termasuk tradisi *Peusijek*.

Tradisi *Peusijek* merupakan akulturasi antara budaya Aceh dengan agama Islam, sehingga sampai saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat Aceh. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang telah dirubah dalam tradisi *Peusijek* Aceh. Di antaranya yang adalah doa atau mantra tertentu yang sebelumnya digunakan dalam prosesi *Peusijek*, telah diganti dengan doa dan shalawat yang sesuai dengan ajaran Islam. Menurut catatan sejarah, pada masa Kerajaan Aceh Darussalam dibawah pimpinan Sultan Alaudin Riayat Syah, sultan mengundang 70 orang ulama besar yang terkemuka untuk menyusun qanun Syara'al Asyi guna

menjadi pedoman dan pegangan bagi kalangan kerajaan tentang kedudukan adat dalam syariat. Konon, pada masa itulah terjadi perubahan mantra-mantra menjadi doa-doa Islam dalam tradisi *Peusijuek* Aceh (Dhuhri, 2008: 640).

Perjalanan panjang dari tradisi *Peusijuek* Aceh diwarnai oleh berbagai hambatan dan kendala. Kaum reformis melalui organisasinya bernama PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) pada tahun 1939, yang dibentuk oleh Daud Beureueh mengeluarkan satu maklumat yang berisikan ajakan kepada umat Islam di Aceh untuk meninggalkan amalan-amalan yang dianggap syirik dan tidak ada dasarnya dalam al-Quran dan Hadist Nabi (Dhuhri, 2009: 641). Perselisihan ini terus berlanjut antar kaum reformis dan tradisionalis. Sampai pada tahun 1965, melalui sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pada saat itu, yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dikeluarkan suatu fatwa tentang larangan membahas masalah-masalah khilafiah (perbedaan pendapat) di tempat-tempat umum, di khotbah-khotbah, memberikan kebebasan untuk menjalani pemahaman agama dan menurut keyakinannya masing-masing (Dhuhri, 2009: 642). Sampai sekarang, tradisi *Peusijuek* masih bertahan dan dilestarikan oleh masyarakat sebagai sebuah budaya Aceh dan Islam, yang dipraktikkan oleh masyarakat Aceh, baik secara perorangan maupun kelompok.

B. Fungsi dan Makna dari Tradisi *Peusijuek* Aceh

Dalam budaya masyarakat Aceh, tradisi *Peusijuek* pada dasarnya dapat berfungsi untuk memohon keselamatan, ketentraman, dan kebahagiaan dalam kehidupan. Meski demikian, fungsi dari tradisi *Peusijuek* juga dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, yang diantaranya seperti, *Peusijuek Meulangga* (yaitu perselisihan atau konflik), *Peusijuek padee bijeh* (yaitu saat mulai menanam padi), *Peusijuek* tempat tinggai (yaitu menghuni rumah), *Peusijuek peudong*

rumoh baro (yaitu membangun rumah baru), *Peusijuek Keurubeuen* (yaitu saat hari berkorban), *Peusijuek* kendaraan, *Peusijuek* kitan, menunaian ibadah haji, dan *Peusijuek* pernikahan.

Sebagai salah satu warisan budaya, tradisi *Peusijuek* sangat kaya akan nilai-nilai dan makna yang terdapat di dalamnya, baik nilai agama maupun sosial. Bagi masyarakat Aceh, tradisi *Peusijuek* dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan kebahagiaan yang telah diberikan kepada mereka. Selain itu, tradisi *Peusijuek* juga sekaligus menjadi permohonan serta harapan agar selalu memperoleh keselamatan, keberkahan dan kesejahteraan.

C. Pelaksanaan dan Beberapa Bentuk Tradisi *Peusijuek* Aceh

Dalam masyarakat Aceh, adat istiadat telah memberikan tempat yang paling istimewa dalam perilaku sosial dan agama. Hal ini tertuang jelas dalam ungkapan atau hadih maja Aceh yang terkenal berbunyi "*Hukom ngon Adat Hanjeut cre Lagee zat Ngon Sifeut*". Artinya, adat dengan hukum syariat Islam tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifatnya. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa agama dan adat mendapatkan tempat istimewa dalam diri masyarakat Aceh. Hampir seluruh ada isiadat di Aceh sangat bernuansa Islam, termasuk tradisi *Peusijuek*.

Tradisi *Peusijuek* di Aceh seperti yang telah disebutkan di atas, adalah menepung tawari. Tradisi *Peusijuek* di Aceh ini dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai upacara atau adat tradisional simbolik dari permohonan keselamatan, ketentraman, kesejukan, kebahagiaan, persatuan, pemuliaan dan saling memaafkan. Karena itulah, dapat dikatakan bahwa hampir sebagian adat istiadat di Aceh terdapat prosesi tradisi *Peusijuek*, seperti upacara perkawinan, sunat rasul, menunaikan ibadah haji, membangun dan menghuni rumah baru, membeli kendaraan, berkorban hewan ternak, aqiqah anak,

mendamaikan orang yang sedang konflik, pergantian pemimpin, dan sebagainya.

Dalam pelaksanaannya, tradisi *Peusijuek* di Aceh biasanya dilakukan oleh tokoh agama atau tokoh adat yang dituakan untuk memimpin prosesi tradisi *Peusijuek* tersebut. Hal ini dikarenakan tradisi *Peusijuek* merupakan ritual yang dianggap sangat sakral, sehingga untuk melakukannya harus berasal dari orang yang paling mengerti tentang doa-doa dan proses pelaksanaan dalam tradisi tersebut. Bagi kaum laki-laki yang akan di *Peusijuek*, maka orang yang akan memimpin pelaksanaan tradisi tersebut adalah dari kalangan ulama, *Tengku*, atau *Ustadz*. Sedangkan bagi kaum perempuan yang akan di *Peusijuek*, maka prosesinya dilakukan oleh *Ummi*, *Ustadzah* atau seorang wanita yang dituakan oleh masyarakat Aceh. Hal ini dilakukan agar memperoleh berkah dan rahmat dari Allah SWT.

Ada 3 hal paling penting yang terdapat di dalam pelaksanaan tradisi *Peusijuek* di Aceh, yaitu perangkat alat dan bahan tradisi *Peusijuek*, gerakan, serta doa dalam tradisi *Peusijuek*. Untuk perangkat alat dan bahan dari tradisi *Peusijuek* terdiri dari *talam*, *bu leukat* (ketan), *umirah* (kelapa merah), *breueh pade* (beras), *teupong taweue* (tepung yang dicampuri air), *on sisikuek* (sejenis daun cocor bebek), *manek manoe* (jenis daun-daunan), *naleueng sam bo* (sejenis rumput), *glok* (sejenis tempat menyuci tangan) dan *sangee* (tudung saji). Bagi masyarakat Aceh, setiap bahan-bahan dalam tradisi *Peusijuek* ini memiliki filosofi dan arti khusus di dalamnya.

Gerakan memercikan air dalam tradisi *Peusijuek* juga merupakan salah satu hal yang sangat penting, karena sifatnya yang sakral sehingga untuk melakukannya itu tidak boleh salah. Gerakan memercikan air kepada orang yang akan di *Peusijuek* oleh ulama, dilakukan dengan cara gerakan tangan dari kanan ke kiri dan dari sebaliknya, serta gerakan yang menyilang dengan menggunakan bahan-bahan dari tradisi *Peusijuek*. Gerakan memercikan air dari bahan dalam tradisi *Peusijuek* ini tentu mempunyai makna filosofis.

Doa merupakan unsur terpenting dalam tradisi ini, karena inti dari tradisi *Peusijuek* adalah memohon kepada Allah SWT agar diberikan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan bagi yang membuat acara atau orang yang di *Peusijuek* tersebut. Doa yang digunakan merupakan doa yang terdapat dalam ajaran Islam yang sering digunakan dalam tradisi *Peusijuek* di Aceh. Itulah sebabnya, orang yang memimpin tradisi *Peusijuek* ini harus berasal dari tokoh-tokoh agama dan adat yang mengerti tentang agama Islam, prosesi tradisi *Peusijuek*, serta dipercaya dan dituakan oleh masyarakat.

Sementara itu, adapun bentuk-bentuk tradisi *Peusijuek* yang umumnya dilakukan oleh masyarakat Aceh adalah sebagai berikut:

1. *Peusijuek Meulangga*

Tradisi *Peusijuek Meulangga* ini dilaksanakan apabila terjadi perselisihan diantara warga atau penduduk *gampong* (desa) dengan penduduk yang lainnya. Jika perselisihan atau konflik itu dapat mengakibatkan pertumpahan darah, maka akan diadakan tradisi *Peusijuek* setelah dilakukan perdamaian antara pihak yang sedang berkonflik. Tradisi *Peusijuek* ini sering disebut *Peusijuek Meulangga* sebagai tanda bahwa orang yang berselisih atau berkonflik itu telah islah atau didamaikan.

2. *Peusijuek Pade Bijeh*

Pade bijeh artinya yaitu bibit atau benih padi. Tradisi *Peusijuek pade bijeh* ini dilakukan oleh petani terhadap padi yang akan dijadikan benih (bibit) sebelum penyemaian di sawah. Tujuan dari tradisi *Peusijuek* menanam padi di sawah ini untuk mengundang harapan agar bibit padi yang akan ditanamkan di sawah itu menjadi subur dan berbuah banyak serta mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah SWT.

3. *Peusijuek Peudong Rumoh*

Peudong Rumoh artinya adalah mendirikan rumah baru. Rumah yang merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, selalu dipilih pada hari baik. Demikian juga oleh masyarakat Aceh, selalu memilih hari yang paling baik dan bahan-bahan rumah yang dianggap baik juga saat mendirikan rumah baru. Pada umumnya, masyarakat Aceh dalam hal membangun rumah baru selalu diawali dengan tradisi *Peusijuek*. Adapun hal-hal penting yang akan di *Peusijuek* ketika membangun rumah baru adalah tiang rumah dan orang-orang yang akan mengerjakan rumah. Tujuannya tetap sama yaitu untuk mendapatkan berkah dari Allah SWT.

4. *Peusijuek Tempat Tinggal*

Tempat tinggal artinya tempat tinggal. Sebagaimana halnya dengan tradisi *Peusijuek* mendirikan rumah, tradisi *Peusijuek* juga dilakukan ketika menghuni tempat tinggal atau rumah yang baru. *Peusijuek* tempat tinggal ini dilakukan oleh masyarakat Aceh ketika menghuni tempat tinggal atau setelah membangun rumah baru. Pelaksanaan tradisi ini dilakukan oleh beberapa orang dalam jumlah yang ganjil, mulai dari tiga orang, lima orang dan seterusnya, serta mengundang beberapa dari masyarakat setempat. Tradisi *Peusijuek* rumah atau tempat tinggal ini dilakukan agar tempat tinggal atau rumah yang dihuni oleh masyarakat Aceh mendapatkan berkah dan ridha dari Allah serta orang yang mendiami rumah selalu dalam keadaan sehat wal'afiat.

5. *Peusijuek Keurubeuen*

Keurubeuen artinya berkorban hewan ternak. Bagi masyarakat Aceh yang memiliki harta, sering memberikan hewan kurban seperti kambing, sapi, dan kerbau. Pemberian hewan kurban terutama diadakan pada hari raya Idul Adha sesuai dengan ajaran agama Islam. Meskipun hari berkorban pada hari raya Idul Adha umumnya jamak dilakukan oleh umat Islam di Indonesia, namun ada yang unik pada

masyarakat Aceh ketika hari kurban dilaksanakan. Keunikan tersebut tampak ketika hewan yang akan dikurbankan terlebih dahulu akan di *Peusijuek* lengkap dengan alat dan bahannya yang dilakukan oleh para ulama, tengku atau ustadz di Aceh. Pelaksanaan tradisi *Peusijuek* di hari kurban ini dilakukan agar hewan yang dikurbankan tersebut, diyakini dan diharapkan akan menjadi kendaraan di hari akhirat kelak serta bahan-bahannya itu berfungsi sebagai hiasan kendaraan akhirat.

6. *Peusijuek Kendaraan Baru*

Apabila masyarakat Aceh telah membeli kendaraan yang baru, seperti sepeda motor dan mobil, maka akan dilakukan tradisi *Peusijuek* kendaraan baru oleh tengku dengan mengundang beberapa masyarakat setempat. Hal ini bertujuan agar kendaraan yang akan digunakan terhindar dari kecelakaan.

7. *Peusijuek Menunaikan Ibadah Haji, Perkawinan, Sunah Rasul, dan Aqidah Anak*

Dalam tahapan kehidupan di masyarakat Aceh, juga diadakan tradisi *Peusijuek*, seperti orang yang akan menunaikan ibadah haji, sunah rasul (khitan), aqiqah anak, pernikahan, dan sebagainya. Sampai sekarang kegiatan ini masih dilaksanakan di Aceh dengan bertujuan untuk mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah SWT.

8. *Peusijuek Pemimpin Baru*

Selain dari bentuk-bentuk tradisi *Peusijuek* yang telah dijelaskan di atas, tradisi *Peusijuek* ganti pemimpin juga dilakukan ketika terjadinya pergantian pemimpin dalam struktur pemerintahan di Aceh. Mulai dari perangkat desa dan kecamatan, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, legislatif, sampai ke gubernur dan wakil gubernur Aceh. Orang yang memimpin tradisi *Peusijuek* terhadap pergantian pemimpin di Aceh adalah para ulama atau tengku lengkap dengan segala

alat dan bahan dari tradisi *Peusijuek*. Tujuannya adalah agar pemimpin Aceh yang baru tersebut mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah SWT selama memimpin struktur pemerintahan di Aceh, serta juga dapat mengembangkan amanah yang telah diberikan kepadanya.

D. Perlengkapan Alat dan Bahan dalam Tradisi *Peusijuek* Aceh

Adapun alat perlengkapan yang digunakan dalam pelaksanaan tradisi *Peusijuek* di Aceh, yaitu sebagai berikut:

1. *Dalong*

Dalong merupakan satu wadah yang berisikan bahan-bahan dari tradisi *Peusijuek* sehingga dianggap memiliki kebersamaan yang kuat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

2. *Bu Leukat*

Bu Leukat artinya adalah beras ketan yang telah di masak. Namun, beras ketan dalam tradisi *Peusijuek* di Aceh biasanya harus diberikan warna kuning atau putih. Makna dari beras ketan ini adalah mengandung zat yang pengikat, sehingga jiwa dan raga orang yang di *Peusijuek* tetap berada dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Warna kuning dari beras ketan dalam tradisi *Peusijuek* juga mengandung makna akan lambang kejayaan dan kemakmuran, sedangkan warna putih melambangkan tanda suci dan bersih. Sehingga orang yang akan di *Peusijuek* itu dapat memberi manfaat yang lebih baik bagi orang lain dan orang yang di *Peusijuek* itu juga selalu berada dalam suasana yang tenang untuk menuju jalan yang benar.

3. *U Mirah*

U Mirah adalah kelapa yang telah diberikan warna merah. Makna dari *U Mirah* dalam tradisi ini adalah sebagai pelengkap dalam kehidupan untuk memberikan perpaduan yang manis.

4. *Breueh Pade*

Breueh Pade artinya beras padi. Makna dari *Breueh Pade* atau beras padi ini adalah merujuk dari sifat padi itu sendiri, yaitu semakin berisi maka semakin merunduk dan juga sebagai makanan pokok masyarakat. Maka dari itu, orang yang di *Peusijuek* diharapkan untuk tidak sombong apabila mendapat keberhasilan.

5. *Teupong Taweue ngon ie*

Teupong Taweue ngon ie artinya adalah tepung tawar dan air putih. Makna dari *Teupong Taweue ngon ie* dalam tradisi *Peusijuek* ini adalah untuk mendinginkan dan membersihkan orang yang di *Peusijuek* sehingga diharapkan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, melainkan mengikuti apa yang telah diperintahkan dalam agama Islam.

6. *On Sisikuek, Manek Manoe, dan Naleueng Sambo*

Ketiga jenis perangkat ini diikat menjadi satu oleh tali yang kokoh, dan berperan sebagai alat untuk gerakan memercikkan air tepung tawar. Makna dari tali pengikat dari semua perangkat tersebut adalah untuk mempersatukan orang yang di *Peusijuek* sehingga dapat bersahabat dengan siapapun dan selalu terjalin hubungan yang harmonis dan terbina. Sedangkan dari masing-masing perangkat daun-daunan itu merupakan obat penawar dalam menjalankan bahtera kehidupan, seperti mengambil keputusan dengan bermusyawarah dan berkepal dingin, bertanggung jawab dengan sepenuhnya dan dapat menjalin hubungan yang erat dengan siapapun.

7. *Glok*

Glok berperan sebagai tempat megisi tepung tawar yang telah dicampur dengan air dan *Glok* berikutnya yang digunakan sebagai tempat yang dapat menampung beras dan padi. Makna dari kedua *Glok* ini adalah jika orang yang telah di *Peusijuek*

tersebut melakukan aktivitas dalam kehidupan, sebaiknya hasil yang diperoleh itu dapat disimpan dengan sebaik-baiknya juga.

8. Sangee

Sangee artinya adalah tudung saji. *Sangee* atau tudung saji dalam tradisi *Peusijek* ini berperan untuk menutupi perlengkapan alat dan bahan dari tradisi *Peusijek*, seperti tepung tawar, air putih, beras padi, nasi ketan, kelapa, daun-daunan dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mengharapkan perlindungan dari Allah SWT terhadap orang-orang yang telah di *Peusijek* tersebut.

E. KESIMPULAN

Tradisi *Peusijek* adalah salah satu budaya Aceh yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat di Aceh, dimana di dalam tradisi tersebut terkandung nilai-nilai agama Islam. Hal itu dilihat dari sisi bahwa Islam memiliki konsep universal yang mampu menyatu dan melebur dalam berbagai peradaban dan kebudayaan. Bagi masyarakat di Aceh, tradisi *Peusijek* memiliki makna dan tujuan yang sangat filosofis, yaitu untuk memohon dan memperoleh keselamatan, kedamaian ketentraman, dan kebahagiaan dalam kehidupan.

Tradisi *Peusijek* merupakan budaya masyarakat Aceh yang dikaitkan dengan agama Islam, karena dalam tradisi *Peusijek* tersebut terdapat nilai-nilai agama dan bernuansa Islam yang harus dipraktikkan. Hal tersebut dapat dilihat dari unsur-unsur tradisi *Peusijek* yang terdiri

dari tiga hal yaitu pertama, pemimpin dari pelaksanaan tradisi *Peusijek* dilakukan oleh para ulama, tengku, ustadz, dan ustadzah, yang paham agama Islam dan budaya Aceh. Kedua, pelaksanaan tradisi *Peusijek* dilakukan ketika adanya acara aqiqah anak, pernikahan, menunaikan ibadah haji, khitanan, dan sebagainya. Ketiga, doa-doa yang dilantunkan dalam tradisi *Peusijek* ini adalah doa yang ditujukan kepada Allah dan Nabi Muhammad. Melihat ketiga tinjauan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tradisi *Peusijek* di Aceh sangat sarat akan nilai-nilai dan ajaran agama Islam, sehingga hal itu menjadi budaya lokal Aceh yang telah berasimilasi agama Islam.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan bagian dari penelitian tesis di Program Studi Magister Pendidikan Sejarah, Universitas Sebelas Maret. Untuk itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Hermanu Joebagio, M.Pd., dan Dr. Susanto, M.Hum., yang telah bersedia memberikan bimbingan dan dukungan terhadap makalah ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penerbit Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya (JANTRO), Jurusan Antropologi FISIP, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, yang telah bersedia memfasilitasi saya dalam menerbitkan makalah ini. Artikel ini di dukung penuh oleh Program Studi Magister (S2) Pendidikan Sejarah, Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Basrowi, Muhammad dan Soenyono. (2004). *Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Surabaya: V de Press.

- Dhuhri, Saufuddin. (2009). *Peusjuek: Sebuah Tradisi Ritual Sosial Masyarakat Pasee dalam Perspektif Tradisionalis dan Reformis*. Lhokseumawe, 27-28 Juni 2008. Prosseding International: The 3rd International Conference On Development of Aceh (ICDA-), Lhokseumawe, Unimal Pres, 2008. Halaman 636-656.
- Dalmenda M.A dan Elian, Novi. (2016). Makna Tradisi Tabuik Masyarakat Kota Pariaman (Studi Deskriptif Interaksionalisme Simbolik). *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. Vol. 18, No. 2, Hal. 135-151.
- Geertz, C. (1992). *Tafsir Kebudayaan (Refleksi Budaya)*. KANISIUS: Yogyakarta.
- Ismail, Badruzzaman. (2003). *Mesjid dan Adat Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, Banda Aceh: Gua Hira.
- Marnelly, T.M. (2017). Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Melayu Pesisir (Studi Pengelolaan Madu Sialang di Desa Rawa Mekar Jaya). *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. Vol. 19, No. 2, Hal. 149-154.
- Mardotillah. M dan Mochammad D.Z. (2016). Silat: Identitas Budaya, Pendidikan, Seni Bela Diri, dan Pemeliharaan Kesehatan. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. Vol. 18, No. 2, Hal. 121-133.
- Moleong, J. Lexy. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi Cetakan ke-33). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Niode, S.A. (2007). *Gorontalo (Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial)*. Jakarta: Pustaka Indonesia Press.
- Sutiyono. (2010). *Benturan Budaya Islam: Puritan dan Sinkretisme*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Sutopo, H.B. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian* (Edisi ke-2). Surakarta: UNS Press.
- Tim May and Jason L. Powell. (2008). *Situating Social Theory*, Second Edition. New York: The McGraw-Hill Companies.
- Veeger, K.J. (1983). *Realitas Sosial refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu, Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta: Gramedia.

BUDAYA MERANTAU MASYARAKAT DAN PERMASALAHAN PENDAFTARAN PEMILIH PADA PILKADA DI SUMATERA BARAT

Mega Ardila¹ *, Asrinaldi²

Submitted Article: 30 August 2018

Reviewed Article: 06 September 2018

Accepted Article: 18 December 2018

Abstract

An accurate, comprehensive and up-to-date voter list is an absolute prerequisite that must fulfill in carrying out electoral democracy. The existence of a correct voter list will improve the quality of the democratic electoral process by opening the most extensive possible space for citizens to exercise their right to vote. The purpose of this study was to find out the cultural implications of migrating the community in Lubuk Tarok sub-district to voter registration with the Dejure pattern. This research was carried out with qualitative methods through in-depth interviews with various informants equipped with existing documents. The results of this study show that due to the de jure pattern in voter registration has caused a large number of voters registered in the permanent voter list, but the voters are not by the KTP address. It is due to the wander culture in the Lubuk Tarok sub-district. Many of the residents of Lubuk Tarok are wandering out, but their population administration still listed in the Tarok. It is caused by many voting invitations to be returned by KPSS because there were no voters registered in the voter list. Also, this also has implications for the low level of voter participation on election day in the Lubuk Tarok sub-district.

Keywords: Merantau Culture, Voter Registration, De Jure Pattern, Election

A. PENDAHULUAN

Kisruh daftar pemilih selalu menjadi masalah yang berulang di Indonesia. Isu problematika permasalahan daftar pemilih puncaknya mencuat dan menjadi perdebatan hangat pada pemilu tahun 2009 sejak ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU. Hasil audit daftar pemilih Pemilu 2009 yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) terhadap daftar pemilih sementara (DPS) pada Juli-Agustus 2008 menunjukkan sekitar 20,8 persen warga negara berhak memilih belum terdaftar. Laporan Tim Penyelidikan Pemenuhan Hak Sipil dan Politik dalam Pemilu Legislatif 2009 oleh Komisi Nasional

Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan terdapat sekitar 25-40 persen pemilih kehilangan hak pilih karena tidak masuk daftar pemilih (Asy'ari, 2012: 4-5).

Seolah tidak mau belajar dari kesalahan pada pemilu tahun 2009, begitupun pada pemilu tahun 2014 yang lalu permasalahan serupa masih terjadi. Meskipun pada pemilu tahun 2014 yang lalu dianggap lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dilihat dari sudut transparansi dan keakuratan data. Akan tetapi penundaan penetapan DPT secara nasional pemilu legislatif tahun 2014 pun terjadi.

Penetapan DPT secara nasional yang sedianya dilaksanakan pada 23 Oktober 2013 akan tetapi ditunda penetapannya hingga 4 November 2013. Selain karena desakan Komisi II DPR dan partai politik yang menolak DPT ditetapkan kala itu, KPU mengambil keputusan itu karena adanya

¹ Graduate Student of Tata Kelola Pemilu, FISIP, Universitas Andalas

² Department of Political Science, FISIP, Universitas Andalas

* Corresponding Author: bundanyaalief@gmail.com

rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagaimana tertuang dalam Surat Bawaslu Nomor 762/Bawaslu/X/2013. Pada lampiran surat tersebut, Bawaslu menyebut masih terdapat 10,8 juta data yang masih bermasalah, di antara nya masih ada Nomor induk kependudukan yang bermasalah dan terdapat pemilih siluman (pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dan masih terdaftar di daftar pemilih tetap). Selain itu juga memang masih ada perbedaan data antara data di DPT dan data di Sistem Informasi Data Pemilih. (KPU, 2015: 33).

Permasalahan daftar pemilih ini terus berulang bahkan pada Pilkada serentak tahun 2015 yang lalu. Kabupaten Sijunjung yang merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Barat yang juga melaksanakan Pilkada serentak tahun 2015. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah sebesar 147,278 pemilih. Akan tetapi pada hari pemungutan suara

masih terdapat pemilih yang belum terdaftar pada daftar pemilih sehingga menggunakan KTP /KK dan identitas lainnya di hari pemilihan untuk mencoblos sebanyak 1321 pemilih. Akan tetapi jumlah tersebut belum lagi bagi mereka yang tidak terdaftar di DPT, akan tetapi tidak datang ke TPS karena tidak mengetahui prosedur memilih dengan menggunakan KTP pada hari pemilihan.

Selain permasalahan pemilih yang tidak terdaftar, ada juga pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk memilih masih terdaftar pada daftar pemilih tetap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung pada tahun 2015. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya formulir C6 (undangan memilih) yang dikembalikan oleh Petugas Pemungutan Suara (PPS) ke KPU Kabupaten Sijunjung. Sebanyak 5.732 pemilih yang tidak memenuhi syarat yang masih terdapat di daftar pemilih tetap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sijunjung yang bisa kita lihat pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1: Rekapitulasi Formulir C-6 Yang di kembalikan ke KPU Kabupaten Sijunjung Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung 2015

No	Formulir C6-KWK yang dikembalikan	IV Nagari	Kamang Baru	Koto VII	Kupitan	Lubuk Tarok	Sijunjung	Sumpur Kudus	Tanjung Gadang	Jumlah
1.	Pemilih Ganda	253	209	433	64	114	72	52	213	1.410
2.	Meninggal Dunia	30	17	46	4	36	1	22	19	175
3.	Alih Status TNI/Polri	-	-	-	-	-	-	1	1	2
4.	Tidak diketahui/tidak dikenal	101	220	450	30	-	165	43	111	1.320
5.	Pindah domisili	145	176	173	164	190	85	67	155	1.055
6.	Alasan lain	52	343	-	187	769	299	146	74	1.770
	Total	581	965	1.102	449	1109	622	331	573	5.732

Sumber : Berita Acara Pengembalian C6 KPU Sijunjung Tahun 2015

Pada tabel 1 tersebut bahwa jumlah undangan memilih (model C6) yang dikembalikan oleh KPPS kepada PPS terbanyak di Kecamatan Lubuk Tarok 1109. Jumlah tersebut ternyata sangat banyak jika dibandingkan dengan kecamatan lain yang memiliki daftar pemilih yang lebih besar dari Lubuk Tarok. Apakah yang menyebabkan hal tersebut

Beberapa kajian mengenai pendaftaran pemilih seperti Hasyim asyari dalam

tulisannya pada *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* yang berjudul "Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar Dari Pengalaman Menuju Perbaikan".¹ Dalam hal ini Hasyim membahas permasalahan daftar pemilih langsung kepada level aplikasi

¹ Hasyim Asyari , 2012 "Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar Dari Pengalaman Menuju Perbaikan, *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Februari 2012 (2):1-33

dengan mengelompokkan 3 isu krusial dalam, yaitu siapa yang dimasukkan daftar pemilih, siapa yang melakukan pendaftaran pemilih, dan apakah pendaftaran pemilih itu hak atau kewajiban. Hasyim(2012) melakukan perbandingan dari Pemilu 2004, Pemilu 2009 dan Pilkada, ditemukan sejumlah masalah yang memerlukan penanganan serius. Dalam penelitian ini hasyim 92012) mengkaji permasalahan pada pendaftaran pemilih dari level application.

Penelitian oleh Daud M.Liando, Zulkifli Golonggom dan Michael Mamentu² Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi yang berjudul "Manajemen Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014". Dalam penelitian ini digunakan konsep yang dikemukakan oleh George R. Terry dengan fungsi manajemen yaitu *Planning, Organizing, Actuating dan Controlling* dalam manajemen pengelolaan daftar pemilih. Penelitian yang dilakukan pada Pemilihan Umum Legislatif di Sulawesi Utara tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa manajemen pengelolaan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif di Provinsi Sulawesi Utara belum berjalan dengan baik karena fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan belum sepenuhnya diterapkan dalam pengelolaan daftar pemilih.

Dalam buku Seri Demokrasi Elektoral yang berjudul Menjaga Kedaulatan Pemilih yang ditulis oleh Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto dan Hasyim Asyari bahwa untuk menjadi kedaulatan rakyat perlu sistem pemilu yang bertujuan menjamin peluang semua warga negara yang berhak memilih untuk terdaftar sebagai pemilih, menjamin semua warga negara yang terdaftar mendapat kemudahan untuk menggunakan

hak pilihnya, melindungi suara yang diberikan pada proses pemungutan dan penghitungan suara sehingga ikut menentukan hasil pemilu.

Ketiga tulisan diatas sangat menarik, namun hanya mengkaji kepada aspek *rule application* saja, belum ada penelitian yang menyentuh dan fokus keterkaitan budaya merantau dalam dengan kualitas daftar pemilih terutama dengan penerapan pola dejure dalam pendaftaran pemilih ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci yaitu penyelenggara pemilu di Kabupaten Sijunjung (KPU dan panitia *ad hock*) serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sijunjung dan Peserta Pemilu. Selain itu sumber tertulis (data sekunder) berupa hasil penelitian dan dokumen resmi dari instansi yang berwenang. Analisis dilakukan berdasarkan pandangan-pandangan informan (emik) yang sudah divalidasi dengan menggunakan metode triangulasi data. Kesimpulan dari analisis yang dilakukan terkait pada gabungan data yang didapat dari informan (emik) dan interpretasi peneliti (etic) terhadap data lapangan tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Budaya Merantau Masyarakat Lubuk Tarok Dan Pola Dejure Dalam Pendaftaran Pemilih

Merantau memiliki arti berlayar atau mencari penghidupan di tanah rantau atau pergi ke negeri lain untuk mencari penghidupan, ilmu, dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Merantau telah menjadi budaya hidup banyak orang di Indonesia. Budaya merantau di ranah Minangkabau memiliki arti sebagai proses interaksi masyarakat Minangkabau dengan dunia luar. Merantau

² Daud M.Liando, Zulkifli Golonggom dan Michael Mamentu, "Manajemen Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014" dalam *Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, Januari-Februari 2016, 3 (XX) : 1-19

sebagai bentuk perjalanan ke negeri orang hampir menjadi keharusan bagi setiap orang bujang (sebutan untuk anak laki-laki di Minangkabau) dalam masyarakat Minangkabau tradisional, karena dengan membuktikan kesuksesannya di rantau, si Bujang itu besar kemungkinannya lebih sukses dalam berbagai hal yang menyangkut adat seperti perkawinan, kehormatan, kedudukan dalam suku, dan sebagainya (H. Geertz, 1967: 84 dalam Kato, 2005: 147).

Namun, sesuai dengan perkembangan zaman dan meningkatnya emansipasi wanita, merantau saat ini tak hanya dilakukan oleh anak bujang (anak laki-laki) saja, namun juga anak gadis (sebutan untuk anak perempuan di Minangkabau). Budaya merantau ini sudah dilakukan oleh masyarakat Minangkabau sejak berabad-abad silam. Suku Minangkabau terkenal dengan suku yang berbudaya, memiliki kecepatan dalam beradaptasi dengan suku dan wilayah lainnya, dan cakap dalam berkomunikasi. Hal ini yang akhirnya menjadikan suku minangkabau banyak yang melakukan kegiatan merantau seperti halnya terjadi di kecamatan lubuk tarok kabupaten sijunjung. Kecamatan Lubuk Tarok yang meliputi 3 nagari yaitu Lalan, Buluh Kasok dan Lubuk Tarok. Selain adat istiadatnya yang masih kuat, banyak rumah-rumah adat dipertahankan keberadaannya. Mata pencaharian penduduk setempat bertani dan berkebun, sebagian juga banyak yang merantau ke Negeri Jiran Malaysia.

Menariknya ternyata kebudayaan merantau yang ada di kecamatan lubuk tarok ini berpengaruh kepada kualitas daftar pemilih di kabupaten sijunjung. Bahwa secara *de jure* pemilih tersebut kediaman Pemilih adalah berdasarkan KTP, akan tetapi secara *de facto* tidak ada di alamatnya seperti karena alasan merantau. Bahwa banyak diantara masyarakat lubuk tarok yang merantau keriau bahkan ke negeri jiran malaysia akan tetapi administrasi kependudukan nya masih di Kabupaten Sijunjung. Wawancara dengan PPDP Sungai Jodi:

"Di Lubuk Tarok ko banyak yang merantau ka Aia Molek, Malaysia

*Pakanbaru, alah jadi tradisi disiko alah batahun-tahun marantau disinan, tapi KTP masih Sijunjung, waktu ambo mandata keluarga ndak nio namo-namo keluarga nyo nan marantau ko dihilangkan dari data pamilihan, nan ambo yo takuik pulo untuk mancoret, itu samo sajo manghilangkan hak urang pidana jatuah nyo"*³

(Di Lubuk Tarok ini banyak yang merantau ke Air Molek, Malaysia, dan Pekanbaru sudah jadi tradisi disini mereka sudah lama merantau, bertahun-tahun sudah mempunya rumah disana akan tetapi KTP masih Sijunjung, waktu saya mendata keluarga tidak mau nama-nama keluarga nya yang merantau tersebut dihilangkan dari data pemilih, dan saya tentunya tidak berani juga mencoretnya, karena itu sama juga dengan menghilangkan hak orang, pidana nanti jatuhnya)

Hal yang sama dikemukakan oleh Yose Rizal, PPK Lubuk Tarok :

" Memang banyak di Lubuk Tarok ini warga yang merantau ke luar dari Kabupaten Sijunjung tapi nama-nama nya masih ada di daftar pemilih, tentunya kami bisa mencoret nama tersebut apabila keluarga nya mengizinkan, akan tetapi waktu itu keluarga tidak mau, karena mereka takut juga kalau hilang nama nya dari daftar pemilih di Pilkada berarti mereka beranggapan bahwa keluarganya tersebut bukan warga Sijunjung lagi dan segala hak mereka sebagai warga Sijunjung turut hilang"⁴

Mengenai hal tersebut peneliti mewawancarai keluarga yang merupakan keluarga perantau yang merantau ke Malaysia:

³ Wawancara dengan ZK PPDP Jorong Sungai Jodi, tanggal 3 Februari 2018

⁴ Wawancara dengan Yose Rizal PPK Lubuk Tarok, tanggal 3 Februari 2018

*“ Bapak merantau di Malaysia, lah
lamo disitu, karajo disitu dibawa dek
keluarga. wakatu urang mandata dulu
apak lai dirumah, apak emang pas
lagi pulang dari Malaysia, wakatu itu
kan lagi puasa nio ka rayo, jadi apak
waktu itu pulang dalam rangka hari
rayo, apak pulang sakali satahun pas
rayo biasonyo”⁵*

(Bapak merantau di Malaysia, sudah
lama disana, kerja disana dibawa oleh
keluarga yang disana juga, waktu
petugas pemilu mendata dulu bapak
pas lagi pulang, waktu itu kalau tidak
salah orang puasa mau lebaran jadi
bapak waktu itu pulang dala rangka
Idul Fitri, kebetulan bapak emang
pulang biasanya sekali setahun pas
lebaran tersebut.)

Informan lain juga menyebutkan :

*“ Anak ambo merantau ke Air Molek, di
disitu basamo suami dan anak-anak
nyo, duo anak ambo disitu , adiak nyo
juo di Aia Molek, manggaleh di pasa
aia molek. Waktu petugas mendata
kapatang tu kami emang indak
manyuruah petugas manghapuih
namo anak tu, mano tau nanti pas
pemilihan nyo lai pulang kan bisa juo
mamilih ”⁶*

(Anak saya merantau ke Air Molek,
disitu bersama suami dan anak-
anaknya,, anak saya berdua di Air
Molek adiknya juga disana, bekerja
berjualan di pasar Air Molek. Waktu
petugas mendata kemaren kami
memang tidak mengizinkan petugas
menghapusnya dala data pemilih
karena mana tau nanti pas hari
pemilihan mereka pulang kan bisa
juga memilih”

Dari hasil wawancara dengan Lindo
Karsyah:

⁵ Wawancara dengan Rizka keluarga dari
perantau, tanggal 3 Februari 2018

⁶ Wawancara dengan Zuryenti keluarga
perantau, tanggal 3 Februari 2018

“ Masalah Lubuk Tarok dari pemilu
ke pemilu selalu saja hal yang
sama, dimana banyak dari warga
disana yang merantau akan tetapi
administrasi kependudukan nya
masih di Sijunjung sehingga nama-
nama mereka tetap ada di daftar
pemilih kita dan tidak ada regulasi
yang mengizinkan kita menghapus
nama-nama tersebut karena hal
tersebut sama saja kita
menghilangkan hak pilih seseorang
meskipun pada hari H kemungkinan
mereka akan pulang memilih sangat
tipis sehingga hal ini menyebabkan
rendahnya tingkat partisipasi kita di
Sijunjung khususnya Lubuk Tarok,
kalau kita lihat kasat mata lebih dari
80 % pemilih di Lubuk Tarok
memilih akan tetapi tingkat
partisipasi disana tidak pernah
melampaui 50% dari tahun ke tahun,
hal ini karena banyaknya pemilih
yang didata akan tetapi secara
defacto mereka tidak di Lubuk
Tarok.”⁷

Berdasarkan wawancara di atas dapat
disimpulkan bahwa banyak nya pemilih yang
terdata di dalam data pemilih karena
berpedoman kepada nama-nama yang
sudah tersedia di dalam formulir A-KWK
yang dibawa oleh petugas dalam proses
pencocokan dan penelitian lapangan. Data
yang berasal dari daftar pemilih potensial
pemilih yang secara *dejure* berdasarkan
KTP berdomisili di Kabupaten Sijunjung,
padahal secara fisik mereka sudah tidak
berdomisili di Kabupaten Sijunjung. Dalam
hal ini regulasi memang tidak mewajibkan
untuk menghapus mereka dalam daftar
pemilihan selama keluarga yang
bersangkutan tidak menginginkan hal itu.
Hal tersebut juga dapat dilihat pada
rekapitulasi formulir C6 yang dikembalikan
dapat terlihat bahwa pada Kecamatan
Lubuk Tarok merupakan Kecamatan yang
paling banyak kembali formulir C6
(undangan memilih). Hal ini menggam-
barkan bahwa banyak dari pemilih yang

⁷ Wawancara dengan Lindo Karsyah Komisioner
Divisi Sosialisasi dan Data, 7 Februari 2018

masuk ke dalam daftar pemilih tetap akan tetapi sewaktu KPPS memberikan surat undangan memilih yang bersangkutan tidak ada di Kecamatan Lubuk Tarok.

Hal ini yang membuat prinsip mutakhir sebagai salah satu prinsip yang harus dipenuhi dalam menyusun daftar pemilih tidak terwujud karena daftar pemilih tidak memuat informasi terkini dalam daftar pemilih. Hal ini juga merupakan implikasi dari mekanisme pendaftaran pemilih yang berbasis administrasi kependudukan, dimana keakuratan data sangat tergantung kepada informasi kependudukan yang dimiliki pemerintah. Dalam hal ini bukan hal yang aneh bagi sejumlah besar orang di dalam sebuah komunitas untuk bergerak baik di dalam negeri untuk meninggalkan tanah kelahirannya untuk sementara atau selamanya karena keadaan ekonomi atau keadaan lainnya. Dalam kasus tersebut, mungkin ada nama surplus dalam daftar dalam daftar pemilih akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak berkesempatan hadir dihari pemilihan (OSCE/ODHR, 2012:12). Oleh karena itu lah hal ini juga menyebabkan rendahnya partisipasi pada Kabupaten Sijunjung, karena kebanyakan nama-nama yang ada dalam daftar pemilih tersebut tidak datang

ke TPS karena memang sudah tidak berdomisili di Kabupaten Sijunjung.

D. KESIMPULAN

Budaya merantau yang terdapat di Kecamatan Lubuk Tarok sehingga menyebabkan banyaknya pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang mana secara *dejure* berdasarkan kartu identitas kependudukan mereka beralamatkan di Lubuk Tarok, Akan tetapi secara *de facto* keberadaan mereka tidak tercatat di Lubuk Tarok oleh karena beberapa alasan terutama karena merantau ke Provinsi lain bahkan Negara lain seperti Malaysia. Permasalahan ini juga yang membuat surplus pada daftar pemilih sehingga rendahnya tingkat partisipasi di Kabupaten Sijunjung.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang dibiayai oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu penelitian ini terlaksana sehingga sebagian hasilnya bisa dipublikasikan di jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali.(2009). *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- ACE-Electoral Knowledge Network, (2012) "Voter Registration", dan "General Issues". ACE Electoral Knowledge Network
- Asya'ri, Hasyim. (2012). Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar Dari Pengalaman Menuju Perbaikan. *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*. 2: 1-31
- IDEA.(2010). *Electoral Justice*. The International IDEA Handbook. International. Sweden: IDEA
- IDEA.(2002). *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*. Sweden: IDEA
- Kadir, Abdul & Suaib Eka, Susilo Suko. (2015). Accurate Data Management for Voter (Case of Indonesia). *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*. 9(11): 952-959
- Kato, T. (2005). Adat Minangkabau dan merantau dalam perspektif sejarah. Balai Pustaka
- Khoirunnisa, Agustyati (2016) Menata Ulang Mekanisme Pendaftaran Pemilih Pilkada, *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*. 8 (-): 43-62
- Mozaffar and Schedler (2002), The Comparative study of Electoral Governance, *Journal International Political Science* , 23(1): 5-27
- Marchetti (2012), Electoral Governance in Brazil, *Journal Brazilian Political Siences*, 6 I(X): 113-133

- Nurmandi, & Eka, Bambang & Darumurti (2015). *Strategi Pelembagaan Good Governance Dalam Proses Pemilu Di Indonesia*. Laporan penelitian hibah bersaing Perguruan Tinggi Negeri, Yogyakarta: Dikti
- OSCE/ODHIR. (2012). *Handbook For The Observation Of Voeter Registration*, Poland: Osce Office for democratic institutional
- Sadikin, Usep Hasan & Hafidz Masykurudin (2017), *Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 dan 2017*, Jakarta : Komisi Pemilihan Umum
- Suaib, Eka (2010). *Problematika Pemutakhiran Data Pemilih Di Indonesia*. Depok:Koekoesan
- Surbakti, Supriyanto, & Asya'ri (2011). *Seri Demokrasi Elektoral: Menjaga Kedaulatan Pemilih*, Jakarta: Kemitraan.
- Surbakti, Supriyanto, & Asya'ri (2012). *Seri Demokrasi Elektoral: Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih*, Jakarta: Kemitraan.
- Torres & diaz (2011), Electoral Governance More Than Electoral Administration, *Journal Mexico Law*, VII(1) : 31-46

PERAN FAKTOR PEMUNGKIN DAN PENGUAT PADA AKSES JAMBAAN SEHAT PERKOTAAN

Mila Mardotillah^{1*}, Budhi Gunawan², Rini S. Soemarwoto³, Ardini S. Raksanagara⁴

Submitted Article: 11 July 2018

Reviewed Article: 20 September 2018

Accepted Article: 18 December 2018

Abstract

Behavioral approaches such as enabling and reinforcement factors can form the basic knowing a healthy latrine. The program of behavior change often less because against the local community habit. Population density, infrastructure and high mobility are the problems facing people in accessing healthy latrines. As people's knowledge and attitudes develops, their awareness to keep access to healthy latrines. The research method used is a qualitative approach to know the role of enabling factors and reinforcement factors in realizing access to healthy latrines in Rancanumpang, Kota Bandung. The findings of this research are the enabling factors have been good regularity of society and community support. The reinforcing factor is the role of regional government in managing and conducting cross-sectoral cooperation. Conclusion of this research are the community, both local residents, migrants, officials, administrators, personalities and private sector already have the awareness to build their area in fulfilling the access latrines facilities.

Keywords: Enabling Factors, Reinforcing Factors, Latrine Access, Urban

A. PENDAHULUAN

Kesehatan lingkungan merupakan isu global dalam Program Internasional *Sustainable Development Goals* (SDG's) sejak tahun 2015 yang tertuang dalam pilar ke 6 yaitu Program Air Bersih dan Sanitasi. Sanitasi merupakan sebuah proses untuk memelihara tempat agar bersih dan higienis terutama ketersediaan air bersih, sistem limbah baik padat maupun cair (van Vliet, 2010).

Data menyatakan terdapat lebih dari 2,5 miliar penduduk di dunia hidup tanpa memiliki akses jamban sehat, air bersih dan sarana pembuangan (USAID, 2016).

Kesulitan air bersih dan sanitasi terjadi pada 663 juta orang di seluruh dunia yang berdampak pada peningkatan kejadian penyakit menular (WSP, 2017). Sanitasi yang tidak memadai, praktek kebersihan yang buruk, kepadatan penduduk yang berlebihan, peningkatan kebutuhan air bersih dan air yang terkontaminasi secara sekaligus dapat menciptakan kondisi yang tidak sehat terutama di daerah-daerah kumuh per kotaan (UNICEF, 2012). Kekurangan air bersih akibat pencemaran tinja menjadi masalah kesehatan dan berpengaruh kepada angka kesakitan penyakit yang disebabkan oleh *water borne disease* misalnya rotavirus yang terdapat dalam tinja manusia dan menginfeksi melalui sumber air (Singer, 2015 : 127).

Lingkungan, baik ditinjau dari fisik, budaya dan faktor sosial menjadi mediasi pada kejadian angka penyakit infeksi (Singer, 2015 : 126). Sejalan dengan teori dari Hendrik L. Blum bahwa derajat kesehatan dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu

¹ Postgraduate Student of Sociology-Anthropology, FISIP, Universitas Padjajaran, Bandung

² Department of Sociology-Anthropology, FISIP, Universitas Padjajaran, Bandung

³ Department of Sociology-Anthropology, FISIP, Universitas Padjajaran, Bandung

⁴ Department of Sociology-Anthropology, FISIP, Universitas Padjajaran, Bandung

* Corresponding Author: jayasuwirta@gmail.com

lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan genetik (Blum, 1974:94), Faktor lingkungan dan perilaku merupakan faktor yang saling terkait dan mempunyai peranan lebih besar dalam memengaruhi derajat kesehatan.

Peningkatan jumlah penduduk dan pola kebiasaan setiap daerah menyebabkan sanitasi tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan teknologi, tetapi membutuhkan pendekatan ekologi, sosial dan budaya. Sanitasi melalui pendekatan sosial yang melibatkan penyedia, teknisi dan perilaku pengguna merupakan pendekatan efektif dalam merubah perilaku sanitasi ke arah yang lebih baik (Talbot, 1896; van Vliet 2010).

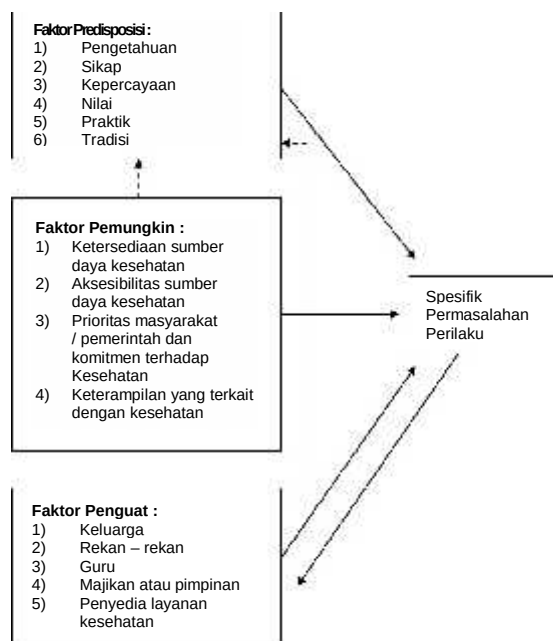
Perkotaan sebagai daerah urban membutuhkan sanitasi masyarakat yang layak. Pendekatan sanitasi dari sudut pandang ekologi, sosial dan budaya terutama di perkotaan selama ini belum banyak dilakukan. Bagi Negara-negara berkembang, kebutuhan sanitasi perkotaan meningkat bukan hanya pada penyediaan sarana tetapi membutuhkan keberlanjutan secara mandiri (UNDP, 1990). Sanitasi perkotaan dalam pendekatan sosial merupakan suatu proses untuk meyakinkan masyarakat dan individu untuk berinvestasi dan membuat perubahan perilaku mandiri merupakan dasar terwujudnya keberlanjutan sanitasi termasuk dalam pemeliharaan sarannya (IUWASH, 2015).

Perilaku manusia dalam menggunakan jamban dan beradaptasi dengan lingkungan adalah faktor dalam membentuk budaya masyarakat. Peningkatan jumlah penduduk dan pola kebiasaan setiap daerah menyebabkan sanitasi tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan teknologi, tetapi membutuhkan pendekatan ekologi, sosial dan budaya. Sanitasi melalui pendekatan sosial yang melibatkan penyedia, teknisi dan perilaku pengguna merupakan pendekatan efektif dalam merubah perilaku sanitasi ke arah yang lebih baik (Talbot, 1896; van Vliet 2010).

Teori Lawrence Green menyatakan bahwa derajat kesehatan individu dan masyarakat dipengaruhi oleh 2 faktor pokok. Faktor-faktor tersebut, yaitu: faktor perilaku (*behavior causes*) dan faktor di luar perilaku (*non-behaviour causes*). Faktor-faktor perilaku tersebut saling terkait dan

mempengaruhi seperti terdapat dalam bagan 1:

Bagan 1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi terhadap Perilaku Kesehatan



Sumber: *Health Program Planning, An Educational and Ecological Approach* (Green, 2005; hal 352)

Faktor perilaku terbentuk dari 3 faktor utama terdiri dari:

- 1) Faktor-faktor predisposisi (*predisposing factors*), yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, dan sebagainya.
- 2) Faktor-faktor pemungkin (*enabling factors*), yang terwujud dalam fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana, alat-alat seperti jamban, SPAL dan lain-lain.
- 3) Faktor-faktor penguat (*reinforcing factors*) yang terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas lain, yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat.

Faktor pemungkin dan penguat merupakan faktor yang dapat digali dalam mencari pola keberhasilan masyarakat dalam mewujudkan *Open Defecation Free (ODF)*. Pola ini bukan hanya membahas fisik dan peran eksternal masyarakat saja tetapi keterkaitan antara peran pemerintah,

masyarakat dan swasta bersinergi dalam mewujudkan akses jamban sehat masyarakat.

Kota Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk perkotaan tertinggi di Jawa Barat yaitu sebesar 2.394.873 orang. Perkembangan Kota Bandung menjadikan budaya baru Indonesia yaitu sebuah budaya urban pada umumnya yang memerlukan akses sanitasi bagi warganya (van Klinken & Berenschot, 2014: 17). Kota Bandung dapat dijadikan contoh bagi daerah lain terutama bila hal positif dalam penggunaan jamban sehat perkotaan.

Akses sanitasi Kota Bandung sebesar 1-2 % (WSP, 2015). Kasus diare di Kota Bandung pada tahun 2015 melebihi target sasaran yaitu 107,7% yang berarti terdapat 57.425 kasus dari target kasus 53.299 untuk semua golongan umur (Profil Dinas Kesehatan, 2015). Kota Bandung menempati urutan ke 8 dari 9 kota-kota di Jawa Barat dalam pencapaian perilaku sanitasi berdasarkan akses jamban sehat yaitu sebesar 58,47 %, sedangkan capaian kelurahan yang telah melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kota Bandung baru mencapai 21,9 %, yang berarti 33 kelurahan dari 151 kelurahan telah melaksanakan pemucuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Profil Dinas Kesehatan, 2015).

Sampai dengan periode Triwulan III tahun 2017, dari 33 kelurahan di Kota Bandung, terdapat 1 kelurahan yaitu Kelurahan Rancanumpang yang telah diberikan pemucuan dan diverifikasi menunjukkan hasil bahwa seluruh masyarakatnya sudah tidak buang air sembarangan, memiliki akses jamban sehat dan dinyatakan sebagai kelurahan *Open Defecation Free* (ODF) yang berarti 100 % masyarakat sudah berperilaku saniter dalam buang air.

Dalam keberhasilan ini tidak terlepas dari perilaku masyarakat dalam mewujudkan *Open Defecation Free* (ODF). Bagaimana peran faktor pemungkin dan faktor penguat dalam mewujudkan akses 100 % terhadap jamban sehat.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan adalah kualitatif yaitu melakukan suatu proses penyelidikan untuk menganalisis fenomena sosial dengan cara membandingkan, merefleksi, mengklasifikasi, menyajikan/mengkategorisasi dan memverifikasi data. Keseluruhan kegiatan ini dilakukan untuk menemukan keseragaman pola dan sifat umum yang sedang diteliti (Miles dan Huberman, 1992:47). Penelitian dilakukan pada bulan September 2017 sampai Januari 2018.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum

Kelurahan Rancanumpang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Gedebage Kota Bandung, berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Kondisi sarana jamban masyarakat Kelurahan Rancanumpang pada tahun 2014 berjumlah 972 unit dengan jumlah KK sebanyak 1.081 KK, berarti hanya 89.92 % masyarakat memiliki dan dapat mengakses jamban (Laporan Tahunan UPT Puskesmas Riung Bandung, 2014). Masyarakat bekerja sama dengan LPM dan Kelurahan agar semua warga dapat memiliki akses terhadap jamban dan air bersih. Bersama dengan itu, Dinas Kesehatan Kota Bandung melakukan pemucuan agar masyarakat merubah perilaku dari tidak menggunakan jamban menjadi menggunakan jamban.

Kenaikan jumlah sarana jamban dan septiktank mulai tahun 2014 seiring diberikan pemucuan dan terbentuknya komitmen dari aparat dan masyarakat baik penduduk lama maupun pendatang. Setiap penduduk mendeklarasikan sudah 100% mengakses jamban sehat pada tanggal 25 November 2015.

2. Upaya Warga Memenuhi Jamban

Antusiasme warga ingin mewujudkan ODF sangat menentukan dalam keberhasilan Kelurahan Rancanumpang.

Upaya tersebut ditinjau dari:

a. Kondisi Jamban Sehat

Kondisi fisik jamban sudah baik dengan Jamban Sehat Permanen nya 100% atau seluruh warga sudah memiliki semua, warga yang belum punya dibantu oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam memenuhi jamban dan septik tank. Warga menyadari pentingnya jamban agar terhindar dari penyakit. Hal ini sejalan bahwa pem buangan tinja manusia yang ditangani dengan baik dapat menurunkan pencemaran terhadap permukaan tanah serta air tanah, sehingga potensi timbulnya penularan berbagai macam penyakit saluran pencernaan dapat diatasi (Soeparman, 2002).

b. Kondisi Tanah

Wilayah Kelurahan Rancanumpang merupakan dataran hamparan sawah, rumah-rumah dibangun di bekas sawah. Penduduk terbagi menjadi penduduk asli dan pendatang. Penduduk asli terbanyak tinggal di RW 01-02 dan penduduk pendatang terbanyak tinggal di RW 03-08. Warga memiliki kesadaran memba ngun septiktank di wilayah tanah rumahnya dan kompleks perumahan telah memiliki fasilitas jamban pribadi.

c. Sarana Fasilitas Umum

Fasilitas umum jamban tidak ada, namun terdapat fasilitas sarana air bersih dan bak penampungannya untuk umum di RW 02, dipakai oleh sekitar 10 KK atau 1 dasawisma termasuk bantuan septiktank pribadi diberi oleh LPM kelurahan. Fasilitas umum bantuan pemerintah, CSR dan swadaya berupa jalan, taman, posyandu, kantor RW dan masjid. Di daerah perkotaan dengan berbagai pendatang yang masuk, masyarakat tumbuh dari hasil interaksi beragam orang yang menyamakan persepsi agar terjalin kesepakatan (Mair, 1984: 123). Sarana jamban merupakan kesepaka tan yang harus ada dan dipatuhi oleh masyarakat agar tetap terjaga dan berfungsi terutama yang bersifat bantuan dari pemerintah dan CSR.

d. Konsekuensi Terkait Sarana Jamban

Model jamban di Kelurahan Ranca numpang adalah jamban basah sehingga sarana air bersih harus lancar dan tersedia. Jamban yang ada lengkap dengan septiktank, pembuangan air cucian ke sungai dengan saluran tertutup meskipun masih terdapat jarak antara septiktank dan sumber air kurang dari 11 meter.

Setiap RW selalu gotong royong agar saluran air kotor mengalir dengan baik ke sungai atau sawah melalui selokan depan atau belakang rumah. Masyarakat di kompleks perumahan memberi dukungan dan bantuan pada RW lain untuk setiap KK, terutama yang belum memiliki jamban dan septik tank.

e. Pandangan Pembuangan Limbah Jamban

Masyarakat sudah sadar akan pentingnya jamban dengan bukti semua warga memilki jamban dan septiktank. Tidak ada penduduk buang air besar di sawah atau sungai. Komplek perumahan telah memiliki jamban dan septiktank, jarak sumber air dan septiktank berjauhan agar tidak akan mencemari, semua sudah tertata dan limbah jamban tidak boleh langsung ke sungai.

Aliran jamban dan septiktank berfungsi dengan baik, namun pada saat terjadi masalah dengan septiktank dan sumber air, pemindahan sarana belum seragam sehingga dapat berpotensi tercemarnya sumber air bila tidak memperhatikan jarak.

f. Dampak Pembuangan

Masyarakat meyakini bahwa buangan jamban seharusnya dialirkan ke saluran kota atau sumur resapan dan septiktank. Fungsi septiktank harus selalu baik agar limbah domestik tidak mencemari sungai. Pence- maran berpengaruh pada angka penyakit berbasis lingkungan baik yang dibawa vektor maupun penurunan kualitas air bersih, bau, pendangkalan dan risiko terjadinya banjir. Belum adanya sistem pengelolaan limbah dan air, kurangnya perilaku sehat meningkatkan penyakit yang ditularkan melalui air menjadi endemik. (Foster & Anderson, 2006:36). Kasus pencemaran yang ditimbulkan dari buangan tinja tidak hanya berakibat akut namun

dapat berakibat kronis. Pengaruh ketidakseimbangan lingkungan dan kesehatan menyebabkan berkembangnya penyakit. (Singer, 2016:11) Penyakit yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan dinamakan pollutagen/polluting pathogen yang berarti bahwa dalam polutan terdapat kuman patogen yang merugikan kesehatan.

g. Jamban Menurut Penduduk

Definisi jamban terkait erat dengan pengetahuan penduduk tentang jamban itu sendiri. Menurut informan dari Kemenkes, Dinas Kesehatan, DPKP3 dan puskesmas, pendapat mengenai jamban dapat dikatakan sama dan sesuai ketentuan yaitu ada rumahnya, dudukan dan septiktank. Informan di masyarakat cenderung sudah mengerti dan berpendapat bahwa jamban adalah tempat buang air, harus berada dalam rumah dan harus bersih. Informan masyarakat tidak mengetahui istilah leher angsa, masyarakat hanya tahu bahwa kloset yang dijual sudah baik dan belum tahu fungsi dari leher angsa tersebut.

h. Perbedaan Jamban dengan Sumur Resapan dan Tanpa Sumur Resapan

Informan dari Kemenkes, Dinas Kesehatan, DPKP3 dan puskesmas menyatakan air buangan jamban dialirkan ke sumur resapan agar terjadi proses anaerobik, apabila tanpa sumur resapan maka kecenderungan dialirkan ke sungai.

Informan masyarakat berpendapat tidak tahu perbedaannya, sumur resapan untuk air hujan, ada juga berpendapat bahwa sumur resapan untuk penampungan air hujan dan dari talang air, kotoran dan air dari jamban dialirkan keseluruhan ke septiktank. Namun ada juga yang berpendapat bahwa sumur resapan penting karena memiliki fungsi menampung air kotor rumah dan air hujan. Selain itu beberapa masyarakat berpendapat lebih baik dengan sumur resapan sehingga tidak mencemari sungai.

i. Bagian-bagian Jamban

Informan dari Kemenkes, Dinas Kesehatan, DPKP3 dan puskesmas menyatakan Standar Jamban Sehat Permanen (JSP) terdiri dari di atas tanah berupa rumah jamban; pada permukaan tanah (tempat dudukan) dan dibawah

permukaan tanah (tempat penampungan dan peresapan. Namun standar baku dan juknis yang lebih spesifik di Kota Bandung belum ada, yang terpenting adalah memiliki septik tank dan air yang cukup sesuai Permenkes 3/2014.

Masyarakat berpendapat bahwa secara umum jamban berada dalam rumah, tertutup dan memiliki septiktank meskipun masih ada jamban yang terletak disamping rumah. Developer mengatur jamban untuk rumah kompleks, masyarakat mengatur ulang sesuai kebutuhannya.

j. Kelebihan dan Kekurangan dari setiap Pilihan Opsi Teknis

Informan dari Kemenkes, Dinas Kesehatan, DPKP3 dan puskesmas menyatakan bahwa keterbatasan lahan perkotaan mendorong mulainya dibangun septiktank komunal dengan titik-titik tertentu untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk. Saluran air kotor lebih ideal dengan pembangunan riool kota, namun hal ini masih sulit dilakukan di seluruh kota. Pemukiman padat tidak ada pilihan selain memanfaatkan tanah milik sendiri yang terpenting adanya kesepakatan tentang pengaliran air buangan.

Jamban sehat terwujud dari hasil kerja suatu sistem terdiri dari komponen-komponen yang saling terkait yaitu :

- a) Alami terdiri dari iklim, kelembaban, temperatur, sumber air termasuk kualitas dan kuantitas, jenis dan komposisi tanah;
- b) Masyarakat terdiri dari kepemilikan dan jenis permukiman, status ekonomi, sikap, kebiasaan, kepercayaan dan tabu terkait tinja;
- c) Proses pengelolaan terdiri dari secara fisik, kimia, biologi agar tidak membahayakan, tidak mengganggu, menjadi produk yang dapat digunakan kembali;
- d) Sarana terdiri dari struktur yang dibangun untuk pembuangan tinja dan urin (Esrey, 1998:6).

Penilaian kembali kondisi lingkungan, masyarakat dan potensi di dalamnya dikaitkan dengan sistem jamban itu sendiri maka pilihan teknis dapat dibuat dan disesuaikan dengan kondisi alam dan masyarakat setempat tetap memegang prinsip tidak mencemari (Douglas, 1984; 125). Tindakan-tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perilaku *Open Defecation Free* berdasarkan budaya

setempat. Hal ini sejalan dengan Suparlan (1988:6) menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan manusia teknologi dan ekonomi. Melibatkan aspek biologis dan emosi yang bersangkutan. Memenuhi kualitas itu kecerdikan manusia memanipulasi macam-macam sumber daya dan energi yang tersedia dalam lingkungan (Tumanggor, 2010). Selayaknya ODF diperkotaan sudah menggunakan teknologi tepat guna dalam mensiasati keterbatasan sumber daya air dan lahan.

k. Perkiraan Biaya untuk setiap Bagian Jamban dan Umur Pemakaiannya;

Masyarakat berpendapat bahwa kisaran biaya dalam pembuatan dan pemeliharaan memerlukan biaya sekitar Rp. 5 juta dalam 3 tahun. Biaya tergantung harga pasar dan umur pemakaian tergantung pemeliharaan warga.

Septiktank PAMSIMAS seperti bantuan pada RW 02, merupakan septiktank berbahan PVC kedap air. Biaya kuras berkisar Rp. 150rb-300rb/m3. Pengurusan tergantung penggunaan dan luas septiktank. Volume besar dapat menghabiskan biaya sekitar Rp. 2-3 juta setiap 5 tahun. Kerusakan biasanya diperbaiki oleh tukang bangunan dengan biaya beragam tergantung jenis kerusakan.

l. Berbagai Desain Jamban dapat Disesuaikan dengan Kebutuhan Pengguna dan Keadaan Lokasi.

Informan dari Kemenkes, Dinas Kesehatan, DPKP3 dan puskesmas menyatakan bahwa jamban dan septiktank dibedakan untuk yang tinggal di daratan, di daerah pasang surut dan untuk berkebutuhan khusus seperti difable, pasien, lansia dan anak-anak, tetapi secara umum bantuan diberikan dengan kloset jongkok leher angsa lengkap dengan septik tank dari fiber tebal. Dalam Permenkes mengatur hanya berupa panduan, tetapi seharusnya disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Hal terpenting dari perilaku menggunakan jamban adalah sesuai dengan pengetahuan dan sikap dari masyarakat. Pelaksana pembangunan haruslah saling menghargai dengan kebutuhan masyarakat (Garna, 2002:104; de Sardan, 2005:24), sehingga perubahan perilaku

masyarakat dalam menggunakan jamban perkotaan baik milik pribadi ataupun kelompok tidak terlepas dari keterkaitan peran-peran tradisi dan modernisasi masyarakat perkotaan yang dipahami manfaatnya dan dapat dilakukan oleh masyarakat.

m. Semua Masyarakat telah BAB Hanya di Jamban yang Sehat dan Membuang Tinja/Kotoran Bayi hanya ke Jamban yang Sehat (Termasuk di Sekolah)

Kondisi di Kelurahan Rancanumpang sudah tidak terlihat tinja di sungai dan aliran air. Seluruh penduduk telah buang air di jamban dan semua jamban telah dilengkapi septiktank. Rumah kontrakan seluruhnya telah dilengkapi dengan jamban dan septiktank pribadi. Sekolah, madrasah dan tempat umum lainnya telah memiliki jamban dan septiktank. Akses terhadap air bersih dan jamban menjadi bagian fasilitas yang harus disediakan sekolah dan menjadi bagian dari prestasi sebuah lembaga pendidikan (Jasper, 2012).

Jamban bukan merupakan pengaruh langsung yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian pada anak. Jamban sehat dan air bersih merupakan faktor prediktor. Secara individu belum dapat memberikan dampak besar bagi penurunan angka kesakitan, tetapi cakupan masyarakat yang tinggi terhadap jamban sehat akan sangat berdampak pada penurunan angka kesakitan anak. Meningkatnya cakupan jamban sehat berhubungan dengan angka kematian diare anak di bawah 5 tahun, dan semua penyebab kematian neonatal. Cakupan jamban sehat yang meningkat dapat menurunkan kesakitan hingga sekitar 20%, terutama penurunan sebesar 60% untuk kematian diare dan 80% untuk kematian neonatal (Hunter, 2016).

n. Penerapan Sanksi atau Peraturan atau Upaya Lain oleh Masyarakat untuk Mencegah Kejadian BAB di Sembarang Tempat

Tidak ada penghargaan dan sanksi khusus terkait penggunaan jamban karena seluruh warga sudah buang air di jamban. Sanksi sosial hanya berupa teguran dari tetangga apabila ada kotoran hewan yang

berserakan dan bau akibat jamban atau septiktank bocor.

Dalam masyarakat modern, sebuah kejadian dalam masyarakat haruslah dapat dijelaskan mengenai bagaimana tindakan manusia langsung oleh dirinya dilihat dari sudut pandang sistem yang mengaturnya. Sebuah perilaku merupakan dampak dari sistem yang bekerja, bagaimana prosesnya dan bagaimana sistem tersebut dapat berjalan secara alami (Ortner, 1984:148). Dasar sistem adalah sebuah peraturan, sehingga pengurus beserta Kelurahan harus memiliki peraturan yang disepakati terkait *reward and punishment* dalam penggunaan jamban sehat.

Selama ini masyarakat belum mempunyai prosedur monitoring terkait jamban, hal ini disebabkan karena seluruh masyarakat sudah memiliki jamban. Monitoring secara umum tentang kondisi warga sebulan sekali berupa kerja bakti, bila ada masalah, dimusyawarahkan dan di cari jalan keluarnya bersama.

o. Ada Upaya atau Strategi yang Jelas untuk dapat Mencapai Total Sanitasi

Menurut Kemenkes, sudah ada upaya strategis dengan road map STBM sampai tahun 2019 namun harus didukung kemauan masyarakat untuk berubah sebagai hasil pemicuan dan dukungan kebijakan lokal. Dinas Kesehatan melakukan upaya strategi dengan pekan sanitasi bekerjasama dengan DPKP3, mensosialisasikan Surat Edaran Walikota agar semua warga memiliki jamban dan septiktank, pemicuan bagi seluruh kelurahan, pendampingan program. Idealnya monitoring dan evaluasi dilakukan setiap 2 tahun pada kelurahan yang telah ODF.

DPKP3 melakukan percepatan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan untuk sosialisasi program 100-0-100, meningkatkan database tentang sarana dan menindaklanjuti usulan warga tentang pembangunan sarana, meminta usulan tiap RW pada Musrenbang terkait sanitasi. Mengusulkan pada Bapelitbang agar PIPPK mengusung tema sanitasi khusus, sehingga output lebih jelas.

Pada tingkat Kelurahan, lomba menjadi ajang yang efektif memberi semangat pada masyarakat agar sarana dan perilaku sanitasi meningkat.

Rancanumpang menjadi ODF berawal dari lomba Kelurahan tahun 2014 dan 2015, pada 25 November 2015 dilaksanakan deklarasi ODF. Hal ini terjadi karena tekad kuat dari warga untuk berubah menjadi sehat, memberi dukungan melalui komunikasi bila warga mendapat kesulitan atau kerusakan sarana dan memberi masukan bila warga memiliki jarak sumur dan septiktank yang dekat juga memanfaatkan potensi lahan untuk memperbaiki sanitasi

p. Laporan 10 Penyakit Infeksi dan KLB Terkait Penyakit Akibat Tinja

Laporan 10 penyakit terbanyak tahun 2017 di Kelurahan Rancanumpang yaitu penyakit infeksi ke-1 Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dan Diare di urutan ke-8. Pertengahan tahun 2017 ditemukan peningkatan kasus Hepatitis A, teratasi dengan pengobatan dan pembiasaan hidup bersih dan sehat. Dinas Kesehatan melakukan penyelidikan epidemiologi dan mengambil sampel air untuk diperiksa di laboratorium sebagai antisipasi penyebaran lebih luas.

Perilaku kesehatan untuk hidup sehat yaitu semua kegiatan atau aktivitas orang dalam rangka memelihara kesehatan, seperti tindakan terhadap penyakit menular dan tidak menular, tindakan terhadap faktor-faktor yang terkait dan atau memengaruhi kesehatan juga tindakan untuk menghindari penyakit (Notoatmodjo, 2012:27). Kotoran makhluk hidup lainnya harus menjadi perhatian setiap warga agar pemeliharaan kesehatan dapat dilakukan secara mandiri dan menjadi perilaku positif di masyarakat.

3. Faktor-faktor perilaku penggunaan jamban sehat

Untuk mengetahui gambaran perilaku masyarakat dalam penggunaan jamban, maka analisis perilaku ditinjau dari teori Green dibatasi pada faktor pemungkin dan faktor penguat. Faktor-faktor perilaku yang mendorong kepada keberhasilan ODF di Kelurahan Rancanumpang yaitu :

a. Faktor pemungkin

Faktor pemungkin mencakup keterse-
diaan sumber daya baik sarana maupun

prasarana. Faktor ini dapat dijabarkan menjadi:

(1) Penduduk

Komponen penduduk terkait jamban, pendapat masyarakat menyatakan bahwa setiap pendatang harus memiliki jamban sehat yang pengawasannya dilakukan oleh tetangga langsung, RT, RW dan Kelurahan. Penyediaan jamban sehat merupakan tanggung jawab pribadi atau setiap keluarga yang tercantum dalam KK. Status rumah sendiri harus membangun swadaya dan bila kontrakan, pemilik rumah harus menyediakan sebelum di kontrakan.

(2) Sumber daya

Septiktank menjadi program utama kecamatan dalam menangani pencemaran sungai akibat tinja, namun kecenderungan septiktank dari developer seperti cubluk, dasarnya tidak ditembok, tetapi bila jarak >11 m dari sumber air dan masih diperbolehkan. Permasalahan terjadi apabila memindahkan septiktank tanpa melihat jarak dan tahu aturan yang seharusnya. Septiktank yang dicontohkan pemerintah cenderung aman. menurut Wasserman dan Faust (1994) yang menyebutkan bahwa perilaku manusia melekat pada hubungan antarpersonal dalam jaringan kerja, yang bentuknya bisa formal dan informal. Putnam (2000) menegaskan bahwa semakin kuat ikatan sosial yang dimiliki oleh suatu masyarakat, maka mereka semakin berpeluang untuk menggerakkan sumber daya, baik lokal maupun ekstra lokal. Landeers (2002) berpendapat bahwa pilihan akhir dari seseorang adalah gambaran dari atribut di dirinya dan sekaligus pengaruh dari orang-orang sekitarnya (Joga, 2017:89).

(3) Jamban Membutuhkan Air yang Banyak untuk Membersihkan

Jamban yang ada merupakan cara basah, namun masyarakat sudah berpikir seharusnya ada cara agar air yang ada cukup untuk untuk membersihkan jamban. Masyarakat memerlukan teknologi yang dapat menghemat air, sebaiknya jamban di perkotaan sudah memakai teknologi yang berbeda. Sumber air di Kelurahan Rancanumpang berasal dari sumur bekas persawahan. Kualitas dan kuantitas air kurang baik apalagi di musim kemarau.

Diperlukan sumber air yang lain seperti PDAM atau sumur artesis. Kampanye hemat air melalui pembangunan sumur resapan atau biopori perlu terus ditingkatkan oleh kader, pengurus dan aparat.

(4) Jamban Membutuhkan Lahan sebagai Pembuang Kotoran dan Penyerapan Air Kotor

Jamban dan septiktank membutuhkan lahan untuk penampung kotoran, namun teknologi dibutuhkan untuk menyesuaikan penempatan jamban dan septiktank. Masyarakat telah memiliki kesadaran penuh tentang jamban dan septiktank sehingga beberapa warga memiliki septiktank dalam rumah karena keterbatasan lahan. Septiktank instan dengan system biofilter dapat menjadi pilihan di perkotaan karena dilengkapi dengan saringan sehingga air buangan yang dialirkan ke sungai telah memenuhi syarat.

(5) Komitmen Masyarakat Terhadap Kesehatan dan Pemerintah Melalui Petugas Mengenai Jamban Sehat

Menyediakan jamban sehat merupakan kebutuhan pokok manusia, Kewilayahan berperan aktif dalam membangun komitmen masyarakat untuk berubah dan memenuhi kebutuhan jamban. Warga sepakat bahwa jamban bagian harus ada dan dipunyai oleh tiap KK. Mendalami sebuah perilaku selalu berhubungan dengan struktur sosial, regulasi institusi dan kehidupan sehari-hari individu yang tertanam sangat lama (Wingens, Valk, & Aybek, 2011:7). Keterikatan ini merupakan hal terpenting dan selalu harus berlanjut. Masalah yang terjadi adalah pada saat pergantian kepengurusan dan aparat, maka diperlukan kembali waktu untuk beradaptasi, namun apabila perilaku penggunaan jamban sehat telah tertanam dalam setiap individu di masyarakat, maka penggunaan jamban sehat terus berlanjut.

(6) Pemerintah Melalui Kelurahan dan Puskesmas Mendatangkan Tenaga Teknis untuk Membantu Menciptakan Kondisi Jamban Sehat

Masalah jamban secara teknis ada di kelurahan, DPKP3 berkoordinasi dengan kelurahan RW dan RT bila ada pembangunan dan pendataan tentang

kebutuhan jamban, usulan tentang jamban datang dari kelurahan dan RT RW setempat, masyarakat biasanya meminta, tenaga teknis dihadirkan pada pembangunan jamban baru. Cara kerja jamban diawasi baik milik pribadi atau umum sehingga tidak menimbulkan pencemaran pada awal pembangunan bantuan.

Puskesmas memiliki teknis sanitasi, namun warga belum memanfaatkannya. Sanitarian secara rutin melakukan inspeksi sanitasi untuk menilai kondisi masyarakat dalam menggunakan jamban dan melakukan pemantauan terutama saat terjadi pencemaran dan timbulnya kesakitan.

(7) Keterampilan yang Terkait dengan Kesehatan Merupakan Kemampuan Masyarakat dalam Menyediakan Jamban Sehat

Salah satu ciri masyarakat perkotaan adalah mandiri dan cerdas yaitu kota yang menggunakan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan perkotaan. Saat ini, sistem yang dibangun lebih banyak menggunakan "tools" untuk memudahkan pengelolaan kota (Joga, 2017). Masyarakat Kelurahan Rancanumpang mampu mengatasi permasalahan fungsi jamban seperti kebocoran dan pencemaran secara swadaya meskipun meminta bantuan tukang bangunan. Masyarakat tahu tindakan yang harus diambil untuk mendapatkan bantuan menanganai kerusakan jamban. Masyarakat mampu menyediakan dan mencari jamban sesuai syarat kesehatan hanya tergantung dari pendapat tukang dan toko bahan material.

(8) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Termasuk Fasilitas Kesehatan Bagi Masyarakat Merupakan Komponen Pendukung dalam Praktek Penggunaan Jamban Sehat

Pemerintah memberikan pengetahuan berupa maket jamban dan penjelasannya seperti klinik sanitasi di setiap Puskesmas, leaflet contoh jamban dan bantuan fisik pembangunan jamban sehat. Pemerintah memberikan bantuan penyediaan jamban sehat bagi masyarakat yang tidak mampu setelah adanya perubahan perilaku dan komitmen akan bertanggung jawab pada pemeliharannya. Lurah dan Camat mengusulkan dan memisahkan berdasarkan

kategori penduduk mampu dan tidak mampu, sesuai usulan RT/RW, diusulkan melalui musrenbang, biaya dapat dari APBD atau APBN.

Pemenuhan ketersediaan akses sarana jamban, septiktank dan air bersih tidak terlepas dukungan PKK. Kelurahan Rancanumpang memiliki kompleks perumahan sebanyak 6 RW, perumahan biasa atau warga lokal sebanyak 2 RW. Kader PKK melakukan pendekatan untuk RW 01 dan 02, RW lain mendukung karena memang kompleks rata-rata sudah mampu.

b. Faktor Penguat

Faktor penguat yaitu merupakan faktor yang memberikan dukungan terhadap jamban sehat. Beberapa faktor penguat dalam mewujudkan perilaku jamban sehat yaitu :

(1) Struktur

Pemerintah melalui Kemenkes mempunyai penanggung jawab yang bertugas secara berjenjang kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten dalam hal teknis dan kebijakan terkait fungsi jamban.

Pemerintah melalui kelurahan dan puskesmas mempunyai penanggung jawab jamban dalam program sanitasi total yang bertugas memastikan fungsi jamban di masyarakat berjalan dengan baik, namun program tersebut berada di Seksi Ekonomi Pembangunan, Lingkungan Hidup dan Kemasyarakatan di Kelurahan dan Kecamatan.

Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan DPKP3 untuk menyelesaikan permasalahan sarana yang dibutuhkan masyarakat. Kesehatan dan ilmu kesehatan, menjadi bagian dari proses pembangunan manusia. Melepaskan penderitaan dan mencapai kenikmatan hidup sosial ekonomi yang dapat menjamin upaya kesehatan masyarakat dan lingkungan menyeluruh "holistik" dan keterkaitan struktural dan fungsional "sistemik" (Loedin, 1982:11; Foster, 1986: 45).

Struktur kemasyarakatan yang kuat akan mendorong keberhasilan perilaku jamban sehat. Struktur sosial, sejarah pemukiman, penggunaan lahan, mata pencaharian, dan akses dan persepsi tentang kebersihan masyarakat, peran

partisipasi membuat masyarakat mau menyumbangkan tanah untuk membuat sarana jamban umum (Awunyo-Akaba, Y; 2016). Bergerak bersama antara aparat, pengurus dan partisipasi masyarakat menentukan keberhasilan penggunaan jamban sehat di masyarakat. Partisipasi dalam program jamban ditujukan untuk mencapai status kesehatan didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan kesehatan. Kebutuhan akan kesehatan mendukung adanya organisasi pelayanan kesehatan yang tumbuh dimasyarakat dan dilakukan oleh masyarakat sendiri atas bantuan tenaga kesehatan (Notoatmojo, 2012:125).

(2) Agen

Keberhasilan masyarakat dalam menggunakan jamban sehat tidak terlepas dari agen-agen yang berperan. Kemenkes memiliki tenaga ahli dalam memberikan bantuan mengatasi permasalahan jamban sesuai ruang lingkupnya, melakukan monitoring evaluasi secara berjenjang.

Tenaga ahli dalam bidang sanitasi dari Dinas Kesehatan yaitu bagian STBM dan tenaga ahli DPKP3 adalah PSAB dalam mengatasi permasalahan jamban, sedangkan di kewilayahan, tenaga ahli belum ada hanya di bawah koordinasi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan Kemasyarakatan.

Tingkat Puskesmas memiliki tenaga ahli harian dalam mengatasi permasalahan jamban yaitu sanitarian yang setiap hari dibantu Petugas Germas. Namun keterbatasan tenaga dan luasnya wilayah menyebabkan belum semua RW terlayani dengan baik.

(3) Peraturan

Peraturan secara rinci belum ada baik Perda maupun Perwal, tetapi mengacu pada Permenkes No 3/2014. Pemerintah Kota Bandung membentuk Kelompok Kerja dengan Keputusan Wali Kota Bandung No. 648/Kep.1076-BAPPELITBANG/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan, Kawasan Permukiman, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, sebagai upaya percepatan dalam mewujudkan *Open Defecation Free* bagi kelurahan lainnya.

Dasar pelaksanaan perilaku penggunaan jamban sehat di masyarakat tertuang dalam Undang-undang No 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman memuat Program 100-0-100, Undang-undang Kesehatan No 32/2009, PP Kesehatan Lingkungan No 66/2014, Peraturan Menteri Kesehatan No. 3/2014 tentang STBM dan Peraturan Daerah No. 11/2005 tentang Penyelenggaraan Kertiban, Kebersihan dan Keindahan.

Pemerintah negara-negara maju telah sepakat untuk meningkatkan jamban sehat dan mengimplementasikannya melalui kebijakan publik yang harus diterima oleh berbagai kalangan masyarakat (Smets, 2010). Peraturan sangat penting demi terwujudnya pemerataan penggunaan jamban sehat.

(4) Keluarga

Pemahaman yang sama di setiap keluarga Kelurahan Rancanumpang memudahkan setiap penduduk memahami pentingnya menggunakan jamban sehat. Keluarga melakukan peraturan penggunaan jamban sehat sesuai ketentuan. Setiap keluarga memiliki aturan tersendiri terhadap anggota keluarga tentang kebersihan jamban. Responden di Kelurahan Rancanumpang didominasi oleh ibu-ibu sebesar 48.76 % tidak bekerja dan kecenderungan aturan dan pengetahuan mengenai jamban sehat diberikan oleh ibu-ibu. Salah satu ibu responden sedang diberikan penyuluhan oleh salah seorang kader terkait dengan jamban sehat.

Warga banyak menunjukkan kesadaran tinggi, melahirkan perilaku menguntungkan kesehatan. Robertson dalam tulisannya "*Social Aspect of Health and Illness*" menyatakan ada 4 hal yang membuat seseorang tertarik kepada upaya kesehatan: (1) Ada penilaian orang bersangkutan terhadap sesuatu gangguan atau ancaman atas fungsi kesehatannya; (2) Timbulnya kecemasan terhadap kejadian tersebut; (3) Penerapan pengetahuan orang bersangkutan dengan masalah kesehatan, khususnya gangguan yang dialaminya; (4) Dilakukannya tindakan manipulatif meniadakan gangguan tersebut. Model perilaku kesehatan masyarakat Indonesia menggabungkan individu dan lingkungan sosial saling berpengaruh. Perilaku individu selalu dalam

jaringan norma sosial tertentu. Pertama, perilaku kesehatan individu, sikap dan kebiasaan bertindak berkaitan erat dengan keterikatannya dalam tiga lingkungan berikut; Kedua, lingkungan keluarga; Kebiasaan-kebiasaan mengenai kesehatan; Ketiga, lingkungan terbatas: Tradisi khusus mengenai cara mengobati orang sakit, definisi khusus apa itu sakit dan pengobatan serta pranata puskesmas; Keempat, lingkungan umum: Undang-undang kesehatan serta program kesehatan dan gizi (Sunaryo, 2002).

Kota Bandung merupakan lingkungan kota yang relatif modern telah mendorong warganya untuk mempertahankan keberadaan dengan menempuh kehidupan yang sekuler, melonggarkan relasi-relasi sosial dan dalam keluarga, sehingga fungsi keluarga digantikan oleh institusi sosial yang sudah mapan di kota (Garna, 2002:100). Namun, keberhasilan di Kelurahan Rancanumpang, kehidupan kekeluargaan masih dapat dipertahankan dengan bukti bahwa kader RW yang telah mapan bahu membahu mendorong dan mengupayakan bantuan jamban bagi warga yang kurang mampu. Hal ini sejalan dengan pendapat McClelland menyebutkan bahwa dalam era modern, sebuah mental yang kuat adalah modal sumber daya manusia yang memiliki nilai tinggi disebut juga "n achievement" yang berarti motivasi, semangat dan dorongan berbuat lebih baik dan lebih baik lagi. Prinsip ini menekankan bahwa perbuatan tidak hanya mengikuti tradisi yang sudah ada tetapi berbuat dengan cara baru yang lebih baik dan memberi manfaat bagi banyak orang.

Gagasan ini beranggapan bahwa apabila seseorang berbuat, maka manfaat dari perbuatannya tidak hanya untuk dirinya dan keluarganya tetapi juga untuk masyarakat. Daya psikokultural yang dibangun adalah bermanfaat untuk lebih banyak orang. N achievement merupakan sebuah pola yang dapat ditularkan pada pikiran orang lain dengan cara pendidikan, pelatihan dan bahan bacaan. N Achievement semacam perubahan kultural dan merupakan sebuah instrument penting

dalam rangka melakukan perubahan pada yang lebih baik (Marzali, 2007:98).

(5) **Penyedia Layanan Kesehatan Merupakan Petugas yang Memfasilitasi Peningkatan Penggunaan Jamban Sehat.**

Puskesmas dapat memberikan bantuan teknis terkait jamban sehat dari sisi konsultasi, bukan pembangunan fisik, karena sebaiknya mandiri. Namun, selama ini puskesmas baru sebatas pendataan dan inspeksi sanitasi. Bantuan teknis diberikan apabila ada pembangunan sarana baru bekerjasama dengan kewilayahan. Masyarakat belum memanfaatkan Puskesmas sebagai penyedia layanan terkait sanitasi tetapi lebih kepada program kesehatan seperti posyandu.

D. PENUTUP

Berdasarkan kajian dan pembahasan dari hasil penelitian, maka peran faktor pemungkin dan faktor penguat pada keberhasilan *Open Defecation Free* di Kelurahan Rancanumpang adalah penduduk sudah memiliki potensi kesadaran dengan keteraturan daerahnya dalam memenuhi fasilitas akses jamban bagi keluarganya. Masyarakat sebanyak 6 RW dari 8 RW telah memiliki jamban dan septiktank. 2 RW lainnya mendapatkan bantuan kelurahan dalam memenuhi septiktank sebagai faktor pemungkin. Peran Lurah sebagai agen dalam mengelola masyarakat dan melakukan kerjasama lintas sektor menjadi faktor penguat dalam mendorong warga dibantu kader aktif juga pengurus mendukung keberlanjutan *Open Defecation Free*.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan RI, masyarakat Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gede Bage Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, M., Begum, A., Chowdhury, M. A., & I. (2010). Social constraints before sanitation improvement in tea gardens of sylhet, Bangladesh. *Environmental Monitoring and Assessment*, 164(1-4), 263-71. doi:<http://dx.doi.org/10.1007/s10661-009-0890-0>. Diunduh [05/05/16]
- Anthropology; data from institute of public health provide new insights into anthropology. (2010). *Science Letter*, , 181. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/815303395?accountid=38628>. Diunduh [05/05/16]
- Awunyo-Akaba, Y., Awunyo-Akaba, J., Gyapong, M., Senah, K., Konradsen, F., & Rheinlander, T. (2016). Sanitation investments in ghana: An ethnographic investigation of the role of tenure security, land ownership and livelihoods. *BMC Public Health*, 16 doi:<http://dx.doi.org/10.1186/s12889-016-3283-7>. Diunduh [05/05/16]
- Badan Perencanaan Daerah Kota Bandung, (2005). *Bandung Dalam Angka*, Bandung: Bappeda.
- Bircher, J., & Kuruvilla, S. (2014). Defining health by addressing individual, social, and environmental determinants: New opportunities for health care and public health. *Journal of Public Health Policy*, 35(3), 363-86. doi:<http://dx.doi.org/10.1057/jphp.2014.19>. Diunduh [27/10/16]
- Blum, H. L. (1974). *Planning For Health, Development and Application of Social Change Theory*. New York: Human Science Press.
- Cohen, S., Underwood, L. G. & Gottlieb, B. H. (2000). *Social Support Measurment and Intervention*. New York: Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- de Sardan, J.-P. O. (2005). *Anthropology and Development*. UK: Zed Book Ltd.
- Dinas Kesehatan Kota Bandung. (2014). *Profil Kesehatan*, Bandung: Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Ecid Li, D. et al. (2013). *Future of Latrines and the Future of Civilization : Understanding Cultural Barriers and Opportunities in West Timor, An Anthriopological Survey of Sanitation in West Timor, Indonesia*, Kupang: Institute of Resource Goverenment and Social Change.
- Esrey, S.A., Gough, J., Rapaport, D., Sawyer, R., Hebert, M. S., Vargas, J., Winblad, U., (1998). *Ecological Sanitation*. Spanga : Sida
- Feraro, G., Andrea, Susan. (2010). *Cultural Anthropology An Applied Perspektif*. Belmont : Wadsworth
- Foller, M.-L. (1992). *Social Determinants of Health and Disease: The Role of*
- Foster, G. M. & Anderson, B. G. (2006). *Antropologi Kesehatan*. Jakarta: UI Press.
- Garna, J. K. (2002). *Teori-teori Perubahan Sosial*. Bandung: Primaco Akademika.
- Green, L. & Kreuter, M. (2005). *Health Program Planning, An Educational and Ecological Approach*. Fourth ed. New York: Mc Graw-Hill Companies Inc.
- Hulland, K. R. S., Chase, R. P., Caruso, B. A., Swain, R., Biswal, B., Sahoo, K. C., . . . Dreibelbis, R. (2015). Sanitation, stress, and life stage: A systematic data collection study among women in odisha, india. *PLoS One*, 10(11) doi:<http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0141883>. Diunduh [20/05/16]
- Hunter, P. R., & Prüss-Ustün, A. (2016). Have we substantially underestimated the impact of improved sanitation coverage on child health? A generalized additive model panel analysis of global data on child mortality and malnutrition. *PLoS One*, 11(10) doi:<http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0164571>. Diunduh [13/08/16]
- Iendra Sofyan. (2013). *Faktor-faktor penting Pengelolaan Sanitasi oleh Masyarakat di Kawasan Kumuh Perkotaan Bandung Raya*, Bandung: Prodi Teknik Lingkungan ITB.

- Jasper, C., Le, T., & Bartram, J. (2012). Water and sanitation in schools: A systematic review of the health and educational outcomes. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 9(8), 2772-87. Retrieved from <http://search.proquest.com/docview/1034898301?accountid=38628>. Diunduh [12/10/16]
- Jewwit, Sarah. (2011). Geographic of shit : Spatial and temporal variations in attitudes towards human waste. *Progress in Human Geography* 35(5)608-626. Retrieved www.sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav10.1177/0309132510394704 . Diunduh [06/02/16]
- Joga, N. (2017). Mewariskan Kota Layak Huni. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Kaiser, S.(2011). Water, Sanitation and Culture, Swiss: seecon international gmbh.
- Kiefer, C. W. (2007). *Doing Health Anthropology*. New York: Springer Publishing Company.
- Márcia Moisés, Débora, C. K., Simone, C. C., & Sandra Conceição, F. M. (2010). The federal politics of basic sanitation and the initiatives of participation, mobilization, social control, health and environmental education. *Ciência & Saúde Coletiva*, 15(5), 2581-2591. doi:<http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232010000500032>. Diunduh [12/10/16]
- Marzali, A. (2007). *Antropologi dan Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- McFarlane, C., Desai, R., & Graham, S. (2014). Informal urban sanitation: Everyday life, poverty, and comparison. *Association of American Geographers. Annals of the Association of American Geographers*, 104(5), 989. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/1553544160?accountid=38628>. Diunduh [08/11/16]
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2014). Permenkes No. 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total berbasis Masyarakat. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Minh, H. V., & Nguyen-Viet, H. (2011). Economic aspects of sanitation in developing countries. *Environmental Health Insights*, 5, 63. Retrieved from <http://search.proquest.com/docview/1038138276?accountid=38628>. Diunduh [18/06/16]
- Mungkasa, O.(2017). Peluang dan Tantangan Penanganan Permukiman Kumuh melalui Kemitraan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. [Online]
Available at: <http://tataruangpertanahan.com/pdf/pustaka/artikel/16.pdf>
[Accessed 18 February 2017].
- Nguyen-viet, H., Zinsstag, J., Schertenleib, R., Zurbrugg, C., Obrist, B., Montangero, A., . . . Tanner, M. (2009). Improving environmental sanitation, health, and well-being: A conceptual framework for integral interventions. *EcoHealth*, 6(2), 180-91. doi:<http://dx.doi.org/10.1007/s10393-009-0249-6>. Diunduh [12/02/16]
- Notoatmodjo, S. (2012). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ortner, S. B. (1984). Theories in Anthropology since the Sixties. *Comparative Study of Society and History*, Januari, Volume 26, pp. 126-166.
- Palnitkar, S. (1988). *New Culture of Urban Sanitation (CORO)* Mumbay India, Mumbay: The Mega Cities Project.
- Paul, B. D.(1977). The Role of Beliefs an Customs in Sanitation Programs. In: *Culture, Disease and Healing*. New York: Macmillan Publishing Co., Inc, pp. 233-236.
- Pizzirani, S., McLaren, S. J., & Seadon, J. K. (2014). Is there a place for culture in life cycle sustainability assessment? *The International Journal of Life Cycle Assessment*, 19(6), 1316-1330. doi:<http://dx.doi.org/10.1007/s11367-014-0722-5>. Diunduh [12/10/16]
- Sanjek, R.(2000). *Urban History, Culture and Urban Ethnography*. City and Society, pp. 105-114.
- Singer, M.(2015). *Anthropology of Infectious Disease*. USA: Left Coast Press Inc..

- Smets, H. 2010. The right to sanitation: A new human right in developed countries. *Environmental Policy and Law*, 40(2), 112. Retrieved from <http://search.proquest.com/docview/848216058?accountid=38628>. Diunduh [06/01/16]
- Soeparman dan Suparmin. (2002). *Pembuangan Tinja & Limbah Cair (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC
- Sorrentino, R. M., Cohen, D., Olson, J. M. & Zanna, M. P. (2005). *Culture and Social Behavior*. London: Lawrence Erlbaum Associates Publisher.
- Suparlan, P. (2004). *Masyarakat dan Kebudayaan Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Tratschin, R. (2011). *Water, Sanitation and Culture*, Swiss: seecon international gmbh.
- Tumanggor, R. (2010). Masalah-masalah sosial budaya dalam Pembangunan Kesehatan di Indonesia. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 12 No. 2 Tahun 2010, hal 231-254.
- UN: Providing safe drinking water, sanitation to 1 billion in next decade critical challenge for humanity, sustainable development summit told; fifth 'partnership plenary' questions why crucial resource receives little priority in planning, management -- part 1 of 2. (2002, Aug 30). M2 Presswire Retrieved from <http://search.proquest.com/docview/443903168?accountid=38628>. Diunduh [18/11/16]
- UNICEF Indonesia. (2012). *Air Bersih, Sanitasi dan Kebersihan*, Jakarta: UNICEF.
- USAID. (2016). *Urban Sanitation*, Amerika: USAID.
- van Klinken, G. & Berenschot, W. (2014). *In search in Middle Indonesia : kelas menengah di kota-kota menengah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Jakarta.
- van Vliet, B., Spaargaren, G. & Oosterveer, P. (2010). *Social Perspective on the Sanitation Challenge*. Dordrecht: Springer.
- Water and Sanitation Program, W. B. (2014). *Sanitation, Water Supply and Hygiene in Urban Informal Settlements*. Papua New Guinea: World Bank.
- IUWASH (2015). *Meningkatkan Gaya Hidup dan Kesehatan Sebuah Panduan Promosi Sanitasi Perkotaan*. Jakarta: Bappenas.
- Water and Sanitation Program. (2007). *Poor Sanitation Costs Indonesia Per Year*, Jakarta: WSP.
- Water and Sanitation Program. (2007). *Urban Sanitation, Portraits, Expectations and Opportunities*. 3rd ed. Jakarta: WSP-EAP.
- Water and Sanitation Program. (2009). *Buku Penuntun : Opsi Sanitasi yang Terjangkau untuk Daerah Spesifik*. 1st ed. Jakarta: WSP.
- Water and Sanitation Program. (2009). *Informasi Pilihan Jamban Sehat*. Jakarta: WSP.

KOMUNIKASI BUDAYA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DI KOTA PARIAMAN

Widya Hasan^{1*}, Asmawi², Najmuddin Rasul³

Submitted Article: 30 August 2018

Reviewed Article: 22 November 2018

Accepted Article: 18 December 2018

Abstract

Downward trend voter participation in the election of the Governor and Deputy Governor of West Sumatra Province in Kota Pariaman needs special attention, because percentage of voters who use votes at polling stations is still a benchmark for the amount of public trust in the elected regional heads through the election mechanism. Therefore is needed communication pattern that can provide understanding and educating the public about the importance of exercising voting rights during elections. Like a pattern of socialization that puts forward a cultural approach (Local Wisdom) that can inspire people to use their voting rights at TPS. This research method is descriptive qualitative that aims to understand and interpretation the meaning of events, interactions and human behavior through communication with cultural approaches. That form of 'Ciloteh Lapau' which is one of the media for election socialization and education to increase voter participation in Kota Pariaman.

Keywords: Culture Communication, Governor Election, Voter Participation, Pariaman

A. PENDAHULUAN

Pemilu merupakan perhelatan lima tahunan yang diselenggarakan untuk memilih pemimpin apakah itu kepala daerah, Anggota DPR, DPRD, DPD dan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat, karena dengan pemilu rakyat dapat memilih pemimpin secara langsung dengan cara menggunakan hak pilihnya di TPS.

Dalam menyelenggarakan pemilu, perlu dilakukan pendidikan pemilih untuk menanamkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya menggunakan hak pilih pada pemilu diperlukan suatu upaya yang nyata dan langsung menyentuh masyarakat itu sendiri dalam pelaksanaannya. Salah satu upaya yang ditempuh melalui pendidikan pemilih adalah dengan melaku-

kan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tujuannya agar untuk mengedukasi dan menginformasikan bahwa dengan berpartisipasi dalam pemilu merupakan suatu wujud pelaksanaan tanggungjawab sebagai Warga Negara. Pemilu merupakan mekanisme pergantian pemimpin secara sistematis.

Dimasyarakat Minang Kabau, khususnya di Pariaman sosialisasi pemilu perlu dilakukan dengan menggunakan pendekatan budaya, karena kebiasaan dan pola sosial masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap suksesi dari kelancaran pemilu di suatu daerah. Tidak dapat dipungkiri, tinggi atau rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu memiliki korelasi terhadap pemahaman masyarakat akan pentingnya mensukseskan pemilu di masing-masing daerah.

Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, adapun pemilu meliputi Pemilihan Anggota DPR/ DPD/ DPRD, serta

¹ Graduate Student of Communication Science, FISIP, Universitas Andalas, Padang.

² Department of Communication Science, FISIP, Universitas Andalas, Padang.

³ Faculty of Law, Universitas Andalas, Padang.

* Corresponding Author: widyahasan38@gmail.com

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945 (Asshiddiqie, 2006:236).

Dalam menyelenggarakan pemilu, KPU memiliki tugas dan kewajiban untuk melayani masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Untuk itu dibutuhkan suatu pola komunikasi yang dirancang untuk dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Artinya sebagai lembaga Negara, KPU berupaya membangun komunikasi Agar setiap pogram kerja yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari masyarakat.

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa komunikasi merupakan cara interaksi manusia dengan sesamanya. Komunikasi merupakan suatu proses pernyataan antar manusia untuk menyatakan pikiran, perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya (Effendy. 1993:28). Sedangkan kaitan antara komunikasi dan budaya dilihat pada cara hidup manusia disuatu tempat, meliputi, bahasa, kebiasaan, dan pola pikir juga dipengaruhi oleh kebiasaan yang melekat di suatu daerah. Jadi pada dasarnya budaya merupakan landasan komunikasi, bila budaya beraneka ragam, maka beraneka ragam pula praktik komunikasi (Mulyana, 2010:38)

Untuk itu perlu disusun suatu format kegiatan yang bersifat informatif dengan tujuan agar menggugah kesadaran masyarakat (persuasif) agar menggunakan hak pilihnya di TPS sebagai suatu perwujudan pelaksanaan kewajiban warga Negara untuk menggunakan hak pilihnya dalam rangka berpartisipasi untuk memilih pemimpin yang akan mengepalai pemerintahan untuk lima tahun kedepan.

Adanya hubungan timbal balik (*reciprocal*) antara komunikasi dan budaya. Yang akan berpengaruh terhadap persepsi yang akan memungkinkan pemberian

makna (Pemaknaan) yang cenderung mirip (sama) pula terhadap suatu realitas sosial atau peristiwa. Sehingga dengan sendirinya akan mempengaruhi cara dan praktek berkomunikasi (Porter & Larry, 1998:25).

Sebagaimana diungkapkan oleh Samovar dan Porter ada beberapa hal yang mempengaruhi komunikasi dan budaya yaitu;

- a. Nilai (*Value*)
Nilai kebudayaan adalah sebagai aspek evaluatif dari sistem-sistem kepercayaan yang ada di masyarakat.
- b. Sikap (*Attitude*)
Kepercayaan dan nilai berkontribusi pada pengembangan sikap. Realitas dan konteks budaya akan membentuk perilaku.
- c. Pandangan (*World View*)
Adanya pandangan yang sama terhap konsepsi budaya yang ada dan berkembang dalam masyarakat seperti kesamamaan makna akan nilai, sikap, budaya, sehingga adanya kesamaan persepsi terhadap suatu pandangan terhadap budaya yang sama (Mulyana & Rakhmat.1982:25-29).

Berkaca dari beberapa kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman, adanya kecenderungan pelaksanaan sosialisasi sering dirumuskan dalam pola linear (satu arah) dengan bentuk propaganda saja. Pola linear tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menanggapi atau sekedar mengkroscek informasi pemilu yang diperoleh. Sehingga ambiguitas atau ketidak pahaman akan proses pelaksanaan pemilu dapat diminimalisir dengan ketersediaan informasi yang mampu mengurangi ketidak pahaman masyarakat akan pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilu sehingga berujung pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Maka dari itu perlu dirancang dan rumuskan suatu konsep pesan yang bersifat *edutainment*, yaitu pola komunikasi disusun untuk lebih menekankan pada aspek edukasi dan tidak lupa menyematkan konsep hiburan agar komunikasi yang

dibangun menjadi menarik dan menyenangkan. Sehingga perlu dirancang satu pola komunikasi melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan dengan merancang suatu konsep kegiatan (*packaging*) pesan yang dibuat dengan menarik. Selain itu pemilihan saluran (media) juga mempengaruhi sejauh mana informasi yang disampaikan mampu mempengaruhi minat masyarakat yang tadinya apatis dengan pelaksanaan pemilu yang akan menghasilkan pemimpin yang mampu menghasilkan kebijakan yang akan membawa perubahan bagi masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu perlu dilakukan upaya persuasif dan edukatif kepada masyarakat agar timbul kesadaran dan kesukarelaan untuk menggunakan hak pilihnya, karena partisipasi masyarakat berkaitan erat dengan keberhasilan pemilu.

Sebagaimana diungkapkan oleh Alo liliweri dalam dasar-dasar komunikasi Adapun tujuan komunikasi antar budaya meliputi:

1. Meningkatkan pengetahuan akan budaya yang berbeda dengan budaya kita;
2. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman agar dapat berkomunikasi dengan baik (Komunikatif).
3. Mampu menjelaskan kendala dan permasalahan antar budaya.

Melalui pendekatan budaya dan komunikasi yang baik, diharapkan pelaksanaan Pemilihan Umum dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Hal ini dikarenakan Pemilu merupakan perwujudan partisipasi politik masyarakat menurut *Verba* dan *Nie* bahwa Partisipasi Politik sebagai *cornerstone* dan jantung demokrasi. Sementara itu, dilain sisi, *Halender* mengungkapkan bahwa partisipasi politik merupakan prasyarat utama dalam sebuah Negara demokrasi, serta dipertegas oleh *Sylvester* dan *McGlynn* yang menyatakan bahwa demokrasi tidak akan bermakna apa-apa dan legitimasi tanpa ada partisipasi warga dalam proses demokrasi. Dengan kata lain, tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan perwujudan legitimasi dan kepercayaan

masyarakat terhadap kepala daerah yang terpilih sebagai pemenang dalam pilkada (Najmuddin.2015:193).

Budaya merupakan suatu sistem ide, nilai, kepercayaan, struktur dan praktik yang dikomunikasikan suatu generasi ke generasi berikutnya untuk menopang cara hidup tertentu. Budaya muncul ketika cara hidup yang berbeda membentuk apa yang dipercaya, dihargai dan dilakukan oleh sekelompok orang.

Pola komunikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Pariaman dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu sangat bergantung pada upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Pariaman dalam mengedukasi masyarakat untuk menjalankan hak konstitusinya sebagai warga Negara dengan terlibat aktif dalam pelaksanaan pemilihan Umum dan dengan kesadaran yang tinggi menggunakan hak pilihnya sesuai dengan TPS terdaftar sebagai pemilih yang disesuaikan dengan tempat tinggal (domisili).

Terkait dengan perolehan suara dan partisipasi masyarakat dalam pemilu disajikan dalam tabel berikut ini tentang perolehan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Kota Pariaman.

Tabel 1.
Perbandingan Partisipasi Pemilih di Kota Pariaman dari Tahun 2010 dan 2015

Pilgub	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Persentase (%)
2010	30.394	52.66%
2015	31.630	53.16%

Sumber: KPU Provinsi Sumbar

Dari data diatas dilihat adanya peningkatan partisipasi pemilih dikarenakan adanya perubahan pola komunikasi yang dilakukan sehingga terjadi peningkatan partisipasi pemilih sebesar 1,50% jika dibandingkan dengan tahun 2010. Pentingnya pelaksanaan sosialisasi dalam pemilu berperan sebagai upaya untuk melakukan edukasi dan mempersuasi masyarakat agar

menyadari manfaat menggunakan hak konstitusinya dalam pemilu. Karena setiap daerah memiliki budaya dan kearifan lokal yang menjadi pemersatu bagi masyarakat.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu, maka diperlukan suatu konsep komunikasi dengan mengedepankan budaya masyarakat (kearifan lokal) sehingga pemilu yang dilaksanakan dapat menjangkau masyarakat secara keseluruhan dan mengakomodir aspek sosial dan budaya yang telah lekat dengan keseharian masyarakat.

Adapun upaya yang dilakukan untuk menjangkau masyarakat secara keseluruhan untuk menimbulkan motivasi dan meningkatkan kesadaran untuk menggunakan hak politiknya adalah dengan melakukan sosialisasi dengan mengedepankan pendekatan budaya.

Untuk mengukur efek komunikasi yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi '*Ciloteh Lapau*' maka perlu dilihat kembali, apabila *audience* yang dituju sangat beragam, karena dalam kegiatan ini seluruh masyarakat yang ada di lapau saat itu dapat berperan dalam kegiatan yang diselenggarakan KPU Kota Pariaman. Seperti ditekankan diatas kegiatan *Ciloteh Lapau* dilaksanakan melalui metode diskusi yang dihadiri kalangan masyarakat dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang beragam pula, maka perlu diukur seberapa efektif suatu kegiatan sosialisasi mampu memberikan pemahaman, mendidik masyarakat tentang kesadaran akan hak politiknya.

Melalui *Teori Komunikasi Massa* sebagaimana diungkapkan Marvin D'Flour untuk mengukur pengaruh (*effect*) komunikasi terhadap kehidupan masyarakat terhadap terpaan informasi yang serempak (Rivers, William. 2004:32).

Khusus untuk masyarakat Kota Pariaman yang terkenal dengan kebiasaan nongkrong dilapau untuk sekedar berbincang (*maota-ota*) dan membahas berbagai macam hal yang tengah terjadi di kehidupan masyarakat saat itu. Sehingga lapau menjadi sebuah institusi penting dalam pergaulan masyarakat.

Sebagaimana ungkapan yang menyatakan bahwa 'Silat kata berbeda dengan silat lidah, dalam makna yang lebih spesifik. *Silat katanya memiliki makna positif. Dipakai oleh Niniak Mamak (pimpinan kaum atau suku) dalam dialog adat atau retorika di hadapan kaumnya, dan bertutur ke kemenakan.*' (Yose Hendra, 2017)

Sedangkan Silat lidah di lapau mengunyah beragam isu dan persoalan, lalu dimuntahkan dalam riak-riak kata seperti debat kusir. Untuk masyarakat Kota Pariaman Lapau merupakan institusi penting dalam membangun suatu konstalasi sosial, politik yang langsung bersinggungan dengan masyarakat secara luas. Atau sering dikenal dengan akar rumput, karena keberadaanya yang begitu lekat dengan masyarakat.

Dilapau masyarakat dapat mengekspresikan apa yang mereka rasakan melalui dialogh secara demokratis karena ruang debat di lapau bisa dikatakan perwujudan bertutur tidak teratur yang dibungkus metafora candaan yang bersifat cemeeh, mendukung atau menjatuhkan lawan bicara adalah hal biasa yang kita temui.

Mencermati hal itu KPU Kota Pariaman selaku Penyelenggara Pemilu melihat bahwa salah satu upaya yang bisa ditempuh untuk memberikan pendidikan kepemiluan kepada masyarakat dapat dilakukan melalui upaya pendekatan budaya dengan membangun komunikasi yang afektif melalui mekanisme diskusi yang berkaitan erat dengan pelaksanaan pemilu yang dapat dilakukan dilapau dengan metode "*Ciloteh Lapau*" adalah suatu upaya untuk menampung semua aspirasi dan unek-unek masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang sedang dilaksanakan. Dengan melaksanakan diskusi langsung dengan masyarakat bertujuan untuk memberikan pengaruh yang besar terhadap kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya di TPS pada saat pemungutan suara dilaksanakan.

Sebagaimana kita pahami bersama, pentingnya memilih saat pemilu adalah untuk mendapatkan pemimpin yang akan

diberi amanah untuk memimpin masyarakat untuk lima tahun mendatang. Kemajuan dan kemunduran daerah juga bergantung pada kebijakan yang dihasilkan selama kepemimpinannya. Untuk itu masyarakat sebagai pemegang hak pilih harus memahami betapa berperannya satu suara yang dimilikinya untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang.

Melalui sosialisasi dan diskusi secara langsung dengan masyarakat ini diharapkan mampu menampung aspirasi dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilu.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini telah dilaksanakan di Kota Pariaman. Alasan pemilihan Lokasi Penelitian ini dikarenakan pada tahun 2015 Kota Pariaman mengalami peningkatan jumlah partisipasi pemilih sebesar 1.50% jika dibandingkan dengan Pemilihan Gubernur yang diadakan pada tahun 2010.

Peningkatan partisipasi pemilih ini berkaitan erat dengan pola komunikasi yang dibangun oleh KPU Kota Pariaman selaku penyelenggara pemilu dengan masyarakat. Dimana biasanya sosialisasi pemilu dilakukan lebih menekankan pada aspek formal saja, namun pada Pilgub tahun 2015 dirobah dengan melakukan pendekatan budaya yang ada, sehingga informasi yang berkaitan dengan pemilu dapat diketahui masyarakat secara luas. Tidak hanya bersifat eksklusif pada beberapa orang saja.

Sebagaimana yang diungkapkan Joseph De Vito ada dua tujuan pembicaraan persuasif yaitu Pembicaraan untuk memperkuat atau mengubah sikap atau kepercayaan Banyak pembicaraan yang ditujukan untuk memperkuat pembicaraan sikap atau kepercayaan yang sudah ada. Sementara itu, pembicaraan yang dirancang untuk. Mengubah sikap dan kepercayaan lebih sulit (Devito.1997:447). Kebanyakan orang menolak perubahan. Oleh karena itu perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip berikut:

1. Perkirakanlah dengan cermat tingkat sikap dan kepercayaan komunikan.

2. Upayakan perubahan sedikit demi sedikit.

3. Berikan alasan yang meyakinkan untuk membuat komunikan mempercayai apa yang Anda inginkan.

Desain penelitian ini bersifat kualitatif bertujuan untuk memahami objek secara mendalam. Sedangkan metode penelitian bersifat deskriptif dimana penelitian ini tidak bertujuan untuk mencari dan menjelaskan hubungan atau menguji hipotesis. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa, interaksi dan tingkahlaku manusia dalam situasi tertentu (Sugiyono, 2016).

Seperti yang diungkapkan Sugiyono bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada model postpositivisme. Yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang bersifat alamiah (Sugiyono, 2016).

Adapun unit analisis dalam penelitian ini merupakan suatu yang berkaitan dengan fokus/ komponen yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data yang akurat (Moleong, 2005).

Menurut Suprayogo, unit analisis dalam penelitian dapat meliputi individu, kelompok dan organisasi, benda dan waktu sesuai dengan fokus permasalahannya (Moleong, 2005).

Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga (KPU Kota Pariaman) sebagai penyelenggara pemilu di tingkat Kota Pariaman. Bagaimana membangun komunikasi dengan pendekatan budaya untuk mensosialisasikan pemilu yang untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat di tingkat Kota pariaman.

Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil didasarkan atas pertimbangan tertentu. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1. Daftar Informan Yang Berhasil Diwawancarai

No	Nama	Jabatan
1	Boedi Satria, SE	Ketua KPU Kota Pariaman
2	Hendri Jalal, S.Pd,MM	Sekretaris
3	Akhirulsyah, SH	Kasubbag Teknis dan Hupmas
4	Sulas Sri Netti, SH	Staf Teknnis dan Hupmas
5	Masyarakat Kota Pariaman	Yang telah mengikuti Pemilu

Sumber: Data Primer, 2018.

Pemilihan sampel berkaitan erat dengan peran masing-masing dalam pelaksanaan pemilu di Kota Pariaman. Yang dilihat dari tugas dan fungsinya yaitu;

1. Ketua KPU Kota Pariaman bertugas sebagai penanggungjawab pelaksanaan pemilu secara melembaga
2. Sekretaris KPU Kota Pariaman bertugas untuk memfasilitasi, membantu pelaksanaan setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemilu dengan mempersiapkan SDM, anggaran dan Tim Kerja yang bertugas untuk menjalankan semua aktivitas yang berkaitan dengan suksesnya pelaksanaan pemilu.
3. Kasubbag Teknis & Hupmas adalah kepala bagian yang memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat secara keseluruhan.
4. Staf subbagian Teknis & Hupmas adalah SDM yang bertugas untuk melaksanakan setiap kegiatan yang dibutuhkan dalam melaksanakan pendidikan pemilih.
5. Masyarakat adalah sasaran yang dituju untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pemilu untuk kelangsungan kehidupan bersama.

Untuk memberi penjelasan yang rinci terhadap permasalahan yang diteliti. Maka dilakukan pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam (*depth interview*). Dengan informan. Selain itu juga dilakukan metode observasi terhadap relaitas sosial yang berkaitan erat dengan tingkat pengetahuan, perilaku dan potensi budaya yang ada di masyarakat juga menjadi bahan masukan untuk melihat sejauhmana komunikasi budaya berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi pemilih di masyarakat.

Selain pengumpulan data primer, dilakukan juga pengumpulan data sekunder yang diperoleh dan diolah dari dokumen kepemiluan, literature dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian.

Sedangkan teknis analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan pelacakan dan pengaturan transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan yang dikumpulkan agar dapat diinterpretasikan sebagai suatu temuan penelitian (Sugiyono, 2016).

Analisis data merupakan pengorganisasian data yang sudah dikumpulkan dan diatur sebagai satuan yang dapat dikelola untuk menentukan apa yang penting dan diputuskan sebagai hasil yang menjadi temuan dalam penelitian.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini Menggunakan metode Miles & Hubberman yang terdiri atas tiga unsur yaitu;

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Penarikan kesimpulan

Tiga siklus analisis data yang dikemukakan oleh Miles & Hubberman dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mencari hubungan dan menemukan pola dengan cara memilih dan memilah data hasil wawancara dari informan selanjutnya dilakukan pemisahan informasi yang terkait dengan pola komunikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Pariaman dalam mensosialisasikan pemilu dengan mengedepankan komunikasi budaya untuk menarik animo masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 di Kota Pariaman.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan responden, maka didapat beberapa pola komunikasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan sosialisasi pemilu dengan pola komunikasi langsung. Pendekatan budaya dilakukan sebagai upaya agar masyarakat dapat menerima informasi yang berkaitan dengan pemilu melalui komunikasi tatap muka. Konsep komunikasi ini dilakukan dengan menyesuaikan pada latar sosial budaya masyarakat di pariaman yaitu 'ngobrol' di lapau.

Komunikasi langsung dengan berlatar lapau sebagai tempat pelaksanaan sosialisasi pemilu, dengan setting komunikasi berlatar sosial yang biasa dilakukan masyarakat ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk memahami bagaimana pentingnya pemilu untuk kelangsungan kehidupan bersama, karena pemilu tujuannya untuk menghasilkan pemimpin yang akan membuat berbagai macam keputusan yang akan berpengaruh terhadap kemaslahatan masyarakat banyak.

Selanjutnya data yang telah diperoleh dikelompokkan sesuai dengan kegiatan sosialisasi pemilu yang dilakukan berdasarkan konsep sosialisasi pemilu dengan mengedepankan pendekatan budaya yaitu diskusi langsung dengan masyarakat (*two way symmetric Communication*) dengan melihat adanya umpan balik (*feedback*) yang diberikan oleh masyarakat terkait dengan pelaksanaan sosialisasi pemilu oleh KPU Kota Pariaman. Tujuannya untuk menangkap aspirasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu, sehingga mampu mengedukasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di TPS secara berkesinambungan jika pemilu dilaksanakan di Kota Pariaman.

Dengan membangun komunikasi dua arah diharapkan akan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pemilu untuk kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. HASIL DAN TEMUAN

Dalam pelaksanaan pemilu dibutuhkan suatu pola komunikasi yang menjain adanya interaksi langsung langsung antara masyarakat dengan KPU Kota Pariaman. Sehingga mereka dapat secara bebas menyatakan perasaan dan pendapat mereka terhadap proses pelaksanaan pemilu yang seringkali tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan.

Pada saat pemilu para calon yang maju sebagai kepala daerah turun ke masyarakat hanya ketika pemilu dilaksanakan saja. Tujuannya tak lain hanya untuk mendulang suara agar menang dalam pemilu. Namun setelah terpilih sebagai kepala daerah, mereka sering lupa akan janji yang sudah diucapkan.

Kondisi seperti ini menimbulkan sikap apatis pada masyarakat untuk memilih kepala daerah. Karena masyarakat merasa mereka adalah komoditi politik yang perlu didekati apabila pemilu tiba untuk diambil simpatinya. Agar terpilih dan memenangkan pertarungan sebagai kepala daerah dalam pemilu.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Aldi Masyarakat Pariaman Timur yaitu; *'Kebiasaan pasangan calon yang terpilih sebagai kepala daerah ketika sudah menjabat lupa dengan janji-janji yang disampaikan saat kampanye sebagai pasangan calon, hal ini menjadi penyebab enggannya masyarakat untuk memberikan suaranya saat pelaksanaan pemilu, sebagaimana ungkapan "Bak kato urang awak, kato biaso duto, janji biaso mungka"'*.

Sebagaimana diungkapkan Susi, masyarakat Pariaman Selatan, keseringannya calon kepala daerah akan sering turun dan berbaur dengan masyarakat apabila musim pemilu telah tiba. Mereka akan mengadakan berbagai macam kegiatan sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan menjadi donator utama untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Namun akan lain ceritanya apabila mereka telah terpilih menjadi kepala daerah. Mereka akan jarang

berbaur dengan masyarakat dan bahkan ada kesan mereka menghindari dari kegiatan kemasyarakatan. *'Kalau ka mancalon biasnyo para calon ko tibo ka kampuang manyapo masyarakat, namun setelah duduak jadi pajabat lah lupo sajo jo masyarakat'*. Ungkapan seperti ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap calon yang terpilih menjadi kepala daerah yang hanya turun ke masyarakat jika ada maunya saja. Setelah menduduki jabatan yang diincarinya sering lupa dengan masyarakat yang telah memilih dan menjadikannya kepala daerah.

Realitas diatas merupakan suatu fenomena yang tidak terbantahkan, karena adanya kecenderungan pasangan calon lupa akan janji politik yang disampaikan ketika belum menjabat sebagai kepala daerah membuat masyarakat apatis bahwa pemilu dapat menghasilkan pemimpin atau kepala daerah yang akan mampu perobahan kearah yang lebih baik.

Fenomena ini menjadi tugas berat bagi KPU Kota Pariaman karena masyarakat suda memiliki pengalaman buruk dan terdoktrin bahwa siapa saja yang akan terpilih menjadi kepala daerah tidak akan memberikan perobahan apa-apa terhadap kepentingan rakyat. Karena masyarakat melihat ketika seorang calon telah memegang tampuk kekuasaan, maka ada kecenderungan hal utama yang mereka lakukan adalah bagi-bagi kekuasaan terutama dengan tim sukses yang telah mengantarkan mereka untuk sampai pada posisi kepala daerah. Sementara realisasi janji-janji politik yang disampaikan kepada masyarakat luas cenderung terabaikan bahkan sering tidak terealisasi sama sekali.

Merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin yang terpilih melalui mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan preseden buruk bagi perkembangan demokrasi. Karena politik selalu dikalkulasikan sebagai suatu hal yang bersifat untung rugi. Artinya masyarakat tidak lagi melihat bahwa pasangan calon yang maju sebagai calon kepala daerah yang akan mampu mengemban aspirasi dan memberikan perbaikan kehidupan

melalui kebijakan yang akan mereka hasilkan saat terpilih menjadi kepala daerah nantinya. Melainkan hanya akan menguntungkan bagi segelintir orang saja, misalnya tim sukses atau pendukung salah satu pasangan calon yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah.

D. PEMBAHASAN

Komunikasi pemilu dengan mengedepankan pendekatan budaya ditempuh sebagai suatu upaya untuk mengedukasi masyarakat Kota Pariaman agar memiliki kesadaran politik bahwa kepentingan seorang warga Negara yang sudah memenuhi syarat berdasarkan Undang-undang memiliki kewajiban untuk menunaikan kewajibannya dalam pemilu untuk menggunakan hak konstitusinya memilih pemimpin yang dirasa mampu mewakili aspirasi politiknya.

Salah satu pola komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi terkait dengan pelaksanaan pemilu dilakukan dengan pendekatan budaya yang dikenal dengan khusus di daerah pariamah dikenal dengan ciloteh lapau. Ciloteh lapau/ngobrol (maota) adalah perbincangan santai. Sedangkan lapau adalah kedai kopi rakyat yang biasanya dikunjungi oleh para lelaki minangkabau yang bertemu untuk memperbincangkan berbagai hal sambil menikmati minuman hangat, maota biasanya berlangsung berjam-jam tanpa henti (Nursyirwan, 2014:78).

Adapun pola komunikasi yang dibangun melalui pendekatan budaya dalam mensosialisasikan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumbar pada masyarakat Kota Pariaman ditempuh dengan berbagai cara yang dirasa mampu menjangkau masyarakat. Salah satu upaya membangun kesadaran akan pentingnya pemilu adalah dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan memanfaatkan lapau sebagai medium untuk mengedukasi masyarakat dengan upaya menekankan kepada masyarakat jika tidak ikut pemilu sama dengan melakukan tindakan pengkhianatan terhadap bangsa

dan Negara karena membiarkan pemerintahan yang terbentuk tidak berdasarkan pilihan masyarakat banyak.

Sebagai orang Minangkabau, lapau merupakan ruang sosial khusus laki-laki. Secara empiric, lapau merupakan kedai kopi yang biasa terdapat dikampung-kampung dan di beberapa sudut kota. Kedai kopi biasanya dikunjungi kaum lelaki untuk berbincang-bincang (ngobrol). Sedangkan secara emik, Lapau dipahami orang Minangkabau sebagai konstruksi dan interaksi sosial khusus laki-laki (Nursyrwan, 1993:77).

Terkait dengan pelaksanaan sosialisasi pemilu, selain mengandalkan metode langsung dengan pendekatan budaya melalui 'Ciloteh Lapau' maka perlu dipersiapkan media yang dapat digunakan untuk kegiatan sosialisasi pemilu yaitu;

1. Media cetak (Koran, Leaflet, Pamflet dan Baliho
2. Media Elektronik (iklan layanan masyarakat di Radio yang berisi himbauan dan untuk menggunakan hak Pilih
3. Media online (melalui FB, Twitter dan IG KPU Kota Pariaman).

Pemilihan media tersebut dilihat dari jumlah pengguna yang ada di Kota Pariaman. Sehingga media yang digunakan sebagai sarana penyampaian pesan dapat efektif menjangkau masyarakat Pariaman. Pemanfaatan media sebagai sarana sosialisasi adalah sebagai medium yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Sehingga tidak ada lagi masyarakat Kota Pariaman yang tidak mengetahui kapan hari, waktu dan tanggal pemungutan suara. Serta siapa saja calon kepala daerah yang maju sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Pada Pilgub tahun 2015 terdapat dua pasangan calon yaitu;

1. Dr. H. Irwan Prayitno, M,Sc dan H. Nasrul Abit
2. H. Muslim Kasim dan Fauzi Bahar

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara oleh KPU Kota Pariaman, pasangan IP-NA memperoleh suara sebesar 16.185 suara sedangkan MK-FB memperoleh suara sebesar 14.887 suara.

Jika dilihat dari faktor kedaerahan, pasangan MK-FB seharusnya memperoleh kemenangan di Kota Pariaman. Karena berdasarkan kedaerahan Kota Pariaman adalah kampung halaman dari Muslim Kasim. Namun pada kenyataannya hal itu tidak terjadi.

Pasangan MK-FB tidak memperoleh suara yang lebih signifikan dibandingkan dengan IP-NA. Artinya masyarakat Kota Pariaman adalah pemilih rasional dalam memilih pasangan calon akan dipilih menjadi kepala daerah. Sebagaimana hasil wawancara dengan Pemuka Masyarakat Indra jaya menyatakan bahwa ada beberapa hal yang mendasari masyarakat Kota pariaman tidak memilih putra daerah sebagai kepala daerah. *Pertama*, adanya luka sejarah yang masih membekas di ingatan masyarakat terkait dengan penolakan pemekaran wilayah Kota Pariaman menjadi Kota Pariaman. *Kedua*, tidak ada gebrakan pembangunan yang berarti saat menjadi kepala daerah. *Ketiga*, karakter yang kurang disukai masyarakat.

Artinya, keterkaitan antara kepercayaan masyarakat terhadap pasangan calon yang maju sebagai kepala daerah tidak dipengaruhi oleh faktor kedaerahan, karena masyarakat sudah rasional menentukan siapa yang dirasa mampu untuk mewakili aspirasinya.

Pentingnya membangun suatu pola komunikasi yang berbasis pendekatan budaya dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih dalam pelaksanaan pemilu perlu dilakukan secara langsung. Dengan menempatkan masarakat sebagai lawan bicara (*audience*) dengan mengedepankan metode informal. Dimana diskusi dirancang dilapau (warung) tempat berkumpul untuk membicarakan banyak hal yang sedang *Happening* di masyarakat adalah suatu solusi yang dilakukan oleh KPU Kota Pariaman sebagai upaya untuk membangun pola komunikasi yang lebih menekankan pada interaksi langsung dengan masyarakat, sehingga KPU mampu menangkap ide dan permasalahan yang mereka hadapi ketika hendak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah

ataupun pemilu yang akan dilaksanakan nantinya oleh KPU Kota Pariaman.

E. KESIMPULAN

Pola komunikasi dibutuhkan agar informasi yang harusnya disampaikan kepada publik dapat tersalurkan dengan baik. Apakah dengan menggunakan media atau secara langsung adalah cara yang ditempuh agar maksud yang ingin dituju dapat tersampaikan dengan baik.

Dalam melaksanakan sosialisasi Pemilu sebagai salah satu upaya yang dilakukan agar masyarakat mengetahui dan memahami akan pentingnya pelaksanaan pemilu berkaitan erat dengan kepentingan bersama (menyangkut hajat orang banyak). Maka dilakukanlah sosialisasi pemilu agar informasi kepemiluan dapat tersebar luas kepada masyarakat.

Namun pada kenyataannya, sosialisasi yang dilakukan melalui media tidak mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan hak pilih pada saat pelaksanaan pemilu.

Untuk itu dilakukan cara-cara yang mudah diterima masyarakat salah satunya melalui pendekatan budaya, khusus untuk Kota Pariaman dimana masyarakatnya sangat gemar berkumpul dilapau, sehingga lapau menjadi suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pergaulan sosial masyarakat. Maka KPU Kota Pariaman sebagai penyelenggara pemilu ditingkat daerah, mencoba melakukan pendekatan melalui budaya maota-ota (ngobrol) dilapau yang kemudian dikemas dalam acara '*Ciloteh Lapau*' dalam rangka sosialisasi pemilu kepada masyarakat luas. Dengan mengutamakan terjadinya dialog langsung antara KPU sebagai penyelenggara pemilu dengan seluruh masyarakat yang ada saat itu. Adapun pola komunikasi yang dibangun berdasarkan pendekatan budaya ini menitik beratkan pada dialog, dimana tidak hanya KPU yang bisa sebagai sumber informasi (pamateri), melainkan masyarakat yang ada juga dapat berperan sebagai pembicara. Sehingga metode interaktif secara langsung

ini diharapkan akan mampu menarik animo dan menimbulkan kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk menggunakan hak pilih di TPS.

Berkaca dari jumlah partisipasi yang diperoleh dari pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2010 lalu, dimana pola komunikasi yang dibangun hanya bersifat satu arah saja, dan hanya mengandalkan alat peraga berupa media luar ruang (baliho dan spanduk). Maka pada Pilgub Sumbar tahun 2015 KPU Kota Pariaman berhasil memperbaiki jumlah partisipasi sebesar 1,50%. Hal ini juga sekaligus memperbaiki ranking Kota Pariaman yang tahun 2010 berada pada ranking 18 dari Sembilan belas kabupaten dan Kota yang ada di Sumatera Barat. Namun pada tahun 2015 berhasil diperbaiki menjadi ranking 7 (Tujuh) ditingkat Sumatera barat.

Artinya, sosialisasi pemilu sebaiknya diarahkan pada pendekatan budaya sebagai suatu pola yang dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya pelaksanaan pemilu bagi kelangsungan pemerintahan yang akan datang. Sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat ditingkatkan.

Penggunaan lapau sebagai media untuk meningkatkan literasi masyarakat akan pentingnya pemilu dalam tatanan kehidupan yang lebih besar dapat dilakukan dengan cara-cara yang lebih bisa diterima, karena mengedepankan kebiasaan-kebiasaan yang telah lekat di masyarakat.

Lapau merupakan institusi yang telah lama akrab dengan masyarakat. Hingga saat ini, lapau merupakan media yang tidak tergerus oleh perkembangan zaman ataupun media mainstream yang menyerpa masyarakat kita.

Dalam tatanan budaya minang kabau, lapau atau kedai kopi tradisional adalah tempat berlangsungnya diskusi banyak hal, selain itu bisa saja sebagai tempat untuk mengkritik serta menyampaikan gagasan tertentu (Darwis.2013:24).

Karena lapau dapat didatangi oleh siapa saja, dan sejatinya menjadi wadah dan tempat berkumpulnya masyarakat dari

berbagai kalangan di Kota Pariaman. Maka saat pemilu tiba, lapau menjadi bagian penting yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk menyampaikan program kerja, visi dan misi masing-masing pasangan calon.

Melihat fenomena tersebut, KPU Kota Pariaman berupaya untuk terjun langsung kemasyarakat dengan memanfaatkan media lapau ini dengan tujuan untuk memberikan pendidikan kepemiluan kepada masyarakat dengan menitik beratkan pada kewajiban warga Negara untuk melaksanakan perannya dalam rangka menjaga stabilitas

sosial dan pemerintahan yang berkorelasi langsung dengan kepentingan serta hajat hidup orang banyak. Maka dilakukanlah sosialisasi pemilu dengan metode '*Ciloteh Lapau*' sebagai media komunikasi yang digunakan KPU Kota Pariaman dalam rangka melakukan pendidikan pemilu secara peruasif, edukatif dan informatif dengan memperhatikan tatanan sosial dan budaya yang ada di masyarakat Kota Pariaman dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (*awareness*) dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi
- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Preneda Group
- Darwis, Yulandre, (2013). *Sejarah perkembangan Pers Mianangkabau (1959-1945)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Devito, A. Joseph. (1997). *Komunikasi Antar Manusia*, Terjemahan Agus Maulana. Jakarta: Professional Books
- Effendy, Nursyirwan, (2014). *Budaya Politik Khas Minangkabau, Masyarakat Indonesia*, Vol 40 (1) Juni 2014
- Kriyanto, Rakhmat. (2014). *Teori Publik Relation Perspektif Barat dan Lokal*. Jakarta: PT. Kencana Prenadamedia Group
- Koentjaraningrat (1981), *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Bandung: Srikandi Media.
- Laporan Rekapitulasi Penghitungan Suuara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Tingkat Kota Pariaman tahun 2015
- Liliweri, Alo. (2011). *Dasar-Dasar Komunikasi Antar Budaya*. Surabaya: Pustaka Pelajar
- Moleong, J, Lexy. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Refisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy dan Rakhmat, Jalaluddin. (2005). *Komunikasi Antar Budaya*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy, (2004). *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasidan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nurhakki. (2013). *Budaya Komunikasi Dalam meningkatkan Partisipasi Politik Prempuan*, Stain Parepare
- Rasul M, Najmuddin dkk, (2015). *Penggunaan Media, Norma Kewarganegaraan dan Partisipasi Politik Dalam Era Transisi ke Demokrasi di Indonesia*. *Malaysian Jurnal Of Communication* Jilid 31 (1) 2015: 187-204
- Rivers, William L. dan Jay W. Jensen (2004), *Media Massa dan Masyarakat Modern*, Jakarta: Prenada Media
- Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, Bandung; Alfabeta.
- Yose Hendra, (2017). *Demokrasi Lapau* diakses tanggal 18/8/2017

ANTARA ULAYAT ADAT DAN HUTAN NAGARI: SEBUAH KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL DI MINANGKABAU

Tresno¹ *, Rizka Fitri Ana², Muki Wicaksono³, Auviar R. Wicaksanti⁴, Riche Deswita⁵

Submitted Article: 09 August 2018

Reviewed Article: 20 September 2018

Accepted Article: 18 December 2018

Abstract

This article is the result from our fieldwork to observed about the rule of regulation the social forestry in South Solok, West Sumatera. As this research uses ethnoscience approach where the informant will be choosed by perposive sampling. Since the rule of LHK/83 is implemeted in South Solok that became strategic place of political ecology for advantaging the village forest in the Customary Land of the Alam Surambi Sungai Pagu. Based on the results, there are differences in customary communal tenure between the darek region whose control is held by penghulu andiko, while the rantau region whose control is given to rajo. Rajo is the head of the tribe who is in 4 the customary land in Alam Surambi Sungai Pagu. In the Alam Surambi Sungai Pagu community, the forest processing is divided into three, namely; 1) ulayat suku is an unprocessed highland forest or rimbo gadang; 2) ulayat kaum or harato pusako tinggi, which is a land of ancestor from ninik nan salapan and ninik 60 kurang like rice fields or sawah and will be passed on daughters; 3) ulayat saparuik, also known as Harato Pusako Randah, is a family property from parents or property owned by their father and mother during marriage in the form of fields or rimbo randah. After the issuance of 5 decrees of The Village Forest in Alam Surambi Sungai Pagu, some of rimbo gadang began to be used as a Village Forest, moreover the use of the forest began to take into account the nagari government. Hence, the boundaries of 4 customary land begin to blur. In addition, the existence of Nagari Forest does not only provide the legality for the people of Alam Surambi Sungai Pagu, but also provides the benefits for outside communities, LPHN and mining companies.

Keywords: Social Forestry, Political Ecology, The Village Forest, The Customary Land

A. PENDAHULUAN

Permasalahan hutan sudah menjadi permasalahan di Indonesia, semenjak masa penjajahan hingga masa sekarang penggunaan lahan untuk kesejahteraan rakyat masih menjadi ketidak

merataan di negeri ini. Padahal hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki potensi besar dalam mensejahterakan masyarakat. Menurut Suharjito (1998), kepemilikan sumberdaya alam hutan memiliki status *public property*. Sesuai dengan UUD 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya adalah rahmat Tuhan dan dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut UU No. 41 Tahun 1999, salah satu penyelenggaraan kehutanan bertujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan

¹ Komunitas Konservasi Indonesia (KKI-Warsi), Jambi.

² Staff of Department of Anthropology, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya.

³ Epistema Institute Law and Environmental Justice, Jakarta.

⁴ Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, Jakarta

⁵ Graduate student of Department of Anthropology, FISIP, Univeristas Andalas, Padang

* Corresponding Author: widyahasan38@gmail.com

aneka fungsi hutan meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari. Sesuai dengan kebijakan Jokowi mengembangkan Indonesia dari pinggiran, yang mana pemerintah akan menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa tanah dan menentang kriminalisasi penuntutan kembali hak tanah masyarakat serta mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar (dalam Yando ddk, 2018). Salah satu contoh kegiatan yang berbasis sistem Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) atau yang lebih dikenal dengan perhutanan sosial. Perhutanan sosial merupakan wujud dari reforma agraria. Reformasi agraria atau pembaruan agraria adalah penataan ulang atau restrukturisasi pemilikan, penguasaan,

dan penggunaan sumber-sumber agraria, terutama tanah untuk kepentingan petani, buruh tani, dan rakyat kecil atau golongan ekonomi lemah pada umumnya. Inti dari pembaruan agraria adalah *land reform* yaitu redistribusi kepemilikan dan penguasaan tanah. Reforma agraria bidang kehutanan merupakan salah satu langkah penting dalam menyelesaikan konflik-konflik kehutanan. Perlu adanya kerjasama yang baik antara masyarakat, pemerintah dan LSM ataupun perusahaan dalam perhutanan sosial untuk perwujudan reforma agraria. Berdasarkan data dari Research Reforma Agraria sudah tercatat sampai periode november 2017 jumlah hutan yang telah disahkan dalam skema perhutanan sosial namun masih banyak hutan yang masih dalam tahap pengusulan sebagai skema perhutanan sosial yang mana dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 1. Jumlah Perhutanan Sosial di Indonesia tahun 2017

No	Skema	Pra Kabinet Kerja 2007-2014	2015	Kabinet Kerja 2016	2017	Total (Ha)
1	HD	78.072,00	63.587,00	81.129,83	446.730,38	669.519,21
2	HKm	153.725,15	20.954,06	2.465,46	109.343,31	286.478,98
3	HTR	198.594,87	2.815,42	14.131,00	23.426,61	238.967,90
4	Kemitraan	18.712,22	16.300,99	24.468,89	30.158,81	89.640,91
5	Hutan Adat	-	-	13.121,99	3.341,25	16.463,24
	Jumlah	449.104,23	103.648,47	122.195,18	613.000,361	1.301.070,24

Sumber: Research Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Semangat perhutanan sosial menurut Presiden Joko Widodo adalah memunculkan keadilan sosial bagi masyarakat yang hidup di daerah perhutanan sambil menjaga kelestarian sumber daya hutan. Semangat perhutanan sosial ini juga terwujud di Provinsi Sumatera Barat, salah satunya dukungan politis dari Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dengan menargetkan 500.000 Ha lahan hutan menjadi bentuk perhutanan sosial (Hutan Nagari, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Adat). Selain itu, dukungan dari pemerintahan provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Perhutanan Sosial dalam percepatan pengusulan. Ini semua tidak akan terwujud jika masyarakat di Sumatera Barat tidak antusias dalam

semangat perhutanan sosial ini, dapat dibuktikan dengan lebih kurang 70.000 Ha Hutan di Sumatera Barat sudah mendapatkan hak pengelolaan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan masih banyak lagi yang masih dalam proses pengusulan.

Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat atau yang lebih dikenal Masyarakat Adat Minangkabau memiliki konsep atas tanah mereka dengan istilah tanah ulayat (lihat Benda-Beckman; Damsar, 2001; dan Erwin, 2012). Semenjak adanya beberapa perubahan skema hak pemanfaatan hutan di Indonesia. Telah beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah antara lainya program Perhutanan Sosial yang telah mengalami perubahan dari tahun ke tahun yang terakhir yaitu Permen LHK. No .83/2016. Dengan begitu melalui

kerjasama Pemerintah antara LSM KKI Warsi dalam wacana penguatan masyarakat sebagai pemilik hutan adat dengan beberapa skema Perhutanan Sosial. Skema perhutanan sosial ini pertama kali di sahkan di Kabupaten Solok tepatnya di Nagari Simanau, dikarenakan beberapa pertimbangan mengenai beberapa skema perhutanan sosial KKI-Warsi bersama masyarakat memutuskan untuk memilih salah satu skema yang cocok dalam penguasaan sistem ulayat adat dalam Nagari Simanau, sehingga diputuskan lahan seluas 1080 ha menjadi Hutan Nagari di Simanau. Secara bersamaan, pengajuan Hutan Nagari juga dilakukan di Nagari Alam Pauh Duo, tepatnya di Jorong Simancung, hutan seluas 650 ha dijadikan Hutan Nagari yang berstatuskan Hutan Lindung. Hal tersebut tidak memberhentikan pemerintah dan penggerak LSM yang berada di Kabupaten Solok Selatan untuk melindungi kawasan hutan yang masih belum terlindungi, yang pada masa itu dan sekarang menjadi target para HPH, ilegal logging, ilegal mining dan masyarakat yang berladang. Semenjak hal itu sudah beberapa nagari di Kabupaten Solok Selatan yang sudah mendapatkan SK ataupun masih dalam proses pengusulan Hutan Nagari, setidaknya sudah 5 nagari yang telah mendapatkan SK secara resmi melalui bantuan KKI-Warsi yaitu Nagari Pakan Rabaa di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, 3 Nagari di Kecamatan Sungai Pagu yaitu Nagari Pasir Talang Timur, Pulakek Koto Baru, Koto Baru, dan Jorong Simancung, Nagari Alam Pauh Duo di Kecamatan Pauh Duo.

Semenjak dengan berlakunya Hutan Nagari yang diperdakan negara, memang hutan yang berada pada kawasan masyarakat menjadi terlindung dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengolah hutan mereka, dengan menguatkan wacana bahwa hutan tersebut milik masyarakat adat, tetapi masyarakat adat Minangkabau yang mana?. Pemangku kebijakan lupa akan mengenai kebijakan yang mereka keluarkan akan penentuan subyek dan objek hukum tentang penguasaan dan pengolahan hutan dalam

masyarakat, sehingga itu menjadi tidak irelevan dikemudian hari dan akan menyebabkan konflik antar masyarakat. Setiap masyarakat di Indonesia memiliki sistem tenurial tentang penentuan subyek dan objek hukum mengenai hak kepemilikan dan pengolahan hutan seperti dalam suku Minangkabau ulayat adat merupakan milik kaum atau suku. Jika konsep ulayat adat Minangkabau digeneralisasikan seperti tanah adat yang berada di Jawa, sehingga itu berada unit sosial yang tidak relevan, lalu cara pemerintah menasionalisasikan tentang konsep tanah adat dapat merubah sistem tenurial dan batas-batas ulayat secara adat, sedangkan masyarakat Minangkabau memiliki sistem tenurial tersendiri. Pada akhirnya yang awalnya hutan dicanangkan untuk seluruh masyarakat, nyatanya hutan hanya dijadikan sebagai kepentingan-kepentingan politik. Sehingga penelitian tentang Hutan Nagari pada masyarakat Minangkabau menjadi penting dipelajari, penelitian ini ditinjau dari sudut antropologis, untuk menjelaskan Hutan Nagari secara adat Minangkabau dan pengumpulan data-data etnografis guna menjelaskan sistem tenurial menurut masyarakat setempat dan perubahan tentang sistem tenurial pada masyarakat Minangkabau saat ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan peneliti di 5 Hutan Nagari, Kabupaten Solok Selatan tepatnya bekas Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu. yang secara administratif di Nagari Pakan Rabaa di Kecamatan Pekan Rabaa, Nagari Pasir Talang dan Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu dan Nagari Alam Pauh Duo di Kecamatan Pauh Duo. Metode yang digunakan peneliti menggunakan pendekatan *ethnoscience* yang memandang bahwa pengetahuan masyarakat merupakan bagian penting dalam kehidupan suatu kelompok (Poerwanto, 2006), dengan demikian penelitian ini tidak saja menjelaskan bagaimana fenomena itu terjadi, tetapi yang terpenting memahami apa yang dibalik fenomena

tersebut, dan mempertanyakan mengapa fenomena tersebut terjadi (Arifin, dkk 2005, dimodifikasi Tresno, 2017:71).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ulayat Adat Daerah Rantau

Jika beberapa penelitian telah menjelaskan daerah luhak nan tigo atau juga dikenal dengan daerah darek meliputi Luhak Tanah Data, Luhak Agam, Luhak Limo Puluhan Koto. Ternyata terdapat perbedaan antara daerah darek dengan daerah rantau yang mana daerah rantau merupakan bekas penyebaran kekuasaan kerajaan Pagaruyung, sehingga banyak ditemukan daerah rantau memiliki raja-raja yang merupakan utusan Raja Pagaruyung untuk membukukan ulayat baru seperti Pariaman, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Pasaman dan daerah lainnya. Adapun dalam penelitian ini merupakan wilayah Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu yang berdiri pada abad ke 12 – 14 M. Terlihat jelas perbedaan penguasaan ulayat adat atau tanah komunal pada masyarakat Minangkabau terkhususnya pada masyarakat Alam Surambi Sungai Pagu. Jika daerah darek penguasaan ulayat adat itu dipegang oleh penghulu andiko. Namun berbeda dengan daerah rantau penguasaan ulayat adat itu diberikan kepada rajo. Rajo yang memimpin dalam pengolahan ulayat adat. Rajo lah sebagai kepala suku yang berada di 4 ulayat adat di Alam Surambi Sungai Pagu. Ulayat adat tersebut adalah milik 4 suku besar di Alam Surambi Sungai Pagu yaitu Suku Kampai dengan Rajo nya Tuanku Datuak Rajo Batuah yang memegang ulayat adat di Parik Gadang Diateh, Suku Panai, Suku Tigo Lareh dan Suku Melayu yang memegang ulayat adat Pasir Talang, dikarenakan pada masa itu terjadi perluasan daerah dan penyebaran penduduk pendatang sehingga ulayat tiga raja ini bertambah yaitu ulayat adat Koto Baru dan ulayat Pauh Duo. Seiring perjalanan banyak berumunculan mengenai pemberian nama 3 ulayat adat tersebut disebut ulayat Parik Gadang Diateh dibawah milik rajo nan batigo (Panai, Tigo Lareh dan Melayu). Ulayat adat ini

merupakan ulayat suku yang didalamnya berupa dataran rendah atau tanah data dan dataran tinggi atau rimbo yang akan dikelola secara bersama oleh ninik mamak. Adapun rajo sebagai penghulu suku, yang memiliki penguasaan untuk mengumpulkan pajak atau bungo yang berlaku ketika orang luar masuk ke Alam Surambi Sungai Pagu berupa nan bukit babungo kayu, nan lurah babungo ampiang, nan pasia babungo ameh (hutan/bukit berbunga kayu, lurah berbunga padi, pasir berbunnga emas), seluruh pajak digunakan untuk bersama.

Adapun rajo sebagai kepala suku yang mana dalam suku tersebut terdapat beberapa kaum pada awalnya merupakan ninik nan salapan dan ninik 60 kurang aso yang telah lama mengolah ulayat masing-masing. Kebanyakan ninik mamak di ke 4 suku ini lebih banyak mengolah dataran rendah daripada mengolah dataran tinggi berupa rimbo atau bukit. Daerah yang di tinggali oleh ninik mamak tersebutlah menjadi berupa luhak-luhak atau taratak yang kemudian membentuk sebuah kampung-kampung yang menandakan kaum mereka. luhak dan kampung lah daerah administratif adat terendah pada masa itu. Terkadang pemberian nama taratak ataupun kampung berdasarkan nama kaum tersebut. Sehingga ulayat suku sudah terbagi-bagi kedalam beberapa kaum yang telah memiliki ulayat kaumnya masing-masing dalam satu kampung. Ketika suatu kaum yang telah mengolah ulayat suku yang belum diolah maka ulayat tersebut akan menjadi kaum tersebut, sehingga hampir jarang ditemukan lagi dataran rendah di Alam Surambi Sungai Pagu yang tidak berkepemilikan. rata-rata dataran rendah sudah menjadi sebuah pemukiman, sawah, parak, tabek yang sudah milik kaum. Berbeda dengan dataran tinggi pada masa itu, akses untuk mengolah dataran tinggi masih kurang intensif dalam pengolahan.

2. Tata Guna Lahan

Masyarakat Alam Surambi Sungai pagu memiliki pengetahuan lokal dalam pengolahan lahan yang sampai saat ini masih dipertahankan.

Mereka membedakan lahan berdasarkan daratan rendah berupa tanah data (tanah datar) dan daratan tinggi berupa rimbo (hutan) atau bukit (bukit) yang mana dari daratan tersebut mereka dapat mengolah lahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Menurut mereka “sawah tatumpak tanah nan data, ladang tatumpak

tanah nan lereang, nan bancah buek kak tabek, tobiang tanah golodo, hulu aia jadi rimbo (sawah ditanami tempat tanah yang datar, ladang ditanami tempat yang lereng bukit, daerah yang digenangi dengan air dibuat kolam ikan, tebing tanah yang rawan longsor, hulu air jadi hutan) .

Tabel 2. Kategori Penggunaan Lahan

No	Jenis Lahan	Jenis Tanah	Jenis Tanaman
1	<i>Rimbo gadang</i> atau <i>rimbo adaik</i> (hutan tinggi)	Di dataran tinggi atau tebing bukit atau disebut masyarakat <i>tobing bukit</i> dengan kemiringan lebih dari 45°	Hutan yang belum dibuka atau dikelola dengan tanaman seperti maranti, surian dan tanaman diptrocupus dan dipercayai tempat tinggal <i>inyiak</i> (makhluk harimau yang dianggap nenek moyang)
2	Sawah	Di tanah yang datar atau <i>tanah data</i> yang mudah untuk mendapat air atau dilewati dengan <i>batang aia</i> (air sungai)	Padi
3	<i>Parak</i>	Di tanah yang datar yang kurang mendapat air	<i>Tanaman mudo</i> (Tanaman Jangka pendek) seperti cabai, pisang, kelapa, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran
4	Ladang atau <i>Rimbo rendah</i> (hutan rendah)	Di lereng bukit atau <i>lereng bukit</i> dengan kemiringan kurang dari 45°	<i>Tanaman tuo</i> (Tanaman jangka panjang) seperti kulit manis

Sumber : Data Primer, 2018

Adapun beberapa penjelasan masyarakat mengenai pengkategorian pengolahan lahan sebagai berikut;

- a. *Rimbo gadang* atau *rimbo adaik* atau sebutan lain *hutan tinggi* merupakan ulayat suku. *Rimbo* merupakan wilayah yang masih alami atau belum sama sekali *diramba* (dibuka) oleh masyarakat atau kaum tertentu. Biasanya *rimbo* ini masih dalam keadaan belukar dengan ditumbuhi pohon-pohon yang besar, tempat aliran batang *aia*, tempat tinggal *nyiak* mereka, dan berupa bukit-bukit (*bukik*).

“Ka *rimbo*, kayu tak buliah ditabang, rotan tak buliah dirungguik, manau tak buliah

dipancang. Ka batang aia, aia tak buliah dikaruahi, batu tak buliah dibaliak, tobiang tak buliah diruntuah. Ka samak baluka, buah manih, buah masam tak buliah diambiak, dipanjek mudo jo lain-lain. Kok pantang dilampau, ka bawah indak baurek, ka ateh indak bapucuak, di tengah-tengah digiriak kumbang, hiduak sagan matipun tak namuah, bak karakok tumbuah dibatu (ke hutan, kayu tidak boleh ditebang, rotan tidak boleh diambil, manau tidak boleh dipotong. Ke sungai, air tidak boleh dikotori, batu tidak boleh dibalik, tebing tidak boleh diruntuhkan. Ke semak belukar, buah manis, buah masam tidak boleh diambil, dipanjat muda dan lainnya. Kalau pantangan

dilanggar, ke bawah tidak berurat, ke atas tidak berpucuk, di tengah-tengah digirik kumbang, hidup segan matipun tidak mau)”

Di dalam *rimbo* inilah mereka memanfaatkan hasil hutan berupa kayu untuk dijadikan rumah, manau, madu. Akibat pengaruh perkembangan zaman *rimbo* menjadi salah satu cara penambah penghasilan bagi masyarakat untuk penjualan kayu dan menambang emas. Setiap masyarakat yang tinggal di alam surambi sungai pagu dapat mengolah *rimbo gadang*. Terkadang *rimbo gadang* juga disebut dengan hutan tinggi oleh beberapa masyarakat. Hutan tinggi ini memang sudah di lindungi sejak masa penjajahan Belanda, namun semenjak kepemimpinan Soeharto masyarakat mulai banyak mengolah *rimbo gadang* sebagai ladang. Pada saat *rimbo gadang* telah diolah menjadi ladang, *rimbo gadang* tersebut akan berubah statusnya menjadi *rimbo randah* dan beralih kepemilikan yaitu milik pribadi. Ada beberapa daerah yang melindungi hutan mereka akibat beberapa alasan misalkan hutan tersebut merupakan cadangan air, memiliki banyak pohon, aliran sungai, ketinggian yang curam. Adapun ada beberapa jenis pohon yang berada di *rimbo gadang* seperti meranti, manau, rotan, *paniang-paniang*, *katapiang*, *binuang*, *babayua*, dan *banio*. Ada beberapa kayu yang diminati oleh illegal logging seperti kayu meranti dan *banio*.

Rimbo gadang ini biasanya akan diatur oleh *rajo* dan *ninik mamak*. Tiap-tiap kaum dalam suku boleh mengolah, sehingga ketika ada anak kemenakan dari kaum tertentu ingin mengolah maka penting orang tersebut untuk mendapat izin dari *rajo* dan *kapalo kaum* mereka. Seiring dengan adanya peraturan mengenai hutan nagari, beberapa *rimbo gadang* mulai dijadikan hutan nagari. Hanya saja ketika *rimbo gadang* sudah menjadi hutan nagari perizinan mengenai hutan tersebut akan beralih ke pemerintahan nagari atau KAN. Hanya sebagian saja yang memintak izin kepada *kapalo kaum*. Dengan adanya hutan nagari maka status hutan tersebut dilindungi seperti Hutan Nagari Simancung

berdasarkan prosedur hukum tidak boleh di olah. Sedangkan *rimbo gadang* biasanya hak kepemilikannya lepas saja, jika ada lahan bagus di hutan tersebut. Biasanya akan diramba oleh siapa saja. *Rimbo gadang* ini merupakan lahan yang kurang diolah secara intensif.

b) Sawah biasanya ditanami di daratan rendah atau tanah datar. Pembuatan sawah harus dilalui oleh *batang aia* dan *lalu*. Jika memang tidak ada *batang aia*, yang mana mereka cari tempat *batang buatan*, dengan mencari ketinggian dan dibawahnya dijadikan sawah seperti dibawah bukit, yang nantinya mereka akan buat *banda* (irigasi) yang bisa mengalir ke sawah mereka. Sebelum membuat sawah terkadang mereka buat *tabek* (kolam) terlebih dahulu barulah dijadikan sawah. Adapun dalam cara penanaman padi ini dilakukan sebanyak 3 kali, yang mana masyarakat di 5 nagari ini biasanya mereka tanam serentak dan panenpun biasanya dilakukan sebanyak 3 kali dalam 2 tahun. Sawah akan ditanam berdekatan dengan aliran sungai, sehingga mereka dapat membuat saluran irigasi untuk sawah nantinya ataupun celah-celah air dari bukit. Jika tidak ada aliran air, maka susah untuk dijadikan lahan sawah. Setelah panenpun mereka mempunyai tradisi *turun basamo ka sawah mandarai kapalo banda* (turun bersama ke sawah membantai kepala kerbau) dengan memotong kepala kerbau.

c) *Parak* merupakan tanaman pengganti padi atau tanaman yang ditanam tidak jauh dari rumah mereka. Ada beberapa sawah yang sudah dijadikan *parak* ataupun tanah datar yang tidak bias dijadikan sawah akan dibuat *parak*. *Parak* ini terkadang menggantikan sawah untuk beberapa waktu. Tujuannya untuk memperbaiki unsur tanah agar nantinya lebih subur. Adapun penyebutan *parak* ini dikarenakan dekat dengan rumah, sama halnya dengan ladang *parak* juga ditanam dengan sistem campur. Lahan yang digunakan juga tidak terlalu luas. Dalam *parak* biasanya berisikan berbagai

tanaman jangka pendek seperti sayur-sayuran, pohon jeruk, langkueh, sipadeh, kacang duduak, cabe, ubi, pisang, kelapa, pepaya, *cimangkoh* dan tanaman obat lainnya. Namun terkadang dalam *parak* juga terdapat tanaman jangka panjang, yang mana tanaman tersebut tidak cocok di tanam di ladang akibat banyaknya monyet di hutan. Sehingga tanaman jangka panjang di tanam di *parak* seperti coklat. Setelah panen tanaman mudo, barulah mereka ganti dengan sawah kembali.

- d) Ladang merupakan kebun yang berada di lereng bukit bukan di tebing bukit. Sebelum membuat ladang, mereka perlu *mancaliak tanah landai* dan *tanah tobing batinggaan* (tanah tebing ditinggalkan). Tidak seperti sekarang sudah banyak masyarakat yang berladang di tebing bukit. Setelah itu barulah mereka akan *meramba* dan menebang tanaman kayu di sekitar lahan yang akan menjadi ladang mereka. Sebelum kayu itu ditebang mereka juga tidak menebang pohon di dekat sungai kira-kira 100 m. Hal tersebut dilakukan agar sungai mereka tetap tidak kering, ladang mereka dekat dengan sungai, dan penahan agar tidak terjadi longsor.

"dulu ulu anak aia ko ditinggaan, kini ndak di tapi ulu anak aia ditanam juo, kalau paneh ko jadinya tanah maranggang, kalau hujan masuk tanah ko jadinya lah lunak dan lah lapuak ndak apo ureknyo lai, nan pohon ko ado gunonyo untuak aia, apabila pohon ko jarang, batang aia ko jadinya ketek, jadilah inyo galodo (dulu ulu anak air kami tinggalkan, sekarang tidak ulu sungai juga ditanam, kalau musim panas nanti tanahnya merenggang, kalau musim hujan airnya masuk ke tanah itu dan menjadi lunak dan akhirnya rapuh tidak ada penahanya lagi, pohon ini berguna untuk air, apabila pohon ini sudah jarang, suangi ini akan mengering, akhirnya jadilah longsor)"

Mengenai kayu yang sudah ditebang tidak mereka bakar, hanya saja mereka akan membersihkan dahan-dahan kayu tersebut dimana daerah yang akan ditanam. Sehingga mereka tidak membakar kayu yang di tebang, karena menurut mereka jika sudah *diramba*, *ditabang* dan pohon tersebut tidak dibakar karena menghabiskan waktu. Lebih baik didiamkan saja dan pohon berguna untuk menutupi lahan agar lahan tersebut lama ditumbuhi semak-semak dan akibat pelapukan pohon berguna untuk pupuk alami.

"untuk pencarian lereng ada juga yang sampai ke atas, cuman dilihat kemiringanya kalau sudah tobing bana tidak bisa kita tanami. Selain tanah yang tebing (*tobing*), tidak boleh mereka tanam, ada beberapa pertimbangan lainnya yang menyebabkan mereka tidak boleh membuka ladang disana yang mana menebang pohon yang berdekatan dengan *ulu batang aia* (hulu sungai). Jika memang terjadi longsor menu- rut bapak E, itu penyebabnya bukan lagi hutanya tetapi manusianya".

Ladang ini biasanya berupa tanaman jangka panjang yang mereka kenal dengan *tanaman tuo*, ladang biasanya ditanam jauh dari rumah. Sehingga membutuhkan waktu untuk pergi ke ladang bahkan membutuhkan beberapa jam ke ladang milik masyarakat. Sifat ladang ini juga ditanam dengan sistem campur, yang mana dalam satu petak lahan atau satu hektar lahan ditanami dengan berbagai jenis tanaman jangka panjang misalkan mereka tanam karet bersebelahan dengan pohon kayu manis. Bahkan menurut Bapak E, kadang-kadang jika ada bibit durian atau mahoni (*anak mahoni*) mereka tanam juga disitu. Sebelum menunggu kopi besar, maka mereka juga tanam terkadang cabe rawit disebelah pohon kopi untuk selingannya. Untuk penggantian tanaman juga menurut Bapak Dtk K, tanaman jangka panjang ini tidak mesti diganti kecuali misalkan pohon durian atau kopi yang mati/tua baru bisa di ganti. Namun ada

beberapa hal yang menyebabkan masyarakat baik di 5 nagari ini mengganti tanaman mereka akibat pasar atau ikut-ikutan berdasarkan penjelasan bapak M;

"kalau lagi musim karet baru urang tanam karet, kalau lai sedang musim kopi urang ganti tanaman karet wak dengan kopi, tapi kini wak nanam kopi se, kalau usahako punyo prinsipalah sabananya jangan dicam- pua tanam ko labiah ancak dipisahkan, istilahnyo di Miang takicuah ayam palala rumah maha kopi tanam kopi maha karet tanam karet, disaat ala ditanam bilo hasilnyo, harago kopi la nurun se dan ndak terencana (kalau lagi musim karet baru orang-orang tanam karet, kalau lagi sedang musim kopinya

yang mahal baru ganti tanaman karet, tapi sekarang saya tanam dengan kopi, kalau usaha ini punya prinsipalah yang sebenarnya jangan dicampur tanamnya labih baik dipisahkan, istilahnya dalam minang *takicuah ayam palala rumah*, mahal kopi tanam kopi, mahal karet tanam karet)".

Ada beberapa jenis tanaman yang mereka tanam seperti durian, kopi, kayu manis, karet, petai, dan coklat. Namun ada beberapa tanaman yang tidak cocok ditanam di ladang mereka. Dikarenakan banyak monyet yang sering memakan hasil panen mereka seperti tanaman coklat, sehingga pohon coklat terkadang mereka tanam di *parak* dekat rumah mereka.

3. Jenis-Jenis Hak Ulayat

Tabel 2. Jenis-Jenis Hak Ulayat

No	Jenis Ulayat/ Wilayah	Subjek Hak	Jenis Hak	Mekanisme Penguasaan	Obek Hak	Penggunaan
1	Ulayat Suku	Seluruh masyarakat Alam Surambi Sungai Pagu yang sesuku	1. Rajo hak memimpin wilayah dan mengumpulkan upeti untuk pendatang 2. Hak Milik Sasuku (Komunal) 3. Anak Kemenakan Hak Mengelola	Mengolah Ulayat Suku dengan meminta izin dengan raja dan ninik mamak di masing-masing ulayat adat	Daratan rendah yang belum dihuni dan daratan tinggi yang belum diolah berupa <i>rimbo</i> (hutan)	Dikelola oleh Seluruh Kemenakan Niniak Mamak
2	Ulayat Kaum	Anak Kemenakan	1. Hak Milik Kaum 2. Anak Kemenakan Hak Mengelola	Meminta izin kepada niniak mamak	Sawah dan <i>Parak</i>	Menjadi Jaminan Sosial Anggota Kaum
3	Ulayat Sapa-ruik	Pribadi	Hak Milik Pribadi	Membeli, upah buruh, hasil pembukaan sendiri (<i>tabek tabang</i>) atau kelompok koperasi,	Ladang atau <i>rimbo randah</i> (hutan rendah) dan Sawah	Menjadi Jaminan Sosial Anggota Keluarga

Sumber : Data Primer, 2018

Menurut masyarakat *ulayat* atau sebutan lainnya *wilayat* merupakan seluruh wilayah penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Alam Surambi Sungai Pagu baik itu berupa tanah, sungai, dan hutan. Didalam *ulayat* inilah diatur hak kepemilikan dan hak penguasaan wilayah teritorial termasuk tanah, hutan dan sawah yang dimiliki pada suku di Alam Surambi Sungai Pagu. Maka dari itu peneliti akan menjelaskan secara mendetail tentang *ulayat* suku, *ulayat* kaum dan *ulayat* *saparuik* yang akan dijelaskan sebagai berikut;

a. Ulayat Suku

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, *ulayat* suku merupakan *ulayat* dari 4 suku di Alam Surambi Sungai Pagu yang mana setiap suku di pimpin oleh *rajo*. *Rajo* berfungsi sebagai pengatur dan mengawasi jika terdapat orang luar yang akan mengolah *ulayat* suku. Sebenarnya *ulayat* suku ini berupa daratan rendah dan daratan tinggi yang belum diolah sama sekali. *Ulayat* suku ini terbagi menjadi 4 bagian yaitu *ulayat* Parik Gadang Diatch merupakan *ulayat* milik suku Kampai, *ulayat* Pasir Talang merupakan milik *ulayat* suku Panai, suku Tigo Lareh dan suku Melayu, sedangkan *ulayat* Koto Baru dan *ulayat* Pauh Duo merupakan *ulayat* hasil penyebaran penduduk di Pasir Talang dan pendatang namun secara kepemilikan milik suku Panai, suku Tigo Lareh dan suku Melayu. Namun nyatanya *ulayat* suku pada bagian rendah sudah diolah oleh ninik mamak dulunya. Sehingga masing-masing suku terdiri dari beberapa kaum, maka pada masa itu *niniak mamak* baik *niniak mamak nan salapan* maupun *niniak mamak 60 kurang aso* telah lama *mencancang malatih* di wilayah Alam Surambi Sungai Pagu, sehingga dataran rendah sudah terbagi-bagi kedalam beberapa *ulayat* kaum. Sebagaimana sudah dijelaskan beberapa informan mengenai *ulayat* suku ini sudah terbagi bagi *hak alah samo-samo punyo*, *rimbo bamintalah*, *ukuran tabe bepedalak*, *ala buntel lah bamintalak* yang berarti setiap suku dalam kaum sudah ada hak nya masing-masing, *rimbo* memintak izin,

ukuran kolam sudah ditentukan, sawah yang sudah diberi batas, dan kaum sudah ada diberi hak-haknya masing-masing yang diberikan oleh ninik mamak mereka.

Sedangkan daratan tinggi berupa *rimbo* atau *bukik* tidak diolah secara intensif hanya berupa hutan lepas yang perlu meminta izin dalam pengolahannya, sehingga jarang sekali ditemukan *rimbo* kepemilikan kaum. Ada beberapa pengklaiman *rimbo* berupa *ulayat* kaum dengan istilah *uyalat tunjuak* atau penunjukan bukit sebagai *ulayat* mereka. Nyatanya *ulayat* tersebut masihlah merupakan *ulayat* suku. Hanya saja dapat ditemukan *rimbo* yang sudah kepemilikan pribadi yang nantinya akan dijelaskan pada *ulayat saparuik*.

b. Ulayat Kaum

Ulayat kaum disini merupakan warisan dari nenek moyang mereka dari generasi ke generasi yang sudah dibuka oleh *niniak nan salapan* dan *niniak 60 kurang aso*. Dulunya daratan rendah diolah secara intensif oleh ninik mamak Alam Surambi Sungai Pagu. *Ulayat* kaum ini biasanya di jadikan sebagai tempat tinggal atau *rumah gadang*, sawah dan parak. Sawah dan parak akan diberikan kepada anak perempuan, biasanya setiap anak perempuan akan diberikan sawah sebanyak *sapiriang*. *Ulayat* kaum merupakan *harato pusako tinggi* dalam kaum sehingga penggunaannya harus atas persetujuan seluruh anggota kaum. Jadi tanah kaum ini berupa tanah yang status kepemilikannya, dimiliki oleh kaum atau suku tertentu dalam kelompok masyarakat. Misalnya tanah milik kaum suku kampai, suku panai, suku sikumbang dan suku melayu. Keempat suku tersebut memiliki tanah kaumnya masing-masing dan batas-batas tertentu dengan pengolahannya akan diolah oleh kemenekan mereka. sebenarnya hak kepemilikan dan hak mengusahakan dimiliki oleh seluruh anggota suku atau kaum. Tanah ini nantinya akan diatur oleh penghulu atau *niniak mamak* pada kaum tersebut. Tanah jenis ini tidak dapat dijual dengan alasan penguasaanya milik bersama (komunal) yang gunanya untuk menjamin kehidupan suku mereka.

c. Ulayat Saparuik

Ulayat saparuik juga dikenal dengan *harato pusako randah* merupakan harta pencarian dari orang tua atau harta induaknya yang dimiliki oleh ayah dan ibunya semasa perkawinan. Harta ini juga dikenal dengan *ulayat saparuik*. Pusako rendah bisa berupa barang, hewan, tanah, rumah, *tabek* (kolam ikan), ladang dan sawah *sapiriang*. Apabila kedua orang tua meninggal maka akan diwariskan kepada anak-anaknya. Selain itu juga didalam *harato pusako randah* juga terdapat harta *tembilang ameh* yang merupakan hasil dari pembelian orang tuanya baik berupa sawah dan ladang. Adapun *harato pusako randah* diperbolehkan untuk dijual oleh anak-anaknya dengan syarat "*hiduak lah bapadok-padok, gagam marunduak-runduak* (hidup sudah sengsara), namun mereka perlu meminta izin dengan mamak mereka. Maka dari itu ada beberapa keluarga yang memiliki sawah dan ladang milik pribadi bukan milik kaum. Dikarenakan orangtuanya mendapatkannya dari hasil jual beli (*silih rugi tanah*).

"Menurut Bapak Dtk Rj Bintang dan Bapak M, kalau *harato saparuik* ini sebenarnya milik perempuan (*padusi*). Namun sepanjang zaman sudah ada anak laki-laki juga berhak mendapatkan kadang berdasarkan kesepakatan, saya lebih mengikuti cara Islam. *Tanah saparuik ini isinyo ado tanah sawah, tanah kariang yang tanamanyo durian, maggis, ado juo tabek* (tanah saparuik ini isinya ada tanah, sawah, tanah kering yang tanamannya durian, manggis dan ada juga kolam)"

Hutan akan berubah statusnya jika hutan tersebut sudah milik perorangan inilah yang disebut dengan *ulayat saparuik*. Sehingga ulayat suku mulai di klaim menjadi *ulayat saparuik* atau milik perorangan, maka dari itu status *rimbo tinggi* akan berubah menjadi *rimbo randah* yang mana lahan tersebut sudah di buka dengan ladang. Pengistilahan *rimbo randah* juga merupakan tempat *tabek tabang* yang berarti tebang

sendiri-sendiri atau hak kepemilikan sendiri. Biasanya *rimbo randah* berada di lereng bukit yang sudah dijadikan ladang milik perorangan. Menurut Bapak Dtk Lelo di Rajo hutan ulayat suku bisa menjadi *ulayat saparuik*;

"....ulayat suku bisa menjadi ulayat saparuik sesuai dengan aturan, tentu ada negosiasi antaro niniak mamak dan kesepakatan, misalkan hutan ko ado kami ka bukak paladangan disitu kemenakan den mintak izin nio buka ladang disinan, dulu kan ba ulayat-ulayat Rajo, Rajo barat yang iko, yang timur Rajo iko, kini ko zaman lah maju kalau lah rancak ndak paralu malapor langsung ramba se, kalau niniak mamak ndak muah malarang beko ndak ado perkembangan kemenakan (hutan ulayat bisa menjadi hutan saparuik sesuai dengan aturan, tentu ada negosiasi antar niniak mamak dan kesepakatan, misalkan hutan ini ada kami berencana mau buka ladang disini, kemenakan saya mintak izin, dulu kan ini berulayat-ulayat, ulayat barat yang raja ini, yang timur raja ini, sekarangkan sudah zaman maju, kalau sudah bagus ngak perlu melapor langsung bersihin aja, tapi niniak mamak tidak enak melarang, nanti tidak ada perkembangan bagi kemenakan)".

Kenyataanya, *rimbo randah* akhirnya bisa dijual oleh niniak mamak dulunya dikarenakan hutan tersebut merupakan sudah ada hasil garapan pribadi. Sesuai dengan pepatah patitih Minangkabau "*nan dulu nan mandapek nan kamudian manjlanan* (sudah habis hartanya dijual oleh ninik mamak dahulu, tinggal cerita saja yang kita dengarkan). Hal inilah yang membedakan antara ladang dengan *parak*, jika *parak* berdekatan dengan rumah dan di tanah yang datar, sedangkan ladang jauh dari rumah. Adapun dalam pembukaan ladang pada masyarakat Alam Surambi Sungai Pagu, mereka akan melakukan terlebih dahulu *mancancang malatiah* yaitu

mencari *rimbo* atau *bukik* yang belum ada pemiliknya. Setelah mereka mendapatkannya, maka mereka akan terlebih dahulu meminta izin ke *ninik mamak* mereka untuk mengolah lahan tersebut.

3. Skema Perubahan Hak Ulayat

Ada beberapa hal yang menyebabkan perubahan 4 *ulayat suku* di Alam Surambi Sungai Pagu. Nyatanya dataran rendah merupakan lahan yang secara intensif dikelola oleh nenek moyang di *ulayat adat*, sedangkan hutan merupakan daerah yang kurang diolah secara intensif pada masa itu. Dengan adanya beberapa perubahan yang terjadi di 4 *ulayat adat* ini baik semenjak berubahnya peraturan tentang pengolahan hutan, pengenalan komoditi pasar, perluasan daerah atau pembukaan daerah administratif baru dan datangnya pendatang di beberapa daerah baik di Nagari Pakan Rabaa, Nagari Pasir Talang Timur, Nagari Koto Baru, Nagari Pulakek Koto Baru dan Nagari Alam Pauh Duo. Ada beberapa hal yang menyebabkan penguasaan *ulayat suku* menjadi *ulayat kaum* baru, pribadi dan dimiliki oleh orang luar. Sehingga seseorang dapat melakukan pengusahaan lahan di wilayah ke-5 Nagari atau di daerah *ulayat suku*. Ada beberapa hal yang menyebabkan orang luar yang mengolah *ulayat suku* antara lain;

- a. Perjanjian antara Rajo Bagindo di Balun dengan orang pendatang dengan sistem bagi hasil kepada raja atau pemberian upeti, perjanjian ini dilakukan antara orang luar yaitu orang Solok yang datang untuk membuat kebun dan mengolah sawah di *ulayat suku* Kampai di *wilayat adat* Koto Parik Gadang Diateh.
- b. *Sumando manyumando* atau perkawinan, jika melalui perkawinan suku lain dapat memanfaatkan *ulayat milik kaum istrinya*, dikarenakan suaminya akan menjadi *urang sumando* dan sekaligus *ande bapak* yang akan mengolah tanah kaum milik istrinya. Status pernikahan merupakan aspek yang berpengaruh terhadap pengusahaan hak kepemilikan lahan.

Jika tidak memiliki suku yang sama dengan suku yang berkuasa di suatu wilayah, maka seseorang harus menikah dengan salah satu anggota kaum dari suku Suku Kampai, Tigo Lareh, Panai dan Melayu. Hal ini dilakukan karena *ninik mamak* sebagai pihak yang berkuasa merasa memiliki lahan sehingga kegiatan apapun yang dilakukan pada lahan tersebut harus menghasilkan keuntungan bagi kaumnya terutama kemenakan perempuan. Hal ini dilakukan karena masyarakat menganut sistem kekerabatan matrilineal sehingga anak dari saudara perempuan adalah yang akan meneruskan generasi kaum. Jika melalui perkawinan suku lain dapat memanfaatkan *ulayat milik kaum istrinya*, dikarenakan otomatis suaminya sebagai *urang sumando* dan sekaligus *ande bapak* dia yang akan mengolah tanah kaum milik istrinya seperti yang diungkapkan Bapak M;

“....*cuman awalnya yang ka ampek ko yang punyo ulayat kampai, panai, melayu, sikumbang misalnya ka arah timur panai, untuk kelanjutan itu cuman mengetahui se nyo ulayat mereka, kalau ado urang sikumbang yang bukan ulayat kaum inyo ndak jadi masalah, dek karena awalnya urangko sumando manyumando, awak misal suku panai menikah samo urang melayu dan wak olah atau wak baok ka panai baa cara memperdebatkanyo, yang mangolah kemenakan-kemenakan awak juo. Yang penting awak mengolah itu mintak izin samo niniak mamak awak (cuman awalnya yang ke empat suku tadi yang punya panai, melayu, sikumbang, kampai misalnya yang ke arah timur panai, untuk kelanjutanya itu cuman sekedar mengetahui saja ulayat mereka, kalau ada orang sikumbang yang mengolah di bukat ulayat mereka tidak masalah, karena awalnya juga orang ini mengikat suku mereka dengan hubungan perkawinan, seperti saya dari suku*

panai yang menikah dengan suku melayu dan saya bisa mengolah ulayat kaum istri saya atau saya bawa ke panai gimana cara memperdebatkannya yang mengolah kemenakan-kemenakan kami juga. Yang penting mengolah itu ada izin dari ninik mamak”.

“kadang-kadang mamak ko dibaoknyo tanah kaum di rumah istrinyo, dijualnyo tu tentu ndak ado lai harato kemenakan, iko lah yang mbuek perselisihan (terkadang saudara laki-laki ini dibawaknya tanah milik kaum di rumah istrinya, dijualnya harta tersebut, pasti tidak ada lagi harta miliki kemenakan, ini yang bisa membuat perselisihan)”

- c. *Tanah tagadai*, walaupun sejatinya tanah kaum tidak diperbolehkan untuk dijual namun tanah kaum dapat digadaikan dengan beberapa alasan menurut “*rumah gadang katirisan*” (rumah gadang sudah rusak (*lapuak*), tentu mereka bilang sama mamak mereka untuk diperbaiki, tetapi tidak ada uang akhirnya karena malu bisa menyalang/meminjam uang), “*mayiak tabujuar*” (tidak terselamat mayatnya, yang berarti tidak ada uang, pelampok/penghilang malu bisa digadai sebentar, barulah nanti ditembus), “*rando dapek malu*” (melahirkan tetapi tidak ada ayah atau malu mamak kemenakanya mau sekolah tinggi tapi uang tidak ada), dan “*gadiah gadang ndak balaki* (anak perempuan belum menikah)”, namun penjualan tanah kaum di Alam Surambi Sungai Pagu jarang terjadi tanpa seizin ninik mamak.

Terkadang ada beberapa kasus di 5 nagari ini terjadi penjualan tanah kaum seperti di Nagari Pasir Talang Timur, salah satu keluarga yang mana orangtuanya sudah meninggal, saudara laki-laki mereka mengakui tanah tersebut adalah miliknya. Namun saudara perempuan mereka tidak menyetujui akan hal itu dikarenakan tanah tersebut merupakan tanah kaum. Sehingga terjadi konflik antar kerluarga mereka.

Berkaitan dengan hal itu, jika terjadi penjualan tanah kaum tanpa seizin ninik mamak, hal ini akan menimbulkan sebuah konflik tidak hanya dalam keluarga mereka tetapi juga di dalam suku. Namun penjualan tanah kaum di Alam Surambi Sungai Pagu jarang terjadi tanpa seizin ninik mamak.

- d. *mancancang malatiah* atau *maramba* tanah kosong yang dilakukan oleh ninik mamak dulunya dan kemenakan untuk tujuan pengembangan ekonomi, mengenai tanah kaum sebenarnya tanah kaum dapat di diperluas dengan cara membuka *ulayat suku* yang belum diolah seperti *rimbo* yang belum di rambah ataupun tanah yang masih kosong. Hal ini menyebabkan tanah kaum dapat ditemukan di daerah bukaan lahan baru yaitu ulayat Adat Koto Baru dan Ulayat Adat Alam Pauh Duo, sehingga jika ditemukan di Nagari Pulakek Koto Baru memiliki tanah kaum di Simancung seperti Bapak Dtk Ktk Lelo di Rajo yang memiliki tanah kaum di Simancung ataupun Suku Kampai yang ulayat kaumnya secara adat di Pakan Rabaa, namun kaum kampai juga memiliki tanah kaum di Pasir Talang Timur. Hal ini dikarenakan *mamak* dari mereka yang membuka ladang ataupun sawah di sana. Pembukaan lahan ini dikarenakan beberapa hal menurut Bapak Dtk St Mamat;

“...dek kareno kemenakan lah batambah, mangkonyo niniak mamak yang rajin tadi buka lahan baru di disnan mode Dtk Lelo di Rajo inyo bukak lahan di Simancung tu baguno untuk kemenakannyo beko (dikarenakan jumlah kemenakan bertambah, mangkanya niniak mamak yang rajin tadi buka lahan baru disana seperti bapak Dtk Lelo di Rajo dia buka lahan baru di Simancung itu nantinya berguna untuk kemenakanya)”.

Mencancang malatiah atau *maramba* ulayat kaum baru ini biasanya pada daratan rendah yang belum di olah sama sekali. Hal

ini terjadi akibat lahan yang belum diolah pada suatu daerah seperti dataran rendah di bukit kandi atau pembukaan daerah administratif baru.

d) *Tabek tabang* atau *meramba rimbo* yang dilakukan oleh ninik mamak dan kemenakan untuk mengolah ulayat suku menjadi ulayat *saprauik*. Di Alam Surambi Sungai Pagu hutannya berada di bukit-bukit maka hutan juga disebut dengan *bukik*. *Rimbo* ini pada awalnya status kepemilikannya secara suku. Terkadang, ada beberapa orang yang sudah mengklaim *rimbo* tersebut milik pribadi akibat pembelian ataupun karena dia yang awal membuka *rimbo* tersebut.

“...Menurut Bapak Dtk Sutan Mamat, *niniak mamak nyo tu rajin dulunya mangkonyo di rimbo sinan ado ladang* (niniak mamak mereka rajin dulunya dia sanggup sampai membuka lahan di bukit sana, makanya ada ladang mereka disana)”.

d) *Mengaku mamak*, jika ada orang luar baik orang Solok, orang Sijunjung yang ingin mengolah lahan di Alam Surambi Sungai Pagu. Selain dengan cara menikah mereka dapat mengolah lahan disana dengan cara *mengaku mamak*. Hal ini dilakukan dengan cara mengaku sesama suku dan meminta izin dengan ninik mamak untuk mengolah tanah kaum. Begitu juga dengan orang Jawa yang kebanyakan bisa mengaku mamak dengan membeli suku, sehingga ia dapat mengolah tanah kaum tertentu atau *mendapati suku*. Jika orang Jawa ingin mengaku suku maka dia akan membeli suku tersebut dengan *mandabiah kambing* (memotong kambing), sehingga beberapa kasus di Pekan Rabaa, Pasir Talang, Koto Baru dan Pauh Duo sudah banyak terdapat orang luar yang mengolah ulayat kaum.

“*mengaku mamak, disiko bermacam-macam ado di dalam nagari ko ado yang mangaku mamak ka suku kampai berarti kemenakan kami dan mbuek surat kawin, mengenai tanah di Koto Parik Gadang Diateh tentu*

tiok kaum lah punyo haknyo apo ko bali atau punyo mamaknyo, ulayat suku ko tu ulayat kaum kemenakan perempuan yang punyo”

e. hasil pembelian dan upah buruh, selain mengaku mamak ada cara lain untuk dapat mengolah lahan di suku tertentu dengan cara membeli tanah tersebut biasanya hal ini terjadi dikarenakan suku tersebut hanya membukanya saja seperti di Simancung yang kebanyakan setelah di ramba dan dijualnya kepada orang lain. Contoh lainnya seperti milik tanah kaum suku kampai di Pekan Rabaa milik Rajo Tuanku Bagindo yang mana sawah mereka banyak di kerjakan orang lain dengan bagi hasil. Dulunya juga banyak melakukan *silih rugi tanah*, *silih rugi tanah* ini pembelian bukan menggunakan uang dulunya. Tetapi menggunakan penukaran benda, sehingga banyak sekarang tanah yang didapatkan karena hasil *silih rugi* dulunya¹.

“Menurut Bapak P yang berasal dari ulu Suliti, *awak bali dulu 3 juta, payah dulu masuak rimbo pakan salasa, kini jalan lah rancak, kalau nio bali dulu ado jorong diateh suraik, kalau yang iko punyo kaum keceknyo, ko punyo pribadi, jadi urang yang punyo sabalah ko harus tahu dan manakan suraik jual bali tanah, kadang jalan lah racak bantindaknyolai, kalau ado saksi tu ndak bisa, sabab disiko lah babuek surek pajanjian* (saya dulu beli tanah ini 3 juta, dulu sangat sulit masuk hutan pakan salasa, sekarang sudah bagus jalan, kalau mau beli dulu harus ada jorong dan diatas surat, kita mesti tahu tanah ini milik kaum, yang ini milik pribadi, jadi orang yang punya sebelahan tanah harus juga tahu dan tanda tangan surat jual beli tanah, kadang jalan sudah bagus orangnya mau tanahnya kembali makanya kalau sudah ada saksi itu tidak bisa lagi, sebab kalau

¹ Tetapi ada juga sekarang dengan membuat bukti sega yang mana dikeluarkan oleh KAN.

disini sudah ada perjanjian diatas surat”.

“Berdasarkan penjelasan lainnya Ibu B, jikalau ada suku lain yang mempunyai ladang di ulayat kampai, padahal bukan ulayat suku dia di Koto Parik Gadang Dibawah berarti dia membeli lahan tersebut, dan penjualan tersebut hanya antar suku Alam Surambi Sungai Pagu, *biang tabuik ganting putuih* berarti memberi gelar seseorang walaupun dia bukan suku Parik Diateh”

- f. Investor perusahaan kayu dan tambang, kelompok tani, dan koperasi merupakan skema pembukaan ulayat suku yang mana dapat dimanfaatkan oleh seseorang yang ingin melakukan penguasaan lahan untuk pengembangan ekonomi anak nagari. Hal ini terjadi akibat legalnya peraturan daerah tentang pengolahan hutan di ulayat adat. Beberapa investor berkat bantuan anak kemenakan yang mendapatkan izin dari rajo dan ninik mamak untuk mengolah wilayah adat. Sebagian perusahaan itu berdiri merupakan usaha anak kemenakan dari masing-masing ulayat adat baik perusahaan kayu dan tambang. Namun ada beberapa daerah yang perusahaan tersebut didirikan secara ilegal. Dengan adanya perusahaan kayu, perkebunan dan tambang tersebut maka rajo dan ninik mamak akan mendapatkan keuntungan atau ganti rugi berupa uang dalam pembukaan wilayah suku tersebut.

“Menurut Dtuak St M dan Dtk L Drjo, banyak anak kemenakan ko mangolah rimbo inyo tabang kayu sacaro ilegal, inyo tambang ameh, kalau ndak diagiah ndak ado karajo inyo daripado inyo ndak ado karajo dipadian se (banyak anak kemenakan ini mengolah hutan, kalau tidak diberi tidak ada kerjanya, lebih baik dibiarkan saja)”

Selain melalui investor, beberapa ulayat kaum di buka oleh kelompok tani dan koperasi. Beberapa kelompok tani dan

koperasi dapat membuka ulayat adat dengan mengajukan kepada pemerintah Nagari, KAN dan izin ninik mamak di ulayat adat tersebut. Beberapa kasus di Pulakek Koto Baru, Pekan Rabaa, Alam Pauh Duo yang beberapa *rimbo* dibuka oleh kelompok tani dan koperasi. Nyatanya pada kelompok tani ataupun koperasi tersebut dibentuk dengan beberapa suku yang berbeda, bahkan suku yang bukan asli orang Alam Surambi Sungai Pagu, sehingga dapat dijumpai beberapa suku luar yang mengolah ulayat adat. Namun sejatinya dalam pengolahan ulayat suku dapat digunakan siapa saja baik orang luar atau pendatang, asalkan mendapatkan izin dengan rajo dan ninik mamak dan berdomisili di Alam Surambi Sungai Pagu.

4. Antara Ulayat Adat dan Hutan Nagari

Sejatinya produk hukum ini diciptakan merupakan salah satu cara melegalkan hutan pada masyarakat Minangkabau yang mana tidak ada sepeserpun hutan adat milik negara awalnya. Sehingga pemberian hak akses kepada masyarakat, tanpa disadari sejalan dengan memberikan perlindungan hutan dan memberikan hak perusahaan-perusahaan untuk mengolah hutan. Tanpa disadari juga kekuasaan orang-orang tertentu yang memiliki akses yang dapat mengolah hutan nagari sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ribot dan Peluso (2003:157) mengenai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari suatu benda. Akses dalam pengertian Ribot dan Peluso ini berupa bundel atau sekumpulan kekuasaan (*bundel of power*) dan jaringan kuasa (*web of power*), dengan adanya produk hukum tersebut masyarakat khususnya masyarakat di Hutan Nagari terdapat sekumpulan orang dalam pengolahan hutan nagari. Nyatanya kekuasaan tersebut hanya dimiliki orang-orang tertentu saja. Berkaitan dengan hal itu hak masyarakat adat dengan adanya produk hukum tidak menjamin bahwa seluruh masyarakat dapat mengolah hutan adat mereka, kemampuan aktor untuk mendapat manfaat sumber daya alam

ditentukan oleh faktor-faktor yang beragam, seperti akses terhadap teknologi, modal, pasar, pengetahuan, otoritas, identitas sosial, dan juga relasi sosial (lihat Darmanto dan Setyowati: 2012:20). Maka dari itu penelitian ini akan mengungkap pengertian ulayat adat masyarakat di 5 Hutan Nagari, dan dengan adanya SK Hutan Nagari apakah hal itu menguntungkan bagi seluruh masyarakat dalam mengolah wilayah adat mereka.

Semenjak kedatangan Belanda tidak banyak merombak kehidupan Masyarakat Alam Surambi Sungai Pagu. Kedatangan Belanda merubah fungsi hutan yang semulanya belum banyak diolah oleh masyarakat. Belanda mengakui adanya raja tetapi Belanda juga membentuk kepala suku yang akhirnya mengaburkan kedudukan raja. Kepala suku diperintahkan untuk mengumpulkan upeti berupa sawah dan ladang milik masyarakat, sedangkan rimbo yang belum diolah dan curam dilarang untuk dilolah. Tetapi Belanda juga berhasil membuat perkebunan di daerah Pekonina dan Belanda lebih banyak menguasai wilayah perkebunan di daerah Kayu Aro. Semasa Belanda pengolahan hutan sudah mulai dilakukan di Alam Surambi Sungai Pagu, hanya saja pembukaan wilayah hutan hanya dilakukan secara pribadi guna kepentingan Belanda. Namun semenjak Belanda datang sudah terjadi pelarangan pengolahan hutan yang ketinggiannya lebih dari 45 ° di Alam Surambi Sungai Pagu. Sehingga banyak masyarakat tidak banyak mengolah hutan pada masa itu. Apalagi semasa Indonesia Merdeka pada era Soeharto, belum intensifnya pengolahan hutan di Alam Surambi Sungai Pagu, memberikan keuntungan pemerintah dengan diberlakukannya kebijakan mengenai perlindungan hutan. Produk hukum peninggalan Belanda yang menyamaratakan hak atas tanah di Indonesia sesuai dengan UU Agraria No. 55 Tahun 1870. Hal itu juga berlaku semasa pemerintahan Indonesia yang mana pemerintah sebagai penguasa tanah berdasarkan lembaran Negera No. 94F Tahun 1874 yang berbunyi semua tanah yang belum dikerjakan atau tanah liar di Pulau Sumatera yang telah

dijajah Belanda, selama dari hak penduduk hak-haknya yang dapat dari hukum pembukaan tanah, adalah milik negara. Atas tanah milik negara itu, hanya berlaku hak-hak yang dipegang negara dengan mengingat hak rakyat guna membuka lahan. Sehingga hutan-hutan yang belum terdapat kepemilikan di Alam Surambi Sungai Pagu menjadi milik negara. Produk hukum yang membatasi masyarakat tentang tanahnya tidak berhenti sampai disana dengan dikeluarkannya UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan UU lainnya yang mengatur beberapa jenis hak. Sehingga negara memberi patok-patok untuk menandai wilayah hutan sebagai hutan lindung dan hutan produksi bekas hutan lindung dari Belanda. Ladang masyarakat termasuk dalam kawasan hutan lindung yang tidak boleh diakses oleh masyarakat, sedangkan bagian barat bukit barisan dijadikan hutan produksi. Walaupun semenjak peraturan-peraturan itu berlaku masyarakat tidak pernah menganggap hutan tersebut merupakan hutan negara, karena bagi mereka tidak ada sejangkalpun hutan milik negara yang hanya ada bahwa hutan merupakan milik 4 ulayat adat. Nyatanya sebagian masyarakat memang menyatakan bahwa hutan tersebut merupakan hutan lindung dari Belanda, sehingga setelah berlakunya pembagian wilayah batas-batas hutan oleh pemerintah mengaburkan status hutan dan masyarakat tanpa sadar mengakui bahwa hutan tersebut merupakan hutan lindung.

Tidak hanya itu, pemerintah juga membentuk wilayah administratif untuk pengolahan wilayah di Alam Surambi Sungai Pagu. Setidaknya sudah beberapa kali perubahan sistem pemerintah di wilayah Alam Surambi Sungai Pagu, pada tahun 1960 Alam Surambi Sungai Pagu resmi menjadi satu Kecamatan dengan 2 Nagari yaitu Nagari Pasir Talang dan Nagari Koto Baru, dibawah nagari terdapat luhak dan kampung-kampung dihimpun menjadi beberapa desa. Dengan adanya pemerintahan administratif memudahkan pemerintah untuk mengatur dan mengolah wilayah di Alam Surambi Sungai Pagu dengan dibentuknya Kepala Desa (Wali

Nagari). Pada tahun 1999 kemudian dikeluarkannya peraturan baru 2000 dengan otonomi daerah, peraturan ini juga berimbas kepada daerah administratif di Alam Surambi Sungai Pagu yang pada masa itu masih tergabung daerah Kabupaten Solok, sehingga daerah luhak dan kampung berubah menjadi daerah administratif terendah yaitu jorong. Disusul dengan lepasnya Alam Surambi Sungai Pagu dengan Rantau XII Koto menjadi kabupaten tersendiri yaitu Kabupaten Solok Selatan terkhususnya Alam Surambi Sungai Pagu bertambah menjadi 2 kecamatan pada tahun 2004 yaitu Kecamatan KPGD dengan Nagari Pekan Rabaa merupakan bekas balai atau pasar hari rabu dan Kecamatan Pauh dengan terdapat juga balai hari selasa atau Pekan Selasa yang menjadi Nagari Alam Pauh Duo. Pemberian batas administratif mengaburkan batas-batas ulayat yang pada akhirnya pengcalaiman hutan belum ditambah milik nagari dan jorong masing-masing. Semasa berubahnya daerah administratif penguasaan rajo mulai melemah, tidak adanya pergantian rajo sebagai penguasa dan pangatur 4 ulayat suku masing-masing di Alam Surambi Sungai Pagu. Sehingga rata-rata umur raja sudah tua, bahkan terkhusus raja Disambah telah meninggal, namun belum berujung pergantian. Perebutan antar garis keturunan yang ingin menjadi raja akhirnya pergantian raja sangat sulit di pilih kembali. Seiring dengan itu pembentukan KAN di 4 wilayah adat ini, memperjelas pengizinan secara administratif.

Pengolahan hutan di Alam Surambi Sungai Pagu menjadi tindakan ilegal pada semasa Soeharto, walaupun tindakan ilegal masih saja beberapa masyarakat berladang ditereng bukit. Pada tahun 1998 pemerintah memberikan izin perusahaan kayu dari Malaysia yang masuk di wilayah Alam Surambi Sungai Pagu tepatnya di wilayah Pekan Rabaa dan Pasir Talang untuk memanfaatkan hutan di Bukit Kandi, dimasa inilah pula maraknya penebangan kayu liar yang terjadi di tiap-tiap nagari dan masyarakat mulai menyadari mulai berharganya kayu sebagai mata pencaharian. Hal inilah yang menyebabkan hutan mulai

diolah oleh anak kemenakan, karena mereka menganggap hutan merupakan ulayat adat yang boleh diolah oleh anak kemenakan, namun status hukum mereka kurang karena mereka melakukan tindakan illegall logging. Dengan demikian banyak oknum-oknum yang bekerja sama, sehingga pelanggaran yang dilakukan masyarakat baik ninik mamak terhadap hutan ulayat melemah. Hanya orang yang berkuasa saja, memiliki izin dan dekat dengan oknum-oknum untuk mengolah rimbo di Alam Surambi Sungai Pagu. Sebelum maraknya penebangan liar, sudah ada beberapa masyarakat yang mengolah ladang di hutan lepas atau rimbo gadang, namun ladang tersebut merupakan ladang pribadi dengan beberapa skema baik membuka lahan untuk perkebunan di rimbo Pekan Rabaa, lahan yang dibuka secara bersama seperti koperasi atau kelompok tani di Simancung. Setelah berakhirnya masa Soeharto, tidak memberhentikan masyarakat untuk pemanfaatan hutan di Alam Surambi Sungai Pagu, apalagi setelah itu masuknya beberapa perusahaan tambang illegall di beberapa hutan di Alam Surambi Sungai. Penghasilan ladang yang kurang membuat masyarakat mulai beralih mata pencaharian atau bekerja sebagai penambang illegall, dan kelompok pengusaha yang sejatinya merupakan anak kemenakan yang memiliki jaringan dengan orang luar mengerok keuntungan dengan adanya hasil bumi yang bisa di manfaatkan di Alam Surambi Sungai Pagu.

Setelah adanya peraturan mengenai gencar-gencarnya reforma agraria untuk pengembalian pemanfaatan hutan sebagai hak milik masyarakat atau mengakui keberadaan akan adanya masyarakat adat. Sehingga beberapa produk hukum yang mulai dikeluarkan seperti Hutan Adat yang disahkan oleh Perda, ataupun aturan yang mengatur tentang perhutanan sosial yang bertransformasi pada saat ini berdasarkan keputusan Permen LHK. No .83/2016. Perhutanan sosial ini terbagi menjadi beberapa skema yaitu Hutan Adat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemitraan, dan IPHPS/KULIN KK. Produk hukum tersebut

menyamakan status hutan yang berada di tiap-tipa desa di Indonesia. Tanpa menilai status hutan bagi masyarakat adat itu sendiri. Sejatinya hal itu juga terjadi pada hutan di Alam Surambi Sungai Pagu berkat keberhasilan LSM Warsi dan pemerintah Sumbang pada tahun 2008 yang tujuannya untuk melindungi hutan dan memberikan hak pengolahan pada masyarakat Alam Surambi Sungai Pagu secara hukum pada Hutan Nagari di Simancung. Beberapa

nagari mulai mengajukan hutan mereka menjadi hutan nagari yang semulanya merupakan ulayat suku yang pada dataran rendah sudah terbagi-bagi menjadi milik beberapa kaum, sedangkan status rimbo masih banyak yang belum diolah. Masyarakat terkendala dalam mengolah akibat status hutan yang menurut negara milik negara dan merupakan hutan lindung, walaupun secara adat merupakan ulayat adat.

Tabel 3. Antara Ulayat Adat dan Hutan Nagari

No	Nama Hutan Nagari (admin.)	Status Kawasan	LPHN	Ulayat Adat	Lokasi Saat ini (admin.)	Nagari administratif lain yang terkait	Wilayah kewenangan KAN
1	Hutan Nagari Pakan Rabaa Luas: 4.260 ha	HL dan HPT	1. Caniago, 2. Kutu anyia, Sikumbang (Tigo Lareh) 3. Kampai	Ulayat adat koto parik gadang diateh. (ulayat suku kampai/Tu anku Rajo Bagindo)	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	i) Nagari Pakan Rabaa Timur; ii) Nagari Pakan Rabaa Barat; iii) Nagari Pakan Rabaa Tengah; iv) Nagari Pakan Rabaa Induk v) Pakan Rabaa Utara	KAN Pakan Rabaa termasuk 7 Penghulu baru
2	Hutan Nagari Pasir Palang Timur Luas : 2.395 Ha	HL dan HPT	1.	Ulayat adat Pasir Talang (Ulayat Rajo Nan batigo; Suku Malayu, Tigo Lareh, Panai)	Kecamatan Sungai Pagu	Pasir Talang Barat, Timur, Tengah, Induk	KAN Pasir Talang
3	Hutan Nagari Koto Baru 1.145 Ha	HL dan HPT	Pendatang	Ulayat adat koto baru (Ulayat Suku Rajo Nan Batigo; Suku Melayu, Tigo Lareh dan Panai)	Kecamatan Sungai Pagu	Koto Baru, Pulakek Koto Baru, Pasar Muaro Labuh Koto Baru dan Bomas Koto Baru, Sako Pasir Selatan, Sako Selatan Pasir Talang	KAN Koto Baru

4	Hutan Nagari Pulakek Koto Baru (4.265 ha)	HL dan HPT	1. Bariant Melayu Ampek paruik Koto kaciak Durian (Suku Melayu)	Ulayat adat koto baru (Ulayat Suku Rajo Nan Batigo; Suku Melayu, Tigo Lareh, dan Panai)	Kecamatan Sungai Pagu	Koto Baru, Pulakek Koto Baru, Pasar Muaro Labuh Koto Baru dan Bomas Koto Baru, Sako Pasir Talang, Sako Selatan Pasir Talang	KAN Koto Baru
5	Hutan Nagari Alam Pauh Duo (650 ha)	HL dan HPT	1. Bariant, Durian dan Canigo (Suku Melayu) 2. Pendatang	Ulayat Pauh Duo (Ulayat Suku Rajo Nan Batigo; Suku Melayu, Tigo Lareh dan Panai)	Kecamatan Pauh Duo	Nagari Alam Pauh Duo, Nagari Alam Pauh Duo Limo Tigo, Nagari Kapau Pauh Duo, Nagari Luhak Kapau Alam Pauh Duo dan Nagari Pekonina Alam Pauh Duo	KAN Pauh Duo

Sumber : Data Sekunder dan Data Primer, 2018

Semenjak dikeluarkannya pemberian SK. Hutan Nagari di 5 Hutan Nagari yaitu Hutan Nagari Simancung, Hutan Nagari Pekan Rabaa, Hutan Nagari Pasir Talang, Hutan Nagari Koto Baru dan Hutan Nagari Pulakek Koto Baru. Pemberian batas-batas yang selama ini berupa hutan lindung berubah menjadi 2 kawasan yaitu Hutan Lindung yang tidak boleh diolah dan Hutan Produksi Terbatas yang boleh diolah. Hal ini memberikan keuntungan masyarakat asli dan pendatang yang telah lama mengolah hutan sebagai milik ladang mereka dalam kawasan Hutan Produksi, namun berbeda dengan masyarakat yang memiliki ladang yang sudah masuk Hutan Lindung. Tidak adanya aturan yang kuat dalam pelarangan di Hutan Lindung dan akhirnya masyarakat dibiarkan saja untuk mengolah. Ternyata pemberian legal masyarakat untuk mengolah hutan di dalam kawasan Hutan Nagari status HPT menguntungkan orang-orang yang sudah memiliki ladang dan tahu akan kebijakan Hutan Nagari. Adapun tidak banyak lagi kawasan HPT yang dapat dijadikan ladang, jika ada lokasi

hutan tersebut sudah jauh dan masuk dalam kawasan HL.

Keuntungan juga didapatkan dari pengurus LPHN selaku Lembaga Pengolahan Hutan Nagari seperti LPHN Pasir Talang dan LPHN Pulakek Koto Baru, dengan skema hutan yang ada pada Hutan Nagari. LPHN Pasir Talang yang mana beberapa pengurusnya memiliki lahan ladang di Hutan Nagari, namun sejatinya mereka merupakan pendatang namun dikarenakan Hutan Nagari memberikan hak kepada seluruh masyarakat baik penduduk asli ataupun pendatang dapat mengolah Hutan Nagari. Begitu juga dengan pengurus LPHN Pulakek Koto Baru yang memanfaatkan skema Hutan Nagari di wilayah Hutan Produksi untuk mengolah hasil tambang biji emas yaitu PT. RAMB. Dengan adanya Hutan Nagari pemberian legal kepada LPHN dalam perlindungan hutan terhadap perusahaan-perusahaan yang ingin mengolah hasil kayu ataupun hasil bumi di Alam Surambi Sungai Pagu, berjalan lancar. Isu pemanfaatan eksploitasi hutan di Alam Surambi Sungai Pagu

berbanding terbalik dengan Hutan Nagari yang berada di Simancung, terkhusus hutan di Simancung merupakan kawasan Hutan Lindung yang memang di lindungi oleh masyarakat semenjak pembukaan lahan disana. Bahkan menjadi beberapa sorotan rapat 13 negara pada masa itu untuk melindungi hutan Simancung. Hanya saja penamaan hutan nagari yang tidak cocok karena lokasi hutan simancung berada di Jorong Simancung. Hal itu juga berbeda dengan Hutan Nagari di Koto Baru, pengurus LPHN yang bukan asli pendatang dan tidak memiliki ladang di Hutan Nagari Koto Baru. Menyebabkan kondisi hutan di Koto Baru tidak banyak diketahui.

Sejatinya ulayat suku digunakan untuk kepentingan bersama untuk kepentingan pengembangan ekonomi. Semenjak adanya pelegalan terhadap hutan menjadi Hutan Nagari masyarakat asli maupun pendatang memanfaatkan hutan untuk ladang secara pribadi. Adanya Hutan Nagari juga memberikan kewenangan kepada siapa saja yang ingin mengolah Hutan Nagari secara pribadi dengan skema perizinan. Semenjak tidak beroperasi lagi PT. AMT pada tahun 2012, pada tahun 2016 PEMDA mengeluarkan surat perizinan untuk pengolahan Bukit Kandi bekas PT.AMT untuk dikelola masyarakat, sebelum itu juga sudah banyak perusahaan-perusahaan yang meingicar bijih besi dan emas di Bukit Kandi. Dikarenakan adanya LPHN Pasir Talang dan LPHN Pekan Rabaa menggagalkan untuk pengolahan bukit kandi tersebut. Ternyata tidak seperti yang dibayangkan dibalik hal tersebut masyarakat pemilik modal sudah berlomba mengolah bekas PT. AMT tersebut untuk mengeruk hasil bumi di bukit kandi. Hal itu juga menjadi perebutan ulayat antara Pasir Talang dan Pekan Rabaa secara administratif dan mengaburkan ulayat adat antara Pasir Talang dan Pekan Rabaa.

D. KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah mengeluarkan peraturan yang memberikan hak pengolahan hutan di Kabupaten Solok Selatan dengan skema Hutan Nagari

tidak melihat secara langsung dalam pemanfaatan hutan di Alam Surambi Sungai Pagu. Bahwa secara kepemilikan merupakan ulayat adat terbagi menjadi 4 yaitu ulayat adat PGD, ulayat adat Pasir Talang, ulayat adat Koto Baru dan ulayat Pauh Duo. Ulayat adat ini terbagi menjadi rimbo yang merupakan hutan lepas yang memang belum diolah dan daratan rendah (tanah data). Ulayat adat ini digunakan untuk suku yang mana suku tersebut terbagi dalam beberapa kaum. Setiap anak kemenakan dalam kaum berhak memanfaatkan ulayat suku guna pengembangan ekonomi. Namun ketidaktahuan mekanisme masyarakat menegai hutan nagari dan lokasi hutan nagari yang ditetapkan berada di wilayah administratif menyebabkan hanya daerah administratif saja yang dapat mengolah. Sedangkan realitanya pengolahan hutan nagari berupa ladang, pengolahan kayu dan tambang secara ilegal pada anak kemenakan ataupun pendatang yang sudah berdomisili di Alam Surambi Sungai Pagu, dengan adanya hutan nagari memberikan kemudahan kepada orang-orang tertentu saja dalam pengolahannya dan menjadi legal. Padahal ulayat adat ini tidak seperti yang dipikirkan oleh pemerintah, bahwa ulayat adat ini milik bersama ke 4 ulayat adat atau 4 ulayat suku yang kaum-kaumnya tinggal di satu kewilayahan yang sama dan dibatasi dengan kampuang-kampuang, sedangkan sekarang ini sudah terpisah secara administratif. Sehingga ditemukan batas-batas administratif yang tidak sesuai dengan ulayat adat, apalagi dengan pemekaran wilayah administratif seperti ulayat adat Parik Gadang Diateh merupakan milik suku Kampai yang tinggal di seluruh Kecamatan Parik Gadang Diateh, ulayat adat Pasir Talang merupakan milik Suku Panai, Suku Tigo Lareh dan Suku Melayu yang tinggal di Nagari Pasir Talang, Nagari Pasir Talang Induak, Nagari Pasir Talang Timur dan sebagian wilayah luhak nan tujuh di wilayah KAN Koto Baru dan KAN Pauh Duo, sedangkan ulayat adat Koto Baru dan ulayat adat Pauh Duo merupakan ulayat perluasaan kekuasaan dari Pasir Talang dan penyebaran penduduk pendatang dan milik suku Panai,

Suku Tigo Lareh dan Suku Melayu. Wilayah administratif untuk ulayat adat Koto Baru yaitu Nagari Koto Baru, Pulakek Koto Baru, Pasar Muaro Labuh Koto Baru dan Bomas Koto Baru, Sako Pasir Talang, Sako Selatan Pasir Talang, sedangkan wilayah administratif untuk ulayat adat Pauh Duo yaitu Nagari Alam Pauh Duo, Nagari Alam Pauh Duo Limo Tigo, Nagari Kapau Pauh Duo, Nagari Luhak Kapau Alam Pauh Duo dan Nagari Pekonina Alam Pauh Duo.

Adapun dari penjelasan diatas, peneliti merekomendasikan bahwa perlunya peraturan yang memang menjamin pelegalan penguasaan ulayat adat tidak hanya pada penunjukan dimana ulayat itu berada seperti penunjukan atau memberikan aturan Hutan Nagari di 5 Nagari yang mana Hutan Nagari tersebut berada di daerah administratif. Sebagaimana yang sudah dijelaskan seperti Hutan Nagari di Nagari Pekan Rabaa yang diolah masyarakat Nagari Pekan Raba, lalu bagaimana masyarakat Nagari lainnya yang masuk dalam ulayat adat dan tidak memiliki hutan begitu juga dengan Hutan Nagari lainnya. Walaupun setelah ada penunjukan yang secara sah milik masyarakat berupa Hutan Nagari ataupun Hutan Adat yang dapat diolah seluruh masyarakat dalam ulayat adat, maka penting untuk pemerintah dan LSM mendampingi dalam pengolahan

hutan tersebut. Dikarenakan pengolahan hutan tidak menyangkut hak kempilikan saja yang sudah diberikan secara adat tetapi terdapat juga aktor-aktor yang memainkan peran, memiliki kekuasaan, jaringan, uang untuk mengambil keuntungan dengan adanya pelegalan suatu hutan yang telah diakui negara terhadap Hutan Nagari atau Hutan Adat.

E. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin mengucapkan trimakasih kepada KKI-Warsi yang telah memberikan bantuan dana dalam melakukan penelitian ini dan para tim tanah adat Minangkabau terkhusus untuk Bapak Yando yang telah mengarahkan dalam penulisan. Penulis juga tidak lupa mengucapkan trimakasih kepada masyarakat Alam Surambi Sungai Pagu, dengan adanya tulisan ini membuka pemikiran kita tentang keanekaragaman sistem tenurial masyarakat adat di Indonesia terkhususnya pada masyarakat Minangkabau. Sehingga perlulah pertimbangan para pemangku kebijakan untuk memberikan kewenangan dalam pengolahan sumber daya alam kepada masyarakat adat secara berkelanjutan dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwibowo, S. (2016). *Materi untuk Kelompok Belajar Ekologi Politik*.
Arifin dkk. (2005). *Antropologi Ekologi*. Laboratorium Antropologi FISIP.
Bogdan, Robert. (1992). *Pengantar Metode Penelitian kualitatif : Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional.
Damsar. (2001). *Hak Atas Tanah Adat Minangkabau*. Jurnal Antropologi Universitas Andalas
Darmanto dan Setyowati. (2012). *Berebut Hutan Siberu: Orang Mentawai, Kekuasaan dan Politik Ekologi*. PT. Gramedia: Jakarta.
Erwin. (2005). *Tanah Adat dan Agama Islam*. Jurnal Antropologi Universitas Andalas
Erwin. (2012). *Tanah Komunal Memudarnya Solidaritas Sosial pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Andalas University Press.
KSPRI. (2017). *Pelaksanaan Reforma Agraria*. Strategi Reforma Agraria.
Ribot, J. C dan N. L. Peluso. (2003). *A Theory of Access dalam Rural Sociological Society*. 68: 153-181.
Tresno. (2017). *Ute' Simagere (Tengkorak Bagi Roh) : Relasi Masyarakat dengan Primata Endemik di Mentawai*. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya. Juni 2017. Vol. 19 (1): 67-87

- Poerwanto, Hari. (2006). *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Suparlan, Parsudi. (2004). *Hubungan Antar Suku Bangsa*. Jakarta: YPKIK.
- Zakaria dkk, (2018). *Perhutanan Sosial: Dari Selogan Menajdi Program*. Sekretariat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.
- Zakaria, R.Yando. (2017). *Etnografi Tanah Adat Konsep-Konsep Dasar dan Pedoman Kajian Lapangan*. Pusat Kajian Etnografi Hak-Hak Masyarakat Adat.

BUDAYA KERJA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILUKADA DI KOTA PADANG PANJANG

Weriza¹*, Asrinaldi², Ernita Arif³

Submitted Article: 30 August 2018

Reviewed Article: 08 September 2018

Accepted Article: 18 December 2018

Abstract

The voter data update shows that there are still data on the TMS voters when the DPS was determined in Padang Panjang City at 4,307 or 10.96% of the voters. This research was carried out with descriptive qualitative method through in-depth interviews with various key informants, namely election organizers in Padang Panjang City and Disdukcapil and campaign teams. The results of this study show that the problem of the voter list is due to PPDP Performance Culture in the voter data updating process which is seen from 6 aspects, namely (1) the responsiveness of PPDP can understand the needs of voters and not constrained population administration factors, (2) professionalism, work according to rules and has a high competence and understanding of territories, (3) productivity, can reduce voters who do not meet the requirements significantly and nil double voters in DPS (4) accountability, PPDP is ready to answer internally the process and results of updating voter data to the KPU and externally in the level of results, (5) cooperation, PPDP has collaborated with internal KPU and external KPU in voter data summary and (6) quality of service, PPDP and KPU along with their staff conduct socialization to the public for the categories of voters eligible and not eligible in the list voters. Voters registered in the voter list are de facto and de jure voters to be one solution to fulfill the comprehensive, accurate and up-to-date principles in voter data collection

Keywords: Performance, Updating of Voter Data, PPDP

A. PENDAHULUAN

Tahapan pemilihan serentak tahun 2015 setelah terbentuknya badan *ad hoc* adalah pemutakhiran data pemilih karena ada potensi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) baik karena sumber data maupun kinerja PPDP dalam melaku-

kan pencocokan dan penelitian di lapangan menurut Rizkiyansyah (2015:19). Untuk itulah dalam pemilihan serentak 2015 proses penyerahan Data Pemilih Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dilakukan secara 1 (satu) pintu di Kementerian Dalam Negeri dan KPU RI melakukan analisa terhadap DP4 dengan kategorisasi jenis kelamin, usia 17 tahun/ sudah menikah, pemilih pemula, usia 90 tahun dan penyandang disabilitas.

Selanjutnya proses sinkronisasi dengan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai DPT terakhir. Proses analisa dan sinkronisasi tersebut dilaksanakan dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang sudah diimple-

¹ Graduate Student of Tata Kelola Pemilu, FISIP, Universitas Andalas, Padang.

² Department of Political Sciences, FISIP, Universitas Andalas, Padang.

³ Department of Communication Science, FISIP, Universitas Andalas, Padang.

* Corresponding Author: werizakpu@yahoo.co.id

mentasikan oleh KPU RI sejak pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 yang lalu dan sudah mengakomodir pemekaran wilayah sesuai kondisi sebenarnya di lapangan. Format SIDALIH sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Peraturan KPU) nomor 4 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang memuat nomor KK, NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, umur, status perkawinan, jenis kelamin, alamat (jalan), RT, RW, kategori disabilitas dan keterangan. Merujuk paragraf di atas kinerja PPDP akan dikaji lebih dalam yaitu kinerja PPDP dalam proses kerja pemutakhiran data pemilih telah berlangsung.

Kinerja menurut Armstrong dan Baron adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut (Suprpto, 2013: 15). Berdasarkan penelitian Suprpto, (2013:164) masih terdapat pemilih ganda sebesar 12.072 pemilih dari 250.571 pemilih yang terdapat di DP4 di Kota Luwu Utara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan memunculkan rekomendasi Panwaslu Kota Luwu Utara untuk memantau secara langsung mengecek kebenaran data pemilih ganda tersebut, juga memperhatikan pemilih meninggal dunia, pindah domisili, perubahan status dari sipil ke anggota TNI/Polri, pemilih memenuhi syarat seperti usia pemilih 17 tahun atau sudah menikah dan penduduk yang belum mempunyai NIK, tetapi sudah berdomisili lama di daerah tersebut karena tidak pernah melapor ke pemerintah setempat.

Peneliti lainnya Idris dkk (2014:3) yang meneliti kinerja KPU dalam proses penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Bupati Kuantan Singingi Tahun 2011 di kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baserah. Alamat pemilih tidak lengkap sehingga menyulitkan PPS dan KPPS dalam membagikan kartu undangan memilih kepada masyarakat, juga ditemukan data masyarakat yang memilih bukan

berdasarkan TPS terdekat, walaupun satu RT namun TPS nya berbeda.

Hal yang sama Devi dkk (2015:3-5) tentang evaluasi kinerja KPU Kabupaten Badung dalam proses pemutakhiran DPT Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2015, terdapat 155 (seratus lima puluh lima) pemilih ganda, 11 (sebelas) penduduk yang sudah meninggal setahun lebih tapi belum dicoret dari daftar pemilih, 47 (empat puluh tujuh) penduduk pindah domisili dan 56 (lima puluh enam) penduduk yang belum terdaftar namanya dalam DPT. Peneliti lain Potabunga (2016) yang membahas tentang kinerja KPU Kabupaten Sigi dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, melihat masih adanya 18 (delapan belas) pemilih ganda, 17.163 NIK invalid, masyarakat yang sudah meninggal terdaftar di DPT dan adanya masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT dengan jumlah DPT sebanyak 165.423 (seratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga) pemilih, selanjutnya masih adanya masyarakat wajib pilih yang tidak datang ke TPS karena tidak mendapatkan kartu panggilan untuk memilih.

Sementara itu penelitian LP3ES (2015) yang melakukan pemantauan pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih dengan mewawancarai PPS dan PPDP menunjukkan masih ditemukannya ketidakpastian penggunaan prinsip *de jure* maupun *de facto* dalam mendaftarkan pemilih. Prinsip *de jure* mengacu pada penggunaan alamat yang terdapat pada Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP), sementara *de facto* menggunakan alamat faktual di mana pemilih tersebut tinggal. Ada 8 % (delapan persen) responden yang mengaku memiliki rumah di tempat lain dan ada 29 % (dua puluh sembilan persen) yang mengaku memiliki KTP di alamat tersebut, kelompok pemilih ini disebut pemilih yang memiliki data ganda. Penelitian itu dilakukan di Provinsi Aceh pada tahun 2004 juga menunjukkan ada 92 % (sembilan puluh dua persen) penduduk terdaftar dalam DPT, 5 % (lima persen) pemilih siluman dan sisanya belum terdaftar.

Fenomena di Kota Padang Panjang memperlihatkan masih adanya data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat/ TMS saat penetapan Daftar Pemilih Sementara/ DPS di Kota Padang Panjang pada tanggal 1 September 2015 yang lalu sebesar 4.307 atau sebesar 10.96 % pemilih dan bila dibandingkan dengan data awal yang diterima PPDP saat turun sebesar 39.292 pemilih. Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat/ TMS itu berdasarkan hasil kinerja cokolit PPDP ke lapangan selama 36 (tiga puluh enam) hari dengan cara mendatangi rumah penduduk satu persatu dan sudah menjadi kewajiban PPDP untuk mengecek langsung ke lapangan berdasarkan Daftar Pemilih (Model A-KWK) yang diterima hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT terakhir pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2015 yang lalu. Tujuan penelitian ini adalah: mendeskripsikan dan menganalisis Budaya kinerja PPDP dalam pemutakhiran data pemilih.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena dengan penelitian ini dapat diketahui secara jelas apa yang menyebabkan masih terdapat pemilih TMS di Kota Padang Panjang pasca penetapan DPS dengan jumlah yang signifikan yaitu 1,65 % bila dibandingkan dengan KPU Kabupaten/ Kota lainnya di provinsi Sumatera Barat dan mengali lebih dalam terhadap asumsi-asumsi peneliti sebelumnya. Defenisi yang ada tentang pendekatan penelitian salah satunya oleh Afrizal bahwa pendekatan penelitian berbeda dengan metode penelitian. Pendekatan kualitatif lebih mengacu kepada perspektif teoritis sementara metode penelitian adalah strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan menganalisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian (Afrizal, 2014:11-13).

Creswell (2014:24) juga memberikan kriteria penelitian kualitatif seperti berkembang dinamis, pertanyaan terbuka, data wawancara, data dokumentasi, data audio

visual, analisis tekstual dan gambar, interpretasi tema-tema. Lebih tegasnya tentang pendekatan penelitian atau metode penelitian, maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan memberikan pertanyaan terbuka kepada informan dan peneliti mengarahkan dengan panduan pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya, data wawancara berupa karakteristik pemilihan informan, data dokumentasi melalui data resmi yang dikeluarkan oleh KPU Kota Padang Panjang, KPU Provinsi Sumatera Barat, KPU RI, Disdukcapil Kota Padang Panjang, BPS Kota Padang Panjang, data audio berupa rekaman kepada semua informan, data visual berupa foto dengan informan, analisis tekstual dan gambar berupa analisa terhadap semua bahan primer dan sekunder yang didapatkan peneliti selama penelitian berlangsung, interpretasi tema-tema berupa penafsiran terhadap bahan yang didapat oleh peneliti selama penelitian

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Budaya Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Tahun 2015 Di Kota Padang Panjang

i. Aspek Responsivitas

Responsivitas dalam kinerja PPDP adalah kemampuan dari PPDP untuk mengenali pemilih yang mau dijumpai, menyusun agenda kerjanya untuk menjumpai satu persatu pemilih dari rumah ke rumah, prioritas pelayanan kepada pemilih yang mudah dijumpai dan lengkap secara administrasi, mengembangkan program pelayanan pendataan pemilih sesuai kebutuhan pemutakhiran data pemilih dan mendengar aspirasi pemilih apabila ada pemilih yang memenuhi syarat/ tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemilih.

Responsivitas menurut teori Lenvine (1990) sudah dijalankan dengan baik oleh PPDP sesuai dengan kriteria yang dibuat

mengenali karakteristik pemilih yang pedagang, menyusun agenda kapan harus menjumpai pemilih bagi pemilih yang sulit untuk dijumpai sehingga ada skala prioritas pelayanan bagi pemilih tersebut agar terpenuhi haknya sebagai pemilih, membuat program pelayanan pendataan pemilih sesuai kebutuhan pemutakhiran data pemilih dalam bentuk sosialisasi dan aspirasi masyarakat yang harus dicoret dalam daftar pemilih bisa terpenuhi walaupun tidak mempunyai surat akta kematian dari Disdukcapil Kota Padang Panjang serta pemilih yang sudah pindah domisili masih tetap terdaftar di DPS karena pemilih masih ber KK dan KTP Kota Padang Panjang.

ii. Aspek Profesionalisme

Profesionalisme dapat diartikan PPDP dalam pemutakhiran data pemilih yang membutuhkan kompetensi atau keahlian teknis sesuai persyaratan menjadi PPDP yang ada dalam UU nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum pasal 52, PPDP dituntut untuk bertindak profesional dalam menjalankan tugasnya terhadap kompleksitas permasalahan pemutakhiran data pemilih dan selalu memperbaharui perkembangan data pemilih dari KPU dan penggunaan teknologi selama menjalankan tugas 36 (tiga puluh enam hari) menjalankan tugas sebagai PPDP.

Teori Kinerja menurut Lenvine (1990) aspek profesional rekrutmen PPDP sesuai persyaratan, profesionalitas dalam menjalankan tugasnya terhadap kompleksitas permasalahan pemutakhiran data pemilih sudah baik yang dibuktikan semua persoalan diselesaikan secara berjenjang, profesionalisme perihal memperbaharui perkembangan data pemilih dari KPU dapat dilakukan dengan Bimtek PPDP yang diberikan setelah dilantik, monitoring cokolit bagi PPDP dan buku panduan yang diterbitkan langsung oleh KPU RI agar informasinya sama se Indonesia, profesionalisme penggunaan teknologi sangat minim dan tidak disediakan oleh KPU.

iii. Aspek Produktivitas

Konsep produktivitas PPDP umumnya dipahami sebagai perbandingan antara *input* berupa Daftar Pemilih (Model A-KWK) dan *output* mencoret pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat seperti pemilih pindah domisili, pemilih ganda, pemilih meninggal dunia, pemilih bukan penduduk setempat dan pemilih tidak dikenal yang menjadi 5 (lima) besar pemilih TMS di Daftar Pemilih/ Model A-KWK. Setiap PPDP pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 di Kota Padang Panjang menerima pemilih maksimal 400 (empat ratus) pemilih dan apabila lebih dari 400 (empat ratus) pemilih 1 (satu) TPS, maka PPDP nya ada 2 (dua) orang.

Produktifitas menurut Lenvine (1990) tidak semata-mata dipahami sebayak-banyaknya pemilih TMS dengan kategori tertinggi di Kota Padang Panjang seperti pindah domisili, ganda, meninggal dunia, bukan penduduk setempat dan pemilih tidak dikenal dari *input* data di Daftar Pemilih/ Model A-KWK sebesar 39.292 pemilih dan rasio dengan output data di DPS/ Daftar Pemilih Sementara sebesar 36.103. Bila dirasioakan ada pengurangan data pemilih sebesar 5.220 pemilih atau 13,28 % dari data awal Daftar Pemilih/ Model A-KWK dan bila dirasioakan lagi dengan DPT terakhir sejumlah 34.072 pemilih tetap ada peningkatan jumlah pemilih sebesar 2.031 pemilih atau 5,96 % hal itu bila dirasioakan dengan pertumbuhan penduduk Kota Padang Panjang pertumbuhan penduduk di Kota Padang Panjang berjumlah 0,18 % pada tahun 2015 berdasarkan buku Profil perkembangan kependudukan Kota Padang Panjang. Artinya masih ada kesenjangan pemilih 5,78 % yang harus dimutakhirkan sesuai kondisi sesungguhnya di lapangan dan ini terus dimutakhirkan hingga hari H pemilihan 9 Desember 2015.

iv. Aspek Akuntabilitas

Pertanggungjawaban dari PPDP tentang apa yang telah dilakukan terhadap pihak yang berkepentingan. Konsep ini mengarah kepada pengertian bahwa segala tindakan organisasi akan dinilai dan dievaluasi oleh kalangan yang terkait atau

memiliki kepentingan. DPS yang merupakan hasil kerja PPDP yang diinput ke dalam SIDALIH yang berisikan pemilih baru yang memenuhi syarat untuk masuk ke dalam DPS sebanyak 1.203 (seribu dua ratus tiga) pemilih yang potensi masuk 1.118 (seribu seratus delapan belas) pemilih, lebih banyak yang masuk dari pada hasil cokolit PPDP karena ada tambahan dari pemilih pindah TPS sebanyak 332 (tiga ratus dua puluh dua) dan pemilih tersaring diaktifkan lagi sebanyak 84 (delapan puluh empat) pemilih.

Secara umum kinerja PPDP berkaitan aspek akuntabilitas di Padang Panjang sudah baik dan semua hasil kinerja PPDP dalam pemutakhiran data pemilih dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada pihak yang berkepentingan seperti Panwas Kota Padang Panjang dan Tim Kampanye Paslon 1 dan 2, semua pihak tersebut bisa memberikan masukan dan mengoreksi apabila masih ada data pemilih yang perlu ditambah dan dicoret dari daftar pemilih.

v. Aspek Kerja Sama

Dilihat dari pengertian kerja sama di kerangka mengandung pengertian PPDP merupakan bagian yang utuh dari KPU Kota Padang Panjang dalam pemutakhiran data pemilih, yang terdiri dari 1 (satu) atau 2 (dua) PPDP per TPS dengan latar belakang kompetensi bervariasi dan ditentukan kemampuan bekerja sama dengan pihak *interent* KPU seperti KPU Kota Padang Panjang, PPK, PPS dan sesama PPDP itu sendiri, juga pihak *eksterent* KPU seperti Panwas Kota, Panwascam, PPL, RT, tetangga sekitar rumah pemilih, Kepala asrama di asrama sekolah, asrama polisi, Lapas II Kota Padang Panjang di kelurahan Tanah Pak Lambik

Teori Kinerja menurut Lenvine (1990) aspek kerja sama, PPDP sudah bekerja sama dengan baik kepada pihak yang secara budaya kerja atau pemahaman tentang pemutakhiran data pemilih berbeda dengan apa yang di pahami PPDP ini biasanya eksternal KPU seperti RT, pihak asrama dan lapas II Padang Panjang sesuai prosedur yang ada untuk menemui ketua RT

atau kepala asrama untuk daerah yang ada asrama sehingga pendataan pemilih bisa lebih mutakhir dan PPDP saat memasuki suatu wilayah untuk mendata pemilih izin terlebih dahulu kepada pihak setempat seperti Ketua RT dan Kepala Asrama dan kerja sama PPDP dengan pihak yang latar belakang budaya/pemahaman yang sama tentang pemutakhiran data pemilih ini internal KPU seperti KPU Kota Padang Panjang, PPK, PPS dan PPDP itu sendiri. PPS sudah tentu mempunyai penilaian kompetensi tertentu kepada PPDP untuk daerah yang ada kawasan khusus seperti asrama sekolah/ polisi atau Lapas sehingga tujuan untuk mendapatkan data pemilih bila dibandingkan dengan wilayah kerja PPDP rumah penduduk semuanya, salah satunya melibatkan pihak kawasan tertentu menjadi PPDPnya langsung.

vi. Aspek Kualitas Pelayanan

Dalam perspektif KPU berkaitan kualitas pelayanan kinerja PPDP dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015, ada kepuasan pemilih yang ditandai tidak ada atau sedikitnya tanggapan masyarakat terhadap DPS yang diumumkan oleh KPU Kota Padang Panjang, *stakeholder* yang terkait data pemilih seperti Panwaslu tidak ada permasalahan kinerja PPDP dalam bahasa Panwaslunya tidak ada temuan yang perlu ditindak lanjuti oleh KPU Kota Padang Panjang, juga dari Disdukcapil Kota, Tim Kampanye paslon 1 dan 2.

Teori kinerja Lenvine (1990) aspek kualitas pelayanan dari puas tidak puasnya pemilih dapat terlihat kualitas layanan pemutakhiran data pemilih di KPU Kota Padang Panjang sudah bagus, walaupun perlu ditingkatkan kembali menjadi lebih baik mengingat secara geografis tidak ada hambatan dan berdasarkan laporan KPU temuan ada setelah pleno DPS, sedangkan saat cokolit PPDP tidak ada temuan lisan dan tertulis yang diberikan panwas kepada KPU Kota Padang Panjang.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas secara mendalam yang melihat kinerja PPDP dari 6 (enam) aspek dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Aspek responsivitas menurut teori Lenvine (1990) sudah dijalankan dengan baik oleh PPDP sesuai dengan kriteria yang dibuat mengenali karakteristik pemilih yang pedagang, menyusun agenda kapan harus menjumpai pemilih bagi pemilih yang sulit untuk dijumpai sehingga ada skala prioritas pelayanan bagi pemilih tersebut agar terpenuhi haknya sebagai pemilih, membuat program pelayanan pendataan pemilih sesuai kebutuhan pemutakhiran data pemilih dalam bentuk sosialisasi dan aspirasi masyarakat yang harus dicoret dalam daftar pemilih bisa terpenuhi walaupun tidak mempunyai surat akta kematian dari Disdukcapil Kota Padang Panjang serta pemilih yang sudah pindah domisili masih tetap terdaftar di DPS karena pemilih masih ber KK dan KTP Kota Padang Panjang.
2. Aspek profesional rekrutmen PPDP sesuai persyaratan, profesionalitas dalam menjalankan tugasnya terhadap kompleksitas permasalahan pemutakhiran data pemilih sudah baik yang dibuktikan semua persoalan diselesaikan secara berjenjang, profesionalisme perihal memperbaharui perkembangan data pemilih dari KPU dapat dilakukan dengan Bimtek PPDP yang diberikan setelah dilantik, monitoring cokolit bagi PPDP dan buku panduan yang diterbitkan langsung oleh KPU RI agar informasinya sama se Indonesia, profesionalisme penggunaan teknologi sangat minim dan tidak disediakan oleh KPU.
3. Aspek produktifitas tidak semata-mata dipahami sebayak-banyaknya pemilih TMS dengan kategori tertinggi di Kota Padang Panjang seperti pindah domisili, ganda, meninggal dunia, bukan penduduk setempat dan pemilih tidak dikenal dari *input* data di Daftar Pemilih/Model A-KWK sebesar 39.292 pemilih dan rasio dengan output data di DPS/ Daftar Pemilih Sementara sebesar 36.103. Bila dirasioakan ada pengurangan data pemilih sebesar 5.220 pemilih atau 13,28 % dari data awal Daftar Pemilih/Model A-KWK dan bila dirasioakan lagi dengan DPT terakhir sejumlah 34.072 pemilih tetap ada peningkatan jumlah pemilih sebesar 2.031 pemilih atau 5,96 % hal itu bila dirasioakan dengan pertumbuhan penduduk Kota Padang Panjang pertumbuhan penduduk di Kota Padang Panjang berjumlah 0,18 % pada tahun 2015 berdasarkan buku Profil perkembangan kependudukan Kota Padang Panjang. Artinya masih ada kesenjangan pemilih 5,78 % yang harus dimutakhirkan sesuai kondisi sesungguhnya di lapangan dan ini terus dimutakhirkan hingga hari H pemilihan 9 Desember 2015
4. Aspek akuntabilitas di Padang Panjang sudah baik dan semua hasil kinerja PPDP dalam pemutakhiran data pemilih dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada pihak yang berkepentingan seperti Panwas Kota Padang Panjang dan Tim Kampanye Paslon 1 dan 2, semua pihak tersebut bisa memberikan masukan dan mengoreksi apabila masih ada data pemilih yang perlu ditambah dan dicoret dari daftar pemilih.
5. Aspek kerja sama PPDP sudah bekerja sama dengan baik kepada pihak yang secara budaya kerja atau pemahaman tentang pemutakhiran data pemilih berbeda dengan apa yang di pahami PPDP ini biasanya eksternal KPU seperti RT, pihak asrama dan lapas II Padang Panjang sesuai prosedur yang ada untuk menemui ketua RT atau kepala asrama untuk daerah yang ada asrama.
6. Aspek kualitas pelayanan pemutakhiran data pemilih di KPU Kota Padang Panjang sudah bagus, walaupun perlu ditingkatkan kembali menjadi lebih baik mengingat secara geografis tidak ada hambatan dan berdasarkan laporan KPU temuan ada setelah pleno DPS, sedangkan saat cokolit PPDP tidak ada temuan lisan dan tertulis yang diberikan

panwas kepada KPU Kota Padang Panjang.

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dikemukakan dari analisis permasalahan pada kinerja PPDP dalam pemutakhiran data pemilih maka dirumuskan saran-saran yang diharapkan berguna untuk perbaikan dalam pemutakhiran data pemilih pada pelaksanaan pemilu ke depan.

1. Adapun saran akademis yang diberikan penulis berdasarkan teori kinerja oleh Lenvine (1990) sebagai berikut : Teori sudah jelas mengukur kinerja PPDP dalam pemutakhiran data pemilih dan peneliti harus mengkaitkan dengan Peraturan KPU yang membahas secara khusus seperti apa PPDP itu seharusnya bekerja, beserta aturan perundang-undangan yang ada. Penyandingan antara teori dengan peraturan ini yang akan menjadi titik temu seperti apa seharusnya PPDP bekerja sehingga tidak ada penafsiran lain kinerja PPDP yang merupakan bagian yang utuh dari KPU itu sendiri.
2. Penelitian selanjutnya bisa melihat kinerja PPDP dalam perspektif hukum sehingga pemutakhiran data pemilih yang dilakukan bisa secara *defacto* dan *de jure* dan pengukuran kinerja lebih terarah dan jelas serta mudah dalam pengukurannya terutama aspek responsivitas, profesionalisme dan kualitas pelayanan. Tanpa ada penjelasan secara teknis yang merupakan turunan dari perundang-undangan akan menjadi hambatan PPDP dalam melaksanakan kinerja pemutakhiran data pemilih dan penjelasan teknis harus bersifat tunggal penafsiran, pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemutakhiran data pemilih hanya merujuk pada penafsiran tunggal tersebut.
3. Saran praktis dari peneliti dalam melihat kinerja PPDP dalam proses pemutakhiran data pemilih adalah pemilih secara *defacto* dan *de jure* menjadi salah satu

solusi bagi KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS hingga PPDP untuk terpenuhinya prinsip komprehensif, akurat dan mutakhir dalam pendataan pemilih di pemilu dan pemilihan yang menggunakan sistem *Continuous Register or List* pada pemilu 2018 pemilihan Walikota dan Walikota Padang Panjang, pemilu serentak legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 yang akan datang

D. UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini dibuat berdasarkan hasil penelitian yang dibiayai oleh KPU RI dan pihak-pihak yang membantu hingga artikel ini selesai penulis ucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, (2014). *Metode Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Padang. Raja Grafindo Persada
- Ali, Lukman. (1999). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Anusapati., Martoyo dan Sukanto. 2014. Kinerja Aparatur KPU Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2014*: 1-18
- Asy'ari, Hasyim. 2012. Rekomendasi Sistem Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Rangka perubahan UU nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. *Jurnal Perludem Vol. 2 No.2*:35-52
- Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang. (2014). *Indikator Kesejahteraan rakyat Kota Padang Panjang 2014*. Padang Panjang
- Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang (2015). *Padang Panjang Dalam Angka 2015*. Padang Panjang
- Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang. (2016). *Kota Padang Panjang dalam Angka 2016*. Padang Panjang
- Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang. (2016). *Statistik daerah kota Padang Panjang 2016*. Padang Panjang
- Budiman, Arief. (2002). *Teori Negara (Negara, Kekuasaan dan ideologi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Creswell, Jhon W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan desain Riset; Memilih di antara Lima Pendekatan*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Fadlullah, Ferry. 2016. Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi di Pilkada 2015 susulan. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Vol. 3 No.5*:1-25
- Hafidz, Masyuruddin. (2017). *Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 dan 2017*. Jakarta. KPU RI
- Haris. 2016. Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 di Kecamatan Palsa Kabupaten Parigi Moutong. *E jurnal Katalogis, Vol. 4 No. 4*: 50-61
- Haryati, Dedeh. 2012. Penguatan Peran Panwaslu Dalam Pemilukada; Studi kasus Pemilukada Kabupaten Jembrana. *Jurnal Bina Praja Vol.4 No.2*: 135-146
- Idris, dan M.Y Tiya. 2014. Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Proses Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011 (kasus Kelurahan Pasar Baru baserah Kecamatan Kuantan Hilir). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) ISIP Universitas Riau Jom Fisip Vol. 1 No.2*:1-15
- Indriyani, Nila. 2015. *Bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015; Materi Bimtek PPS*. Padang Panjang
- Jani, Hamsan. 2015. Tinjauan Tentang Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Kabupaten Peser. *Universitas Mulawarman e-journal ilmu pemerintahan, Vol.3 No.4*:1487-1501
- Jemi., Damayanti Suhita dan Aris Tri Haryanto. 2015. Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pilpres tahun 2014 di Kota Surakarta. *Transformasi Vol.1 No.28*:1-8
- Karlina, Ni Made Devi., Ni Nyoman Dewi Pascarani dan Putu Eka Purnamaningsih. 2015. Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Dalam Proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Dalung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2015. *Jurnal Fisip Udayana. Vol.5 No.8*:1-8
- KPU Kota Padang Panjang. (2015). *Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015*. Padang Panjang

- KPU Kota Padang Panjang. (2015). *Buku Laporan Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 KPU Kota Padang Panjang*, Padang Panjang
- Kurniawan, Derry. 2015. Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pilpres 2014 di Kota Samarinda. *Universitas Mulawarman E-Journal Ilmu pemerintahan Vol. 3 No.2: 1225-1239*
- Lee, Antony dkk. (2017). *Inovasi Pemilu; Mengatasi Tantangan, Memanfaatkan Peluang*. KPU RI. Jakarta
- Masyudi. 2015. Kinerja Birokrasi Pemerintah dalam Pelayanan Kepada Publik. *Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama Vol.IV No.1:47-66*
- Orocomna, Willem. 2014. Kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat (suatu studi kinerja panwas distrik Moskona Utara tahun 2014). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Fisip Unsrat Vol.3 No.7:1-10*
- Pemerintah Kota Padang Panjang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, (2016). *Profil Perkembangan Kependudukan Kota Padang Panjang Tahun 2016*. Padang Panjang
- Potabuga, Faried. 2016. Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014. *e jurnal Katalogis, Vol.4 No.7:157-168*
- Putra, Nuryadi Rahmad. 2017. Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bantan tahun 2015. *Jom Fisip Vol.4 No.2:1-12*
- Saefudin Sulaiman, Dudy dkk. (2015). *Statistik 70 tahun Indonesia*. BPS Jakarta Indonesia. Jakarta
- Samino, Partono. (2015). *Panduan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih; PPDP; Pemilu 2015*. Jakarta: KPU RI
- Samino, Partono. (2015). *Panduan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih; KPU Kabupaten/ Kota; Pemilu 2015*. Jakarta: KPU RI
- Sebastin, Ambar Purdanata., Patar Rumapea dan Daud M. Liando. (2016). Profesionalisme KPU Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015. *Jurnal Unsrat Vol.4 No.6:23-38*
- Setiyanti, Sri Wiranti. (2012). Membangun Kerja Sama Tim (Kelompok). *Jurnal Stie Semarang Vol. 4 No.3:59-65*
- Sugihariadi, Moh, dan Joni Raharjo. (2015). Menakar Profesionalisme Penyelenggara Pemilu 2014 di Kota Garam: Analisis Kepemimpinan, Integritas, Independensi dan Kompetensi Kepemiluan. *Addin Vo.9 No.1:107-128*
- Suprpto., Muhammadiyah dan Syamsir Rahim. (2013). Kinerja Komisi Pemilihan umum daerah Luwu Utara dalam Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013. *Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. III No.2:163-176*
- Surbakti, Ramlan dkk. (2014). *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutakhiran Daftar*. Kemitraan: Jakarta
- Surbakti, Ramlan dkk (2015). *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif*. Kemitraan: Jakarta
- Syari, Ika Widya. (2013). Analisis Kinerja Pegawai Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu. *e-Jurnal Katalogis, Vol 1 No. 2: 116-123*

- Turambi dan Jeine Mariana. (2015). Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tomohon Barat pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon tahun 2015. *Jurnal Unsrat Politico* vol. 6. No.1:10-35
- Wahyu., Harpani Matnuh dan Siti Nurfajrina. (2014). Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Mensukseskan Pemilihan Umum Kepala Daerah Hulu Sungai Utara Periode 2012-2017. *Jurnal Kependidikan Kewarganegaraan* Vol.4 No.7:579-586
- Wall, Alan dkk. (2016). *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA*. Perludem. Jakarta

LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI API: STUDI TENTANG HAMBATAN PELAKSANAAN PERAN

T. Romi Marnelly

Submitted Article: 28 July 2018

Reviewed Article: 20 September 2018

Accepted Article: 18 December 2018

Abstract

One of susceptible area that occurs the conflagration is Kampung Rawa Mekar Jaya, Subdistrict of Sungai Apit, Siak Regency, Province of Riau where a big part of its area possesses peat moss. The conflagration can be caused some factors among others dry season, canal making in the peat moss soil and the deliberateness of human in speeding up the plantation open. For saving and preventing and coping with the environment and the conflagration needs to have the good environment proces and it certainly needs to get the support and the role and the society. In the village, there is an institution that focuses on the environment process, the pure from the society self-support is namely The Institution of The Caring Society of The Fire that has duty on the activity of the prevention, the extinguishing and the handling of postconflagration of the forest and the land. The research has goal to know the obstacle or the hindrance for the staff of The Institution of The Caring Society of The Fire in implementing the role. The research method that is used is descriptive qualitative in sampling in census namely as many 23 people. The data is obtained through the observation, the direct interview by using the questioner. Based on the research result, The obstacle of staff of the Caring Society of The Fire in implementing the role known from the work environment, the society environment, the nature environment and the lack of the support especially from the side of the government and the private.

Keywords: *The Institution of Caring Society of Fire, Obstacle, Role*

A. PENDAHULUAN

Kebakaran lahan merupakan bencana yang datang hampir setiap setahun di Provinsi Riau. Salah satu kawasan yang rentan terjadi kebakaran adalah Kampung Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dimana sebagian besar daerahnya berlahan gambut. Tanah gambut ini kedalamannya bervariasi antara 2 sampai 8 meter. Kerusakan lingkungan akibat kebakaran ini tidak lepas dari pola struktur sosial dan sistem sosial dimana terbentuk dari individu/kelompok yang berinteraksi. Persoalan lingkungan tidak mungkin bisa

dijelaskan dalam motivasi-motivasi internal individu, tetapi lebih penting merupakan produk gerak sistem yang terbukti anti-ekologis (Susilo, 2008 : 178-180).

Manusia, lingkungan dan kebudayaan, merupakan satu kesatuan sistem yang jalin menjalin satu sama lain. Ketika satu komponen dari sistem mengalami perubahan maka komponen yang lainnya juga akan mengalami perubahan (Marnelly, 2017:151). Dulu manusia menganggap bahwa alam adalah sesuatu yang misterius dan sakral sehingga perlakuan manusia terhadap alam sangatlah ramah, ketika teknologi semakin berkembang, dan keinginan menguasai alam semakin berkembang orang-orang tidak lagi ramah kepada alam. Tak heran, banyak orang

¹ Department of Sociology, FISIP, Universitas Riau

* Corresponding Author: t.romi@lecturer.unri.ac.id

melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak alam seperti illegal logging serta membakar hutan.

Kebakaran bisa disebabkan beberapa faktor diantaranya musim kemarau, pembuatan kanal dilahan gambut serta kesengajaan manusia dalam mempercepat pembukaan perkebunan. Berdasarkan asumsi teori pilihan rasional, seseorang atau perilaku aktor memiliki seperangkat preferensi untuk memenuhi keinginannya, perilaku aktor tersebut dilihat sebagai material oriented dan mengutamakan kepentingan pribadi. (Haryanto, 2012 : 198), membuka lahan dengan membakar tentu saja lebih cepat, efektif dan efisien bagi pemilik lahan/pemilik modal dan tentu saja mencerminkan sikap yang egois karena mengabaikan kesehatan dan keselamatan masyarakat terutama yang berdekatan dengan areal kebakaran. Kebakaran mengakibatkan timbulnya asap yang menyelimuti kawasan sekitaran dengan radius jangkauan yang sangat luas hingga menjangkau negara tetangga. sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan, lumpuhnya perekonomian, terhentinya transportasi, dan lain sebagainya. Paham individualisme ini adalah sebagai salah satu sumber masalah, jika *Self orientations* lebih berkembang dibandingkan *collective orientation*, memperoleh kepentingan pribadi dengan mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan orang lain tentu dapat mempercepat krisis ekologi (Soetomo, 2008: 383).

Untuk menyelamatkan dan mencegah serta menanggulangi lingkungan dari kebakaran perlu ada pengelolaan lingkungan dengan baik tentu perlu dukungan ataupun peran serta masyarakat. Di Kampung Rawa Mekar Jaya ini terdapat Lembaga yang berkosentrasi dalam pengelolaan lingkungan. Sesuai dengan pendapat Gillin dan Gillin bahwa lembaga mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. (M. Setiadi dan Kolip, 2011 : 294). Lembaga Masyarakat Peduli Api ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran serta penanganan hutan pasca kebakaran yang murni dari swadaya masyarakat.

Munculnya lembaga MPA ini ternyata tidak berpengaruh signifikan dalam mengurangi jumlah kebakaran, sehingga menimbulkan pertanyaan apa saja sebenarnya yang menjadi kendala atau hambatan bagi personil MPA dalam menjalankan perannya. Ketika membicarakan peran berarti merujuk pada fungsi yang maknanya fungsi tersebut berasal dari posisi atau kedudukan seorang di dalam masyarakat (Narwoko dan Suyanto, 2007 :158-159) . Adapun peran MPA ini secara normatif dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: P. 2/IV-SET/2014 tentang Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api yang menyebutkan bahwa Masyarakat Peduli Api bertugas dalam melakukan kegiatan mencegah kebakaran, memadamkan api serta penanganan hutan dan lahanpasca kebakaran

B. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian adalah di Kampung Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau. Alasan pemilihan lokasi karena daerah tersebut berlahan gambut dan rentan dan sering terjadi kebakaran. Populasi adalah seluruh objek yang diteliti dan jika salah dalam menentukan populasi, maka dalam penarikan sampelnya juga salah. (Suyanto dan Sutinah, 2007: 139). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua anggota Lembaga Masyarakat Peduli Api yang berjumlah 23 orang. Sedangkan teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan sensus. Jenis dan Sumber Data yakni Data Primer Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah secara individual atau berkelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik benda (fisik), kejadian dan hasil pengujian hasil wawancara, observasi langsung dihasilkan dari pendapat dan alasan tokoh masyarakat terhadap responden. Data Sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh perantara atau data tersebut diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya dari kepustakaan di dokumentasi serta laporan-laporan

berupa profil Kampung Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau. Teknik Pengumpulan Data adalah Observasi, Wawancara langsung dengan menggunakan kuestioner yang telah disiapkan sebelumnya untuk memperoleh data yang diperlukan dan tidak menyulitkan responden dalam memberikan jawaban dan Dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan penjelasan analisis kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1) Kuestioner yang sudah terisi pertama kali ditabulasi dalam bentuk tabel tunggal atau tabel frekuensi 2) Pada tabel frekuensi tersebut akan dianalisis rerata, kecenderungan maksimum dan kecenderungan minimum 3) Untuk memberikan penjelasan lebih lanjut dilakukan penafsiran secara kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. HAMBATAN MASYARAKAT PEDULI API DALAM MENJALANKAN PERAN

Masyarakat Peduli Api memiliki peran dan tugas penting dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: P. 2/IV-SET/2014. Dalam menjalankan tugas

tersebut masyarakat peduli api dituntut untuk bekerja secara aktif, sukarela dan bertanggungjawab. Tujuannya agar permasalahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah desa dapat dikendalikan dan diatasi. Menurut Nurani Soyomukti, dalam masyarakat, terkadang dijumpai individu yang tak mampu melaksanakan perannya sebagaimana diharapkan masyarakat, barangkali pelaksanaannya memerlukan pengorbanan kepentingan-kepentingan pribadinya yang terlalu banyak (Soyomukti, 2010 : 385). Selama ini terdapat beberapa kendala yang dihadapi personil MPA dalam menjalankan peran dan tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kendala tersebut ternyata diketahui berasal dari lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, lingkungan alam dan pemerintah.

1. Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas personil MPA dalam menjalankan tugas menjaga hutan dan lahan desa. Lingkungan kerja yang dimaksud adalah lingkungan kerja fisik berupa keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang rendah serta psikososial yakni hubungan antar personil MPA yang tidak terjalin dengan baik. Hasil identifikasi lapangan, setidaknya terdapat 5 item kendala yang dihadapi personil MPA dalam lingkungan kerja, diantaranya yakni:

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Kendala Kerja Berasal dari Lingkungan Kerja

No	Kendala Kerja	Frekuensi	Persentasi (%)
1	Keterbatasan Anggaran MPA	3	13,0
2	Kurangnya keamanan dan keselamatan kerja	5	21,7
3	Kurangnya kekompakan anggota MPA	2	8,7
4	Tidak ada asuransi kerja	12	52,2
5	Tidak transparannya anggaran	1	4,3
Total		23	100

Sumber: Data Lapangan, 2018

Tabel di atas menunjukkan kurangnya keamanan dan keselamatan kerja personil MPA serta tidak adanya asuransi di lingkungan kerja menjadi faktor kendala kerja utama bagi personil MPA dalam

menjalankan tugas menjaga hutan dan lahan desa. Dari 23 orang personil MPA, 73,9% diantaranya menyatakan lingkungan kerja yang tidak aman serta rawan terjadi kecelakaan kerja sangat mempengaruhi

mereka dalam menjalankan tugas terutama disaat tugas pemadaman api. Selain itu, tidak adanya asuransi kerja membuat personil MPA tidak berani mengambil resiko ketika melakukan tugas memadamkan api di lahan terbakar. Sementara 8,7% personil MPA menyatakan kurangnya kekompakan personil MPA turut pula mempengaruhi produktivitas kerja personil MPA di lapangan. Maksud dari kurang kekompakan disini adalah dimana terdapat personil yang melakukan pemadaman itu hanya sekedar saja, karena pada saat kebakaran terjadi mereka lebih mengutamakan pekerjaan pokok mereka sebagai buruh. Sehingga pada saat kebakaran terjadi tidak semua personil turun di lapangan. Hubungan yang terjalin tidak baik antara personil MPA menyebabkan pelaksanaan tugas di lapangan menjadi terganggu.

2. Lingkungan Masyarakat

Kendala lain yang sering muncul sebagai penghalang bagi personil MPA

dalam menjalankan tugas adalah berasal dari lingkungan masyarakat. Pada prinsipnya upaya pengendalian, pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan tidak hanya menjadi tanggungjawab petugas MPA namun juga masyarakat setempat. Menurut Arif Sumantri, kesehatan lingkungan dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan perilaku itu bersumber pada mentalitas (Sumantri, 2013: 17). Sejalan dengan pendapat Arif tersebut, berdasarkan penelitian ditemukan kendala kerja petugas MPA dari segi lingkungan masyarakat yakni kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran MPA, rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap lahan gambut dan mudarnya nilai gotong royong dalam masyarakat. Ketika masyarakat apatis terhadap upaya pengendalian kebakaran maka akan mempengaruhi peran MPA di lapangan. Tabel di bawah ini akan merinci kendala Kerja MPA dari lingkungan masyarakat.

Tabel 2. Kendala Kerja MPA dari Lingkungan Masyarakat

No	Kendala Kerja	Frekuensi	Persentase (%)
1	Kurangnya dukungan masyarakat terhadap MPA	2	8,7
2	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memadamkan lahan terbakar	15	65,2
3	Masyarakat kurang paham terhadap daerah rawan gambut	3	13,0
4	Masyarakat yang tidak menerima kehadiran MPA	1	4,3
5	Nilai gotong royong masyarakat mulai hilang	2	8,7
Total		23	100

Sumber : Data Lapangan, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 23 responden penelitian 65,2% menyatakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengendalian kebakaran lahan sangat mempengaruhi personil MPA dalam menjalankan tugas. 13,0% menyatakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kondisi gambut turut menghambat peran dan tugas personil MPA serta 8,7% lainnya menyatakan nilai gotong royong masyarakat yang sudah mudar dan kurangnya dukungan masyarakat terhadap lembaga MPA turut mempengaruhi kinerja

personil masyarakat peduli api di lapangan. Masyarakat kampung Rawa Mekar Jawa diketahui cenderung apatis dan tidak peduli ketika terjadi kebakaran lahan dan menganggap tugas memadamkan api adalah tanggungjawab MPA semata. Disamping itu terdapat juga masyarakat yang kurang mendukung terhadap kehadiran lembaga MPA di wilayah desa karena lembaga ini dianggap menghambat atau menghalangi mereka membuka lahan

dengan cara membakar dan sikap sinisme masyarakat juga disinyalir karena mereka menganggap MPA ini sebagai pelapor kepada pihak berwajib siapa pelaku pembakaran sehingga masyarakat merasa dimata. Akibatnya, ketika terjadi kebakaran lahan, personil MPA harus bekerja ekstra memadamkan api tanpa adanya bantuan dari masyarakat setempat.

Berdasarkan fenomena di atas dapat dijelaskan dengan konsep fakta sosial nonmaterial yang dikembangkan oleh Durkheim bahwa masyarakat sebenarnya mempunyai moralitas dan nurani kolektif (*collective conscience*), dimana kedua hal tersebut bersifat memaksa individu. Kekuatan moral dalam masyarakat bisa saja mengalami degradasi jika kepentingan bersama hanya merupakan total kepentingan individual. Hanya pada level bahwa moralitas merupakan sebuah fakta sosial maka ia bisa melakukan tekanan kewajiban kepada para individu yang menggantikan kepentingan mereka. Ikatan-ikatan moral itu sangat penting, karena tanpa itu individu akan akan dikuasai oleh nafsuserakah mereka. Satu hal yang selalu diinginkan setiap orang ialah menjadi "lebih" (Ritzer, 2012 : 134-137). Hilangnya nilai gotong royong, ketidakpedulian terhadap lingkungan, dan menyerahkan tanggung

jawab bersama untuk menyelamatkan dan menjaga lingkungan kepada sekelompok orang itu menunjukkan mulai melemahnya ikatan moral, yang diperkuat dengan menurunnya nurani kolektif. Durkheim menambahkan bahwa masyarakat-masyarakat "primitif" memiliki nurani kolektif yang lebih kuat dibandingkan masyarakat modern yakni berupa pengertian, nilai dan norma serta kepercayaan. (Ritzer, 2012 : 138).

3. Lingkungan Alam

Kondisi lingkungan alam turut menjadi faktor yang mempengaruhi peran dan tugas personil MPA dilapangan yakni berupa kondisi tanah Desa Rawa Mekar Jaya yang terdiri dari lahan gambut mudah terbakar, sulit dipadamkan dan sumber air yang jauh. Pengendalian dan pemadaman kebakaran dilahan gambut berbeda dengan pengendalian kebakaran dilahan aluvial atau lainnya. Proses pemadaman api ditanah gambut akan efektif jika dilakukan dengan alat khusus yang dapat menyuntikkan air ke dalam tanah dan membutuhkan sumber air yang banyak. Hasil indentifikasi lapangan, terdapat 4 item kendala yang dihadapi personil MPA dari lingkungan alam, diantaranya yakni:

Tabel 3. Kendala Kerja MPA dari Lingkungan Alam

No	Kendala Kerja	Frekuensi	Persentasi (%)
1	Faktor cuaca (musim kemarau panjang)	8	34,8
2	Kebakaran di lahan gambut sulit dipadamkan	12	52,2
3	Lahan gambut mudah terbakar	2	8,7
4	Sumber air terbatas	1	4,3
Total		23	100

Sumber : Data Lapangan, 2018

Tabel 5.22 menunjukkan kondisi alam desa Rawa Mekar Jaya berupa tanah gambut dalam menyebabkan personil MPA mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas pemadaman. Dari 23 responden penelitian, 60,9% menyatakan kondisi lahan gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan menjadi faktor dominan yang menghambat tugas MPA dilapangan. MPA

sering kali mengalami kesulitan ketika menjalankan tugas pemadaman. Hal ini disebabkan kebakaran dilahan gambut berbeda dengan lahan aluvial atau lainnya. Kebakaran dilahan gambut bukanlah api yang berkobar diatas permukaan tanah melainkan bara api yang terus menjalar didalamnya ditambah lagi lahan gambut yang terbakar sangat panas ketika dipijak.

Selain itu, faktor cuaca berupa kemarau panjang turut pula menjadi kendala bagi personil MPA dalam menjalankan tugas dilapangan sebagaimana yang dinyatakan oleh 8 orang personil MPA (34,8%) dan 4,3% responden lainnya menyatakan sumber air yang terbatas di wilayah Desa Rawa Mekar Jaya cukup mempengaruhi efektifitas personil MPA dalam menjalankan tugas pemadaman.

4. Dukungan Pemerintah dan Swasta

Sebagai lembaga sukarela yang memiliki tugas membantu Unit Pelaksana Teknis atau Kesatuan Pengelolaan Hutan serta Manggala Agni dalam melaksanakan kegiatan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan, lembaga MPA juga membutuhkan dukungan pemerintah dan swasta untuk

pelaksanaan perannya di tingkat masyarakat terutama dalam hal pendanaan. Hal ini dikarenakan lembaga MPA tidak memiliki sumber pendanaan mandiri dalam kelembagaannya. Hasil identifikasi lapangan diketahui bahwa kurangnya dukungan pemerintah dan pihak swasta terhadap lembaga MPA serta tidak sustainablenya bantuan dana yang diberikan pemerintah kepada MPA mengakibatkan pelaksanaan peran dan tugas personil MPA dilapangan terkendala. Sebagai lembaga yang bersifat swadaya, MPA tidak dapat menjalankan semua tugas yang diemban tanpa ada dukungan dari pihak kedua (pemerintah dan swasta). Berikut disajikan tabel kendala kerja yang berasal dari faktor pemerintah dan swasta:

Tabel 4 Kendala Kerja MPA dari Faktor Pemerintah dan Swasta

No	Hambatan Kerja	Frekuensi	Persentase (%)
1	Bantuan dan dukungan pemerintah tidak bersifat tetap dan berkelanjutan	3	13,0
2	Kurangnya dukungan pemerintah dan pihak swasta terhadap MPA	12	52,2
3	Tidak ada	8	34,8
Total		23	100

Sumber: Data Lapangan, 2018

Tabel 4 menunjukkan bahwa dukungan pemerintah dan swasta sangat mempengaruhi lembaga MPA dalam menjalankan tugas dilapangan. Dari 23 responden penelitian, 52,2% menyatakan pihak pemerintah kurang mensupport pendanaan lembaga MPA sehingga mereka terkendala dalam menjalankan peran dan tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan begitu juga dengan pihak swasta. Sementara untuk menjalankan tugas dilapangan, lembaga MPA membutuhkan pendanaan baik dalam tugas pencegahan, pemadaman maupun penanganan pasca kebakaran. Sementara 13,0% responden lainnya menyatakan bantuan dan dukungan pemerintah yang tidak bersifat tetap dan berkelanjutan turut mempengaruhi pelaksanaan tugas personil MPA dilapangan. Untuk

menjalankan tugas pencegahan, MPA membutuhkan bantuan yang bersifat berkelanjutan (*sustainable*) agar upaya pengendalian kebakaran dan penjagaan hutan dan lahan dapat dilakukan secara optimal.

Terbentuknya lembaga masyarakat peduli ini merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan atau pembangunan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Masyarakat Riau khususnya di Kampung Mekar Rawa Jaya sudah menjadi langganan tiap tahunnya menghirup udara yang tidak sehat, dimana pencemaran udara tersebut berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Berhasil tidaknya suatu pembangunan masyarakat sangat memerlukan intervensi dari

pemerintah. Mengutip pendapat Soetomo, idealnya, intervensi tersebut diharapkan mempercepat proses perubahan dan pembaruan, mengaktualisasikan potensi masyarakat, mendorong prakarsa masyarakat, mengembangkan kapasitas masyarakat. (329).

Tanpa ada dukungan terutama dari pemerintah tentunya tugas-tugas yang diemban oleh Masyarakat Peduli Api akan sulit direalisasikan. Selama ini Pemerintah tidak pernah menganggarkan dana untuk MPA mereka mendapatkan dana adalah berasal dari swadaya masyarakat. Ada 3 peran penting MPA yang pertama adalah tugas dalam mencegah kebakaran, dalam hal ini personil MPA perlu dana untuk membuat kegiatan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan membakar, lalu melakukan patroli keliling desa baik menggunakan transportasi darat maupun air yakni sampan motor terutama pada musim-musim rawan kebakaran (kemarau). Lalu peran yang kedua adalah tugas memadamkan api. Jika terjadi kebakaran yang luas paling tidak dana yang dibutuhkan untuk memadamkan api satu harinya adalah Rp. 3000.000 (Tiga juta rupiah) itu untuk pembelian bensin mesin Robin guna menyemprotkan air, membuat pemutus api, serta konsumsi personil. Sedangkan peran ketiga adalah pasca pemadaman dimana personil akan melakukan kegiatan konservasi dengan cara membibit dan menanam serta memelihara tanaman pada lahan yang terbakar, tentu saja memerlukan dana.

Suatu hal yang memprihatinkan adalah didalam melaksanakan pekerjaan dalam melakukan pemadaman api personil MPA ini tidak memiliki asuransi keselamatan kerja, sehingga apabila terjadi kecelakaan mereka akan membiayai sendiri biaya pengobatannya. Hal ini miris sekali karena, personil MPA ini kebanyakan bekerja sebagai buruh atau bisa dikatakan masyarakat ekonomi lemah. Untuk itu, dukungan pemerintah dalam hal menyediakan asuransi keselamatan kerja sangat diperlukan, juga melengkapi para personil dengan peralatan dan perlengkapan yang

memadai dalam melakukan pemadam sesuai dengan standar.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan kendala personil MPA dalam menjalankan perannya diketahui berasal dari: 1) Lingkungan kerja, dalam hal ini kendala terbesar adalah tidak ada asuransi kerja 2) Lingkungan masyarakat, dimana kendala terbesar adalah Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memadamkan lahan terbakar 3) Lingkungan alam, dalam hal ini kendala terbesar adalah Kebakaran di lahan gambut sulit dipadamkan 4) Dukungan pemerintah dan swasta, dalam hal ini kendala terbesar adalah Kurangnya dukungan pemerintah dan pihak swasta terhadap MPA. Sehubungan dengan ini, maka hal-hal yang disarankan adalah 1) Masyarakat Kampung Rawa Mekar Jaya dapat kiranya ikut serta dalam proses pemadaman api, hal itu di sebabkan tingginya beban dari dari kelompok MPA dalam proses Pencegahan, Pamadaman, dan Penanggulangan pasca kebakaran. Sehingga budaya gotong royong dapat hidup kembali di tengah-tengah masyarakat. 2) Kepada Pemerintah daerah baik dari tingkat kampung, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pihak pihak yang terkait, hendaknya memberikan perhatian yang lebih besar seperti pendanaan, keselamatan, maupun perlindungan hukum. Dukungan tersebut sangat dibutuhkan menyangkut keberlanjutan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) Kampung Rawa Mekar Jaya dalam menjalankan kegiatan pemadaman kebakaran lahan dan hutan. 3) Pihak swasta seperti perusahaan yang beroperasi disekitar Kampung Rawa Mekar Jaya, dapat kiranya memberikan bantuan dana maupun bantuan peralatan pemadam kebakaran, sehingga kebakaran dapat diatasi dengan cepat oleh kelompok MPA Kampung Rawa Mekar Jaya.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian yang saya lakukan terutama kepada pihak LPPM

Universitas Riau yang telah mendanai penelitian tersebut. Di samping itu, kepada anggota Lembaga Masyarakat Peduli Api Kampung Mekar Rawa Jaya yang sudah memberi informasi terkait hambatan pelaksanaan peran.

DAFTAR PUSTAKA

- Haryanto, Sindung. (2012). *Spektrum Teori Sosial Dari Kalsik Hingga Postmodern*. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta
- M. Setiadi, Elly & Kolip, Usman. (2011). *Pengantar Sosiologi (Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya)*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Marnelly, T.Romi. (2017). *Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Melayu Pesisir (Studi Pengelolaan Madu Sialang di Desa Rawa Mekar Jaya*. JURNAL ANTROPOLOGI: Isu-Isu Sosial Budaya. Desember 2017 Vol. 19 (2):149-154 _____ ISSN 1410-8356
- Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar dan Terapan* Kencana prenada media group. Jakarta
- Ritzer, George. (2012). *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Kalsik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Soetomo. (2008). *Masalah Soaial dam Upaya pemecahannya*. Pustaka pelajar. Yogyakarta
- Soetomo. (2009). *Pembangunan Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Soyomukti, Nurani. (2010). *Pengantar Sosiologi (Dasar Analisis, Teori, & Pendekatan Menuju Analisis Masalah-masalah Sosial, Perubahan Sosial, & Kajian-Kajian Strategis)*. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta
- Sumantri, Arif. (2013). *Kesehatan Lingkungan Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Susilo, Rachmad K. Dwi, (2008). *Sosiologi Lingkungan*. PT. Raja grafindo Persada. Jakarta
- Suyanto, Bagong dan Sutinah, (2007). *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*, Kencana. Jakarta

PETUNJUK PENULISAN YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PENULIS JURNAL ANTROPOLOGI: ISU-ISU SOSIAL BUDAYA

JENIS NASKAH SEBAGAI BERIKUT:

Naskah yang diterima adalah artikel yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya (original). Naskah dapat berupa jurnal laporan hasil penelitian atau artikel review. Naskah ditulis menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.

SISTEMATIKA NASKAH SEBAGAI BERIKUT:

1. Judul artikel
2. Nama lengkap penulis (tidak disingkat, tanpa gelar)
3. Afiliasi penulis (instansi tempat penulis bekerja dan alamat korespondensi)
4. Abstrak dan Kata kunci (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)
5. Pendahuluan
6. Metode Penelitian
7. Hasil dan Pembahasan
8. Kesimpulan & Saran
9. Ucapan terimakasih
10. Daftar Pustaka (**Sistem APA**)

PETUNJUK PENULISAN

1. Artikel ditulis sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa yang berlaku. Artikel diketik dengan satu spasi pada kertas A 4 dengan menggunakan program pengolah kata MS-Word for Windows, menggunakan huruf "Arial" 10 font, rata kiri, tanpa pemenggalan kata (*hard-hyphenation*), dan panjang tulisan 5.000-5.500 kata.
2. Judul artikel ditulis secara spesifik dan efektif, tidak lebih dari 11 kata.
3. Artikel dilengkapi dengan abstrak dalam bahasa Inggris dan Indonesia (dua bahasa), masing-masing berisi 100 s.d 150 kata, disertai 3 s.d 5 kata kunci
4. Artikel ditulis dalam bentuk essay, sehingga tidak ada format numeric (atau abjad) yang memisahkan antarbab/bagian, ataupun untuk menandai bab/bagian baru; Kesimpulan tidak dirinci dalam poin-poin, tetapi berupa paragraph. Setiap kutipan harus menyebutkan sumber pustaka yang termutakhir secara lengkap dan ditulis dengan sistem running note, misalnya:

Jurnal:

Zamzami, Lucky. (2011). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Jurnal MIMBAR: Sosial dan Pembangunan. Vol. 8, No.3, pp. 209–223.

Buku:

Effendi, Nursyirwan, (eds) (2007). 'Pembangunan Sosial dan Pembangunan', Edisi 1, Laboratorium Antropologi

Bagian dari buku:

Manan, B. (2010). Managing Innovation in the Information Age, in: Soelaiman, T.M. (Ed.) Seeing Differently: Insight on Innovation, Harvard Business Review Book, pp.193-202.

Conference paper (proceedings):

Dahlan, M.D. dan Tirtosudiro, A. (2010). Quality System Based on ISO 9000 Combined with QFD Proceedings: World Innovation & Strategy Conference 1998 incorporating 4th International Symposium on Quality Function Deployment, 2-5 August, Sydney Australia, pp.1-8.

Internet (bila ada) disusun dengan menyebutkan nama, judul artikel dan alamat situs web dalam kurung siku serta waktu mengakses. Contoh: R. Ceha (2010). Fenomena Anak Jalanan. (<http://www.mailarchive.com/kimiaui.html+anak+jalanan&hl>) diunduh pada 1 Januari 2014.

Penulis yang ingin memasukkan naskah harus memperhatikan poin-poin di bawah ini. Jika naskah tidak sesuai dengan persyaratan yang telah dicantumkan, ada kemungkinan naskah tersebut akan dikembalikan.

1. Dengan ini penulis menyatakan, bahwa naskah ini adalah hasil karya penulis sendiri.
2. Dengan ini penulis menyatakan, bahwa naskah ini belum pernah diterbitkan atau dalam proses penerbitan pada media apapun.
3. Dengan ini penulis menyatakan, bahwa naskah ini dibuat tanpa ada unsur plagiasi sedikitpun.
4. Dengan ini penulis menyatakan, panjang naskah yang diberikan adalah antara 10 sampai 15 halaman A4 (210 x 297 mm) termasuk di dalamnya gambar dan tabel.
5. Dengan ini penulis menyatakan, format dan aturan penulisan dalam naskah ini telah sesuai dengan format yang telah ditentukan dan telah menggunakan Bahasa Indonesia yang sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (*EYD*)
6. Penulis menyatakan, bersedia bertanggung jawab penuh terhadap isi naskah yang telah di submit maupun yang diterbitkan jika dikemudian hari ada pihak-pihak yang mempermasalahkannya.
7. Dengan ini penulis menyatakan, referensi yang digunakan minimum 10 sumber referensi, dengan > 70% adalah berasal dari 10 tahun terakhir.

Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya telah mendapatkan akreditasi nasional peringkat 2 Ristek Dikti, dengan nomor SK: 34/E/KPT/2018 Tanggal 10 Desember 2018



9 782393 506312



1 410 003504